BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/371 /KPTS/09/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun peta proses bisnis Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah ruang lingkup Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. program sasaran dan tujuan penyusunan peta proses bisnis tingkat Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten periode Tahun 2017-2022;
b. tahapan penyusunan dengan mendata kebijakan umum program pembangunan daerah Tahun 2017-2022;
c. melaksanakan identifikasi proses untuk mengelompokkan sasaran, jenis proses utama/pendukung/lainnya; dan
d. tabel identifikasi proses, identifikasi peta sub proses dan Identifikasi peta lintas fungsi serta peta relasi.

KETIGA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dipergunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Organisasi.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT

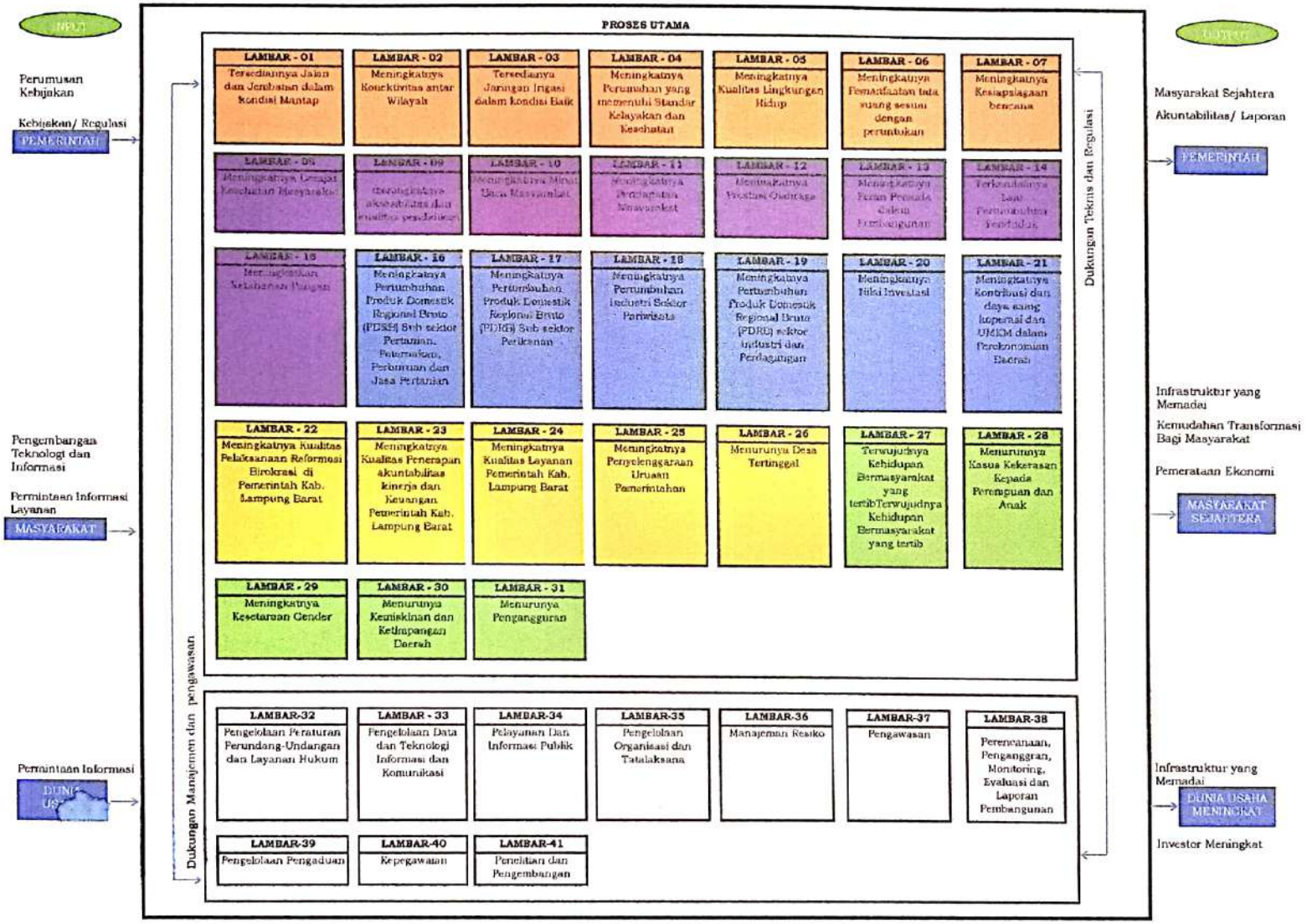
PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

OPD	KABAG HUKUM

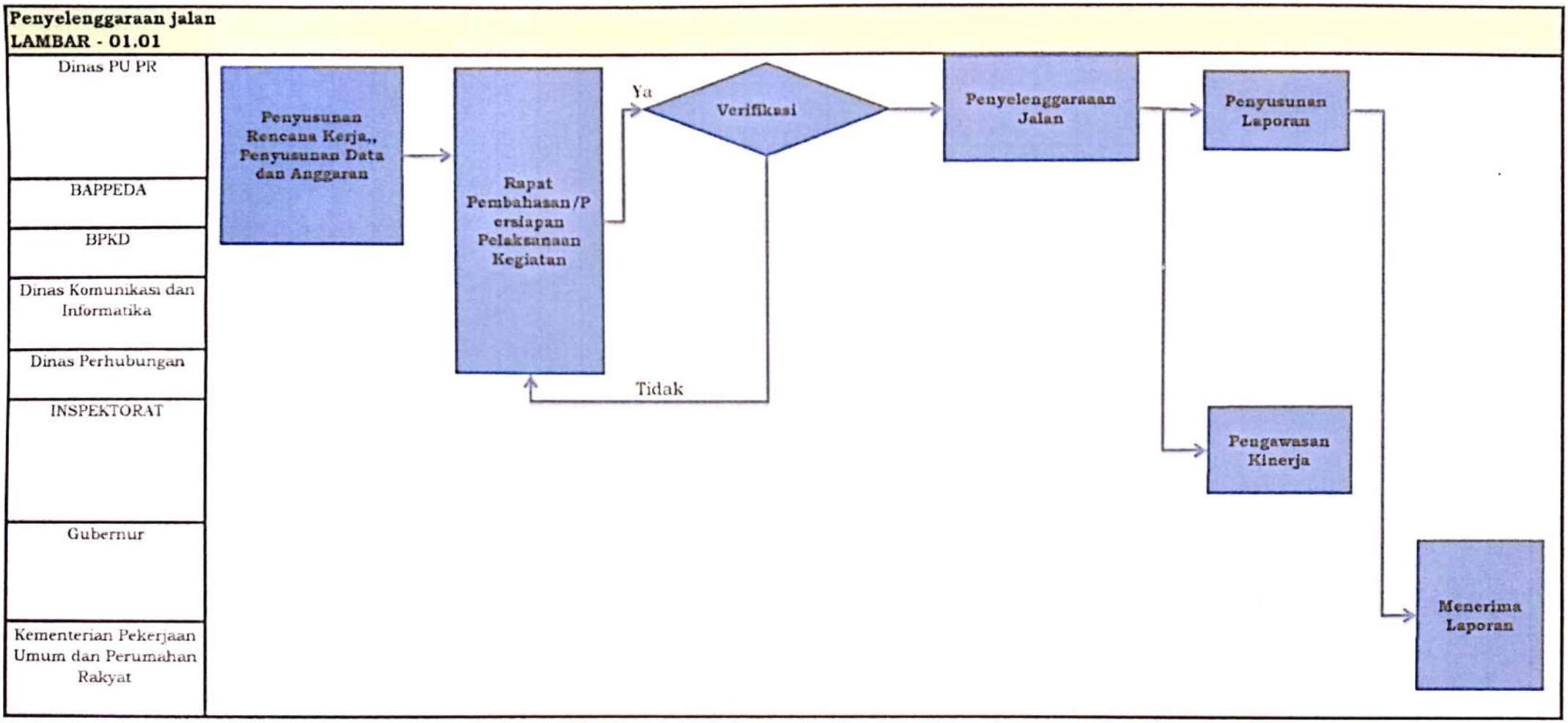
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 060/ /09/2022
TANGGAL : JULI 2022

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



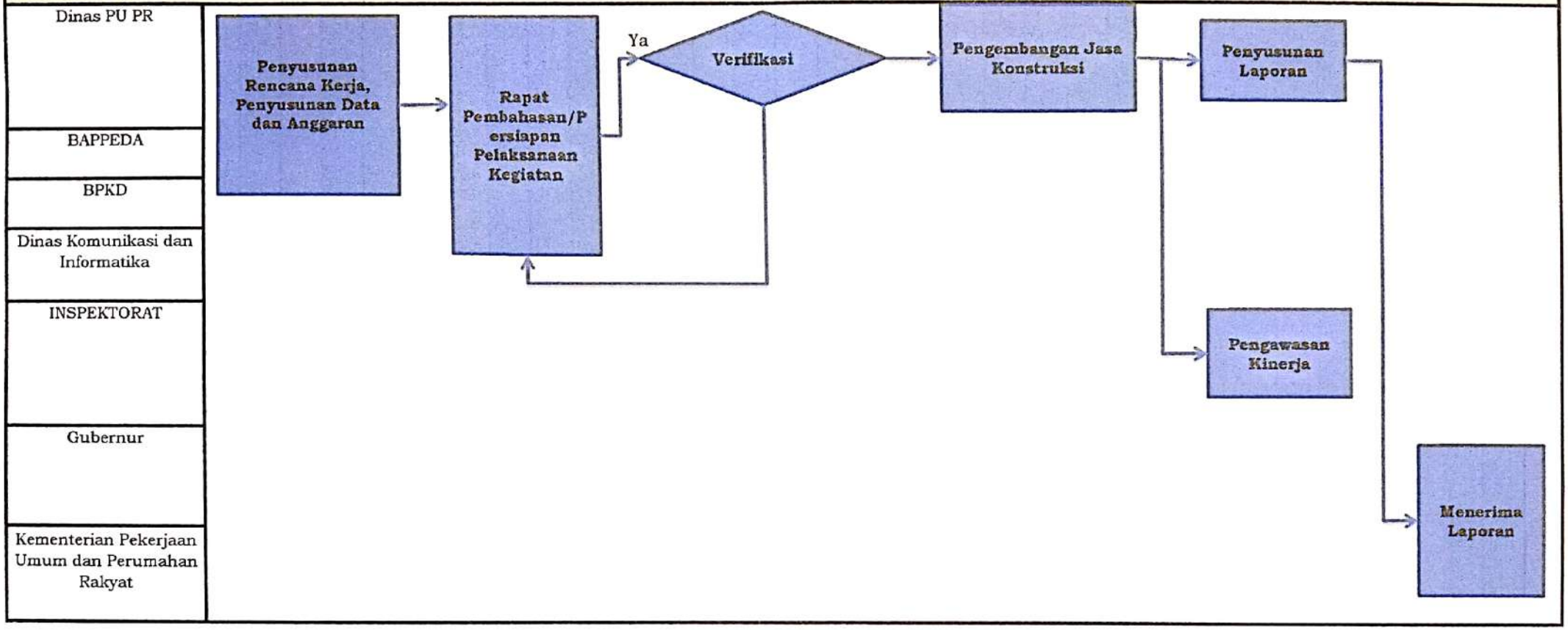
OPD | KABAG HUKUM

Penyelenggaraan jalan
LAMBAR - 01.01



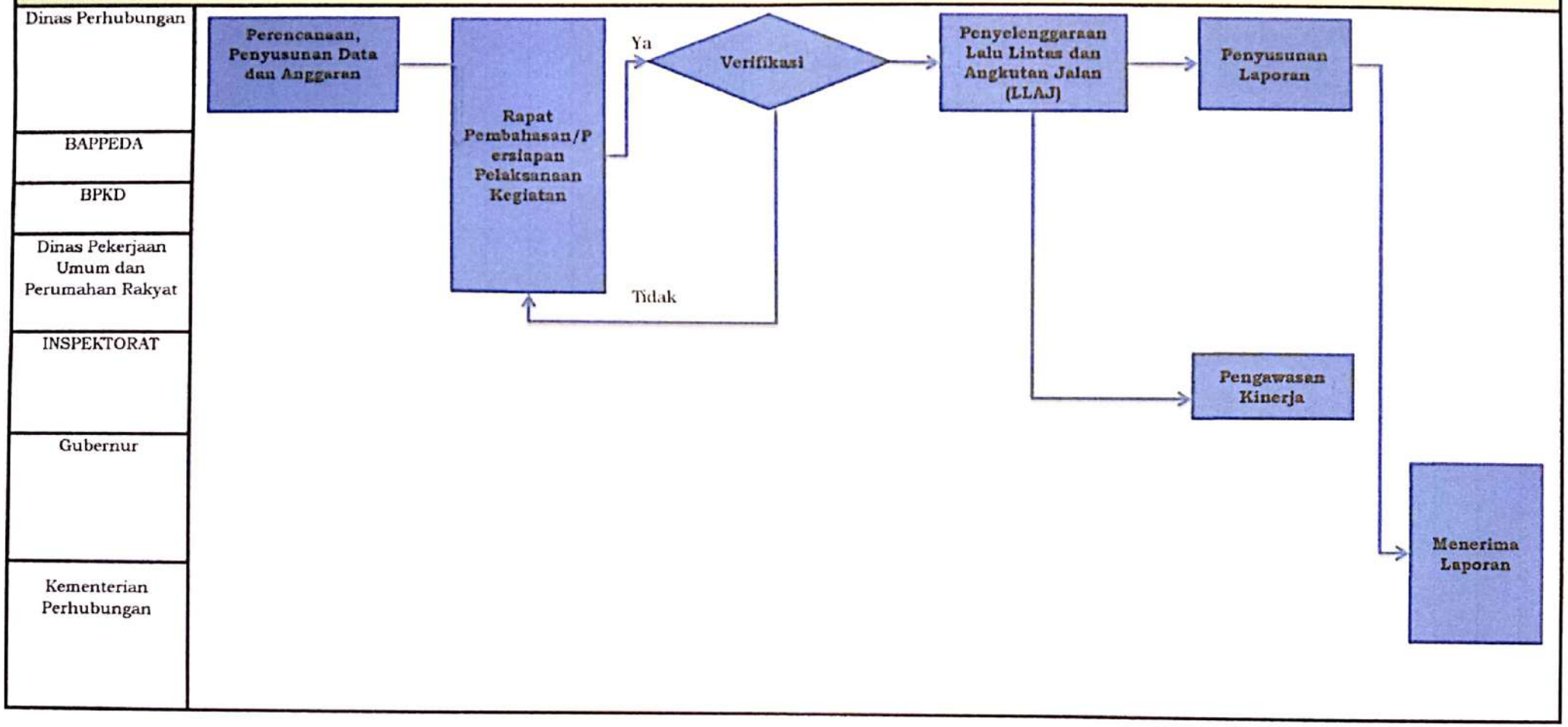
OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan jasa konstruksi
LAMBAR - 01.02



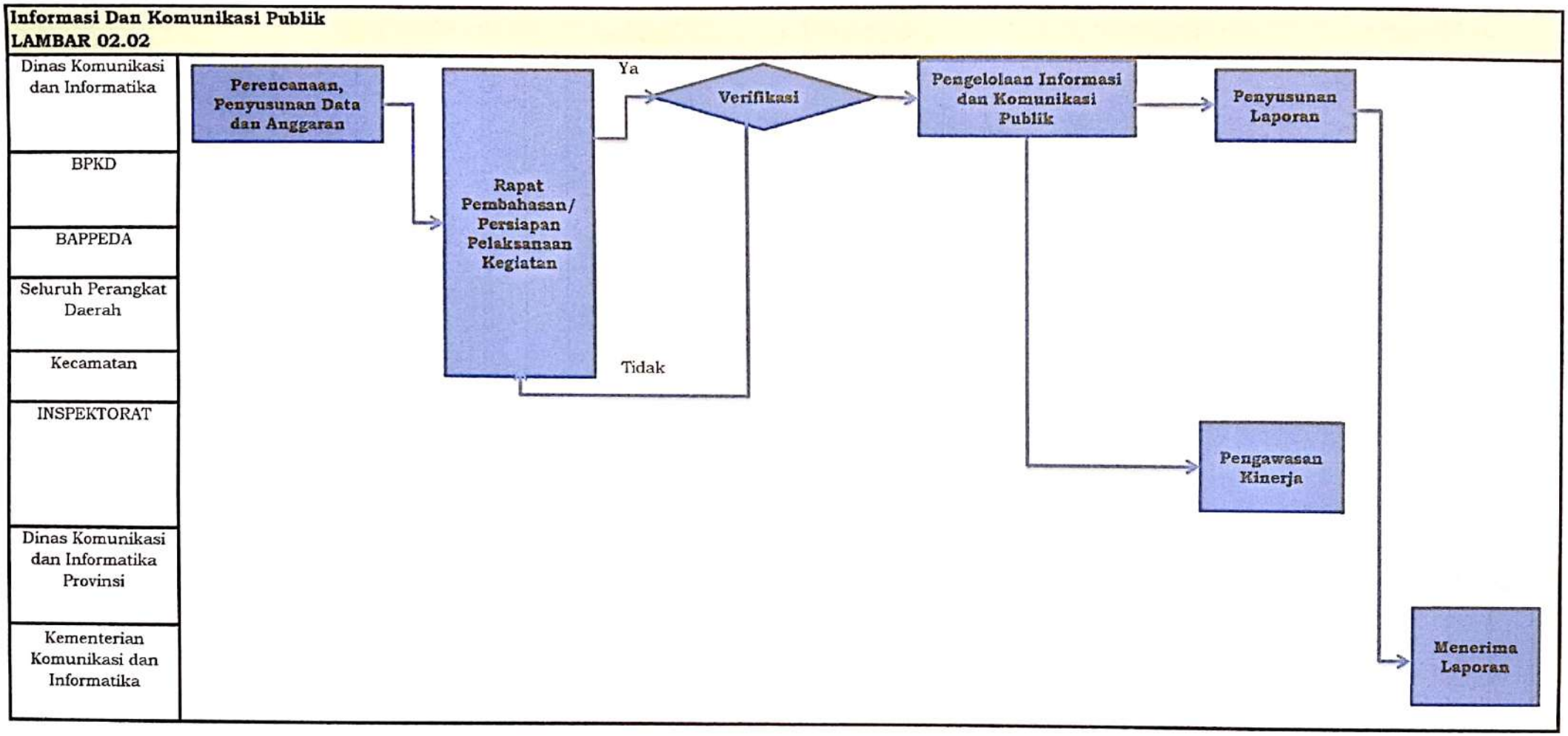
OPD | KABAG HUKUM

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
LAMBAR 02.01



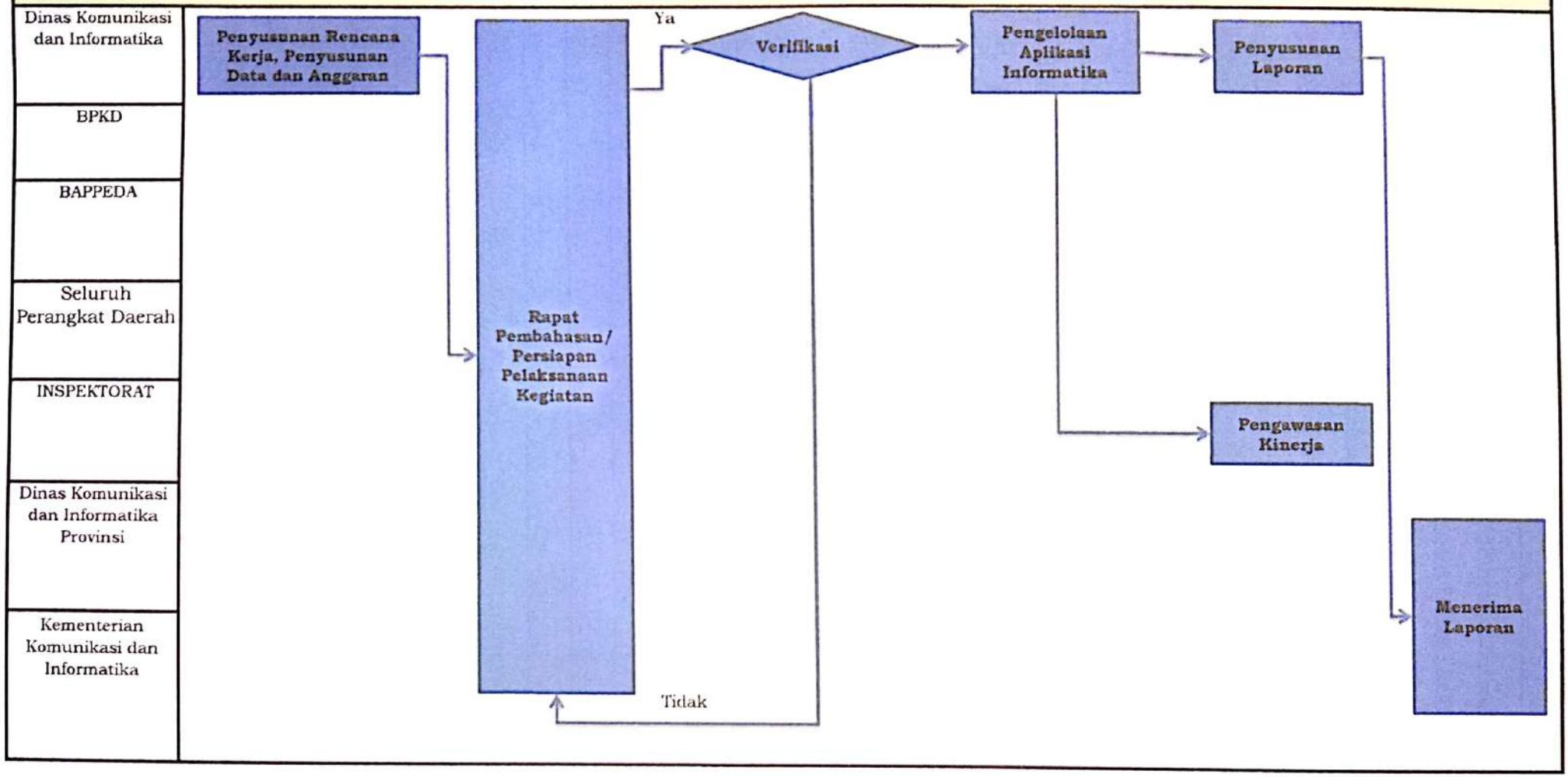
OPD | KABAG HUKUM

Informasi Dan Komunikasi Publik
LAMBAR 02.02



OPD | KABAG HUKUM

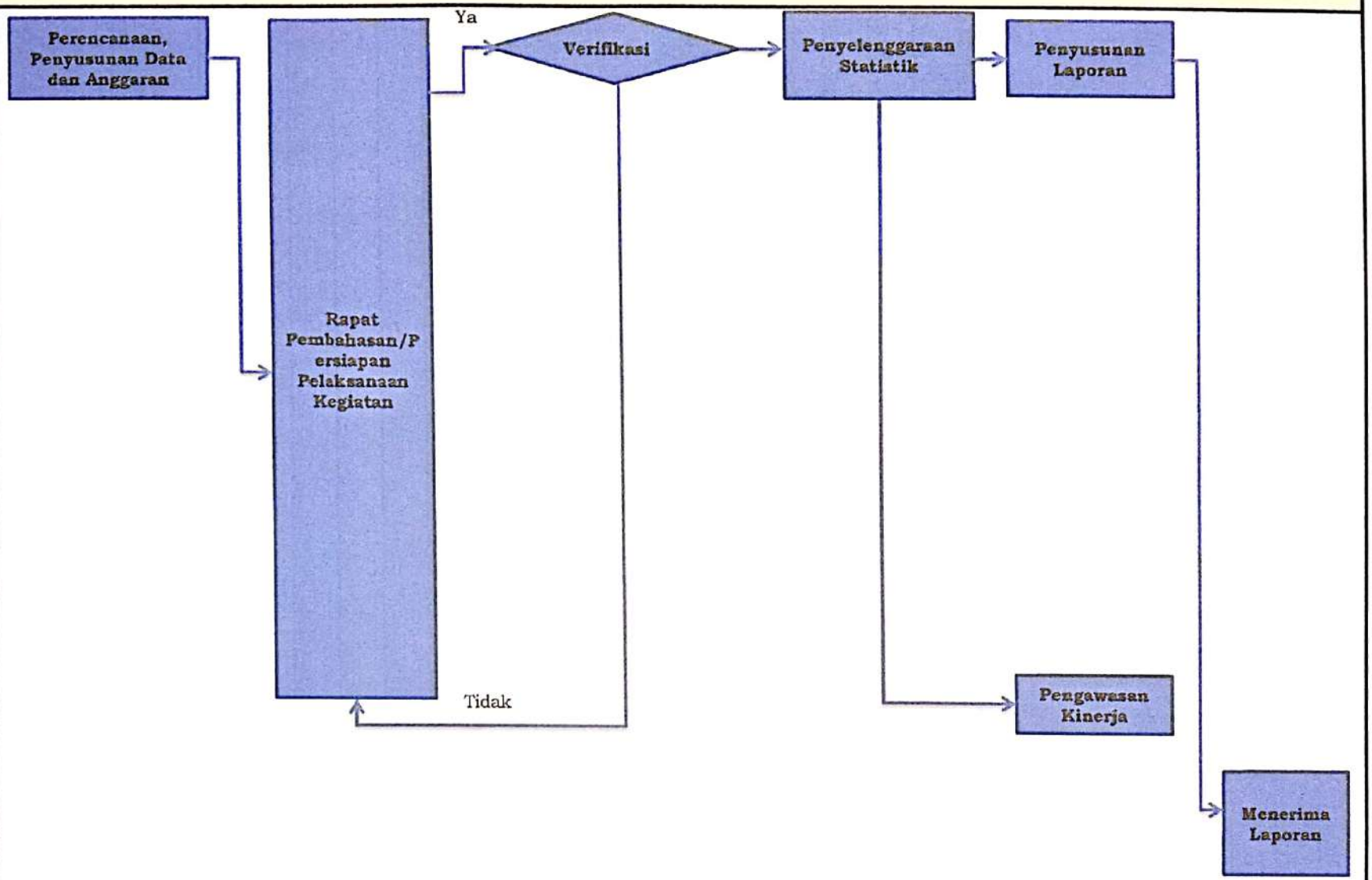
Aplikasi Informatika
LAMBAR 02.03



OPD | KABAG HUKUM

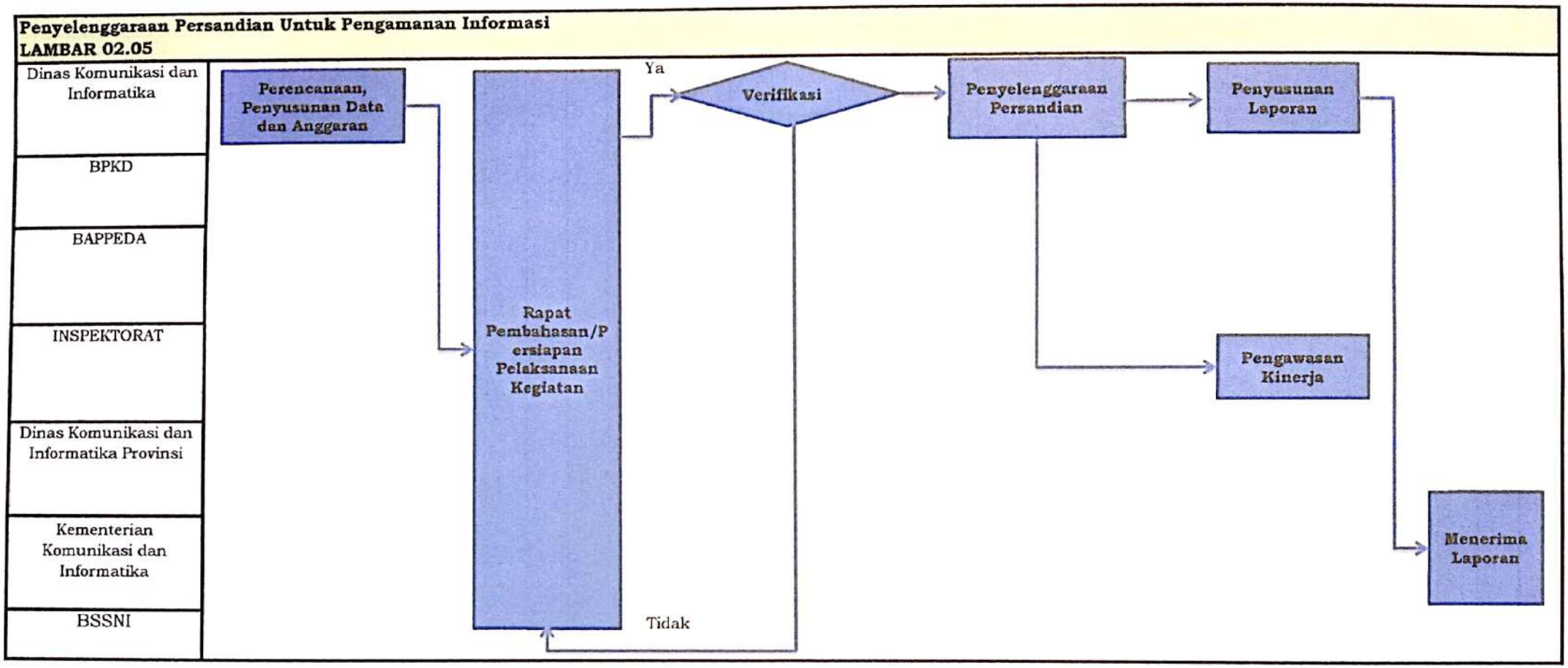
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
LAMBAR 02.04

Dinas Komunikasi dan Informatika
BPKD
BAPPEDA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Kesehatan
Dinas PM dan PTSP
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
INSPEKTORAT
Gubernur
Kementerian Komunikasi dan Informatika



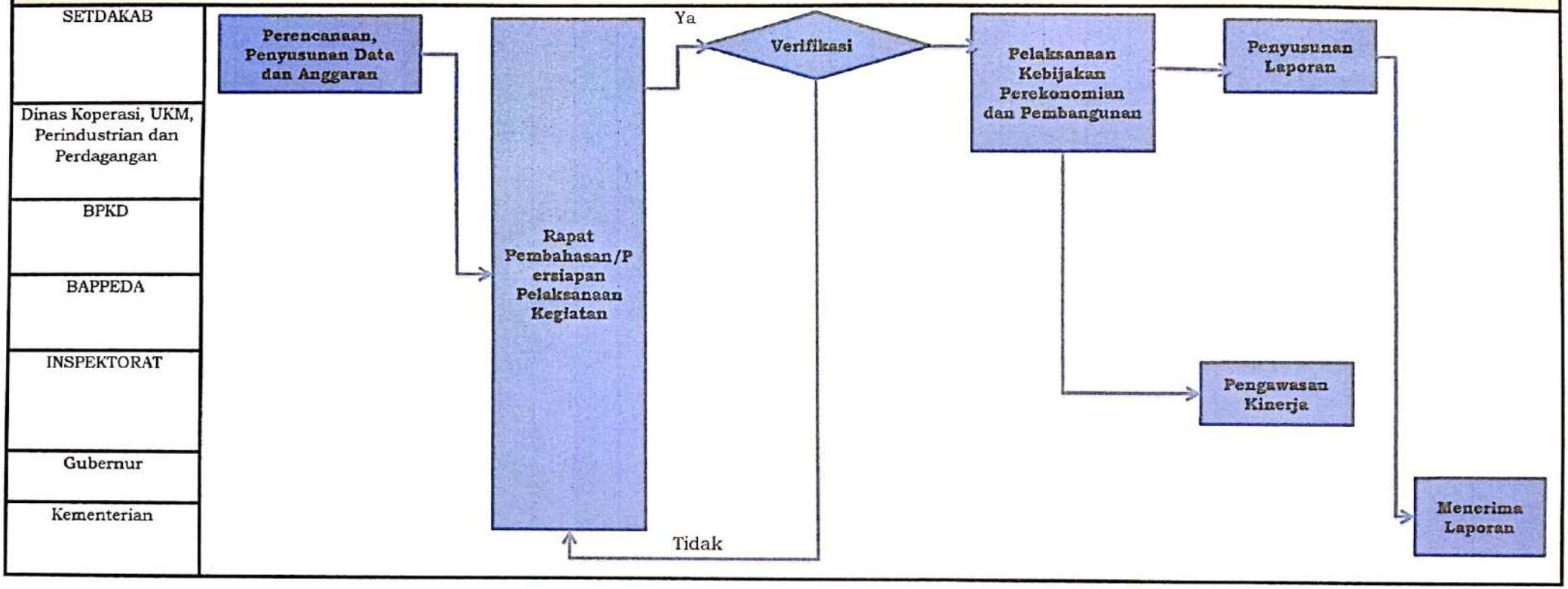
OPD | KABAG HUKUM

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
LAMBAR 02.05



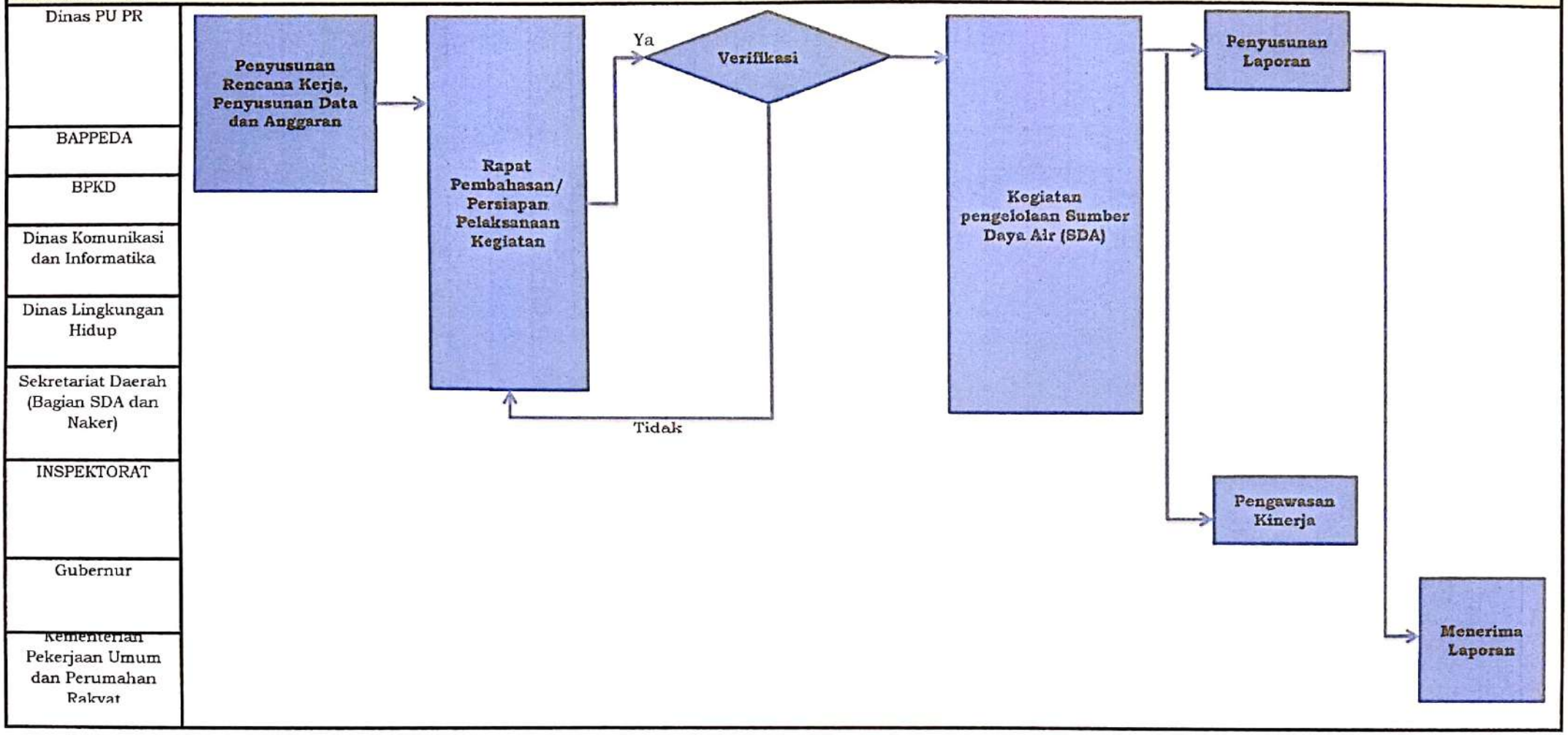
OPD BAG HUKUM

Perekonomian dan Pembangunan
LAMBAR 02.06



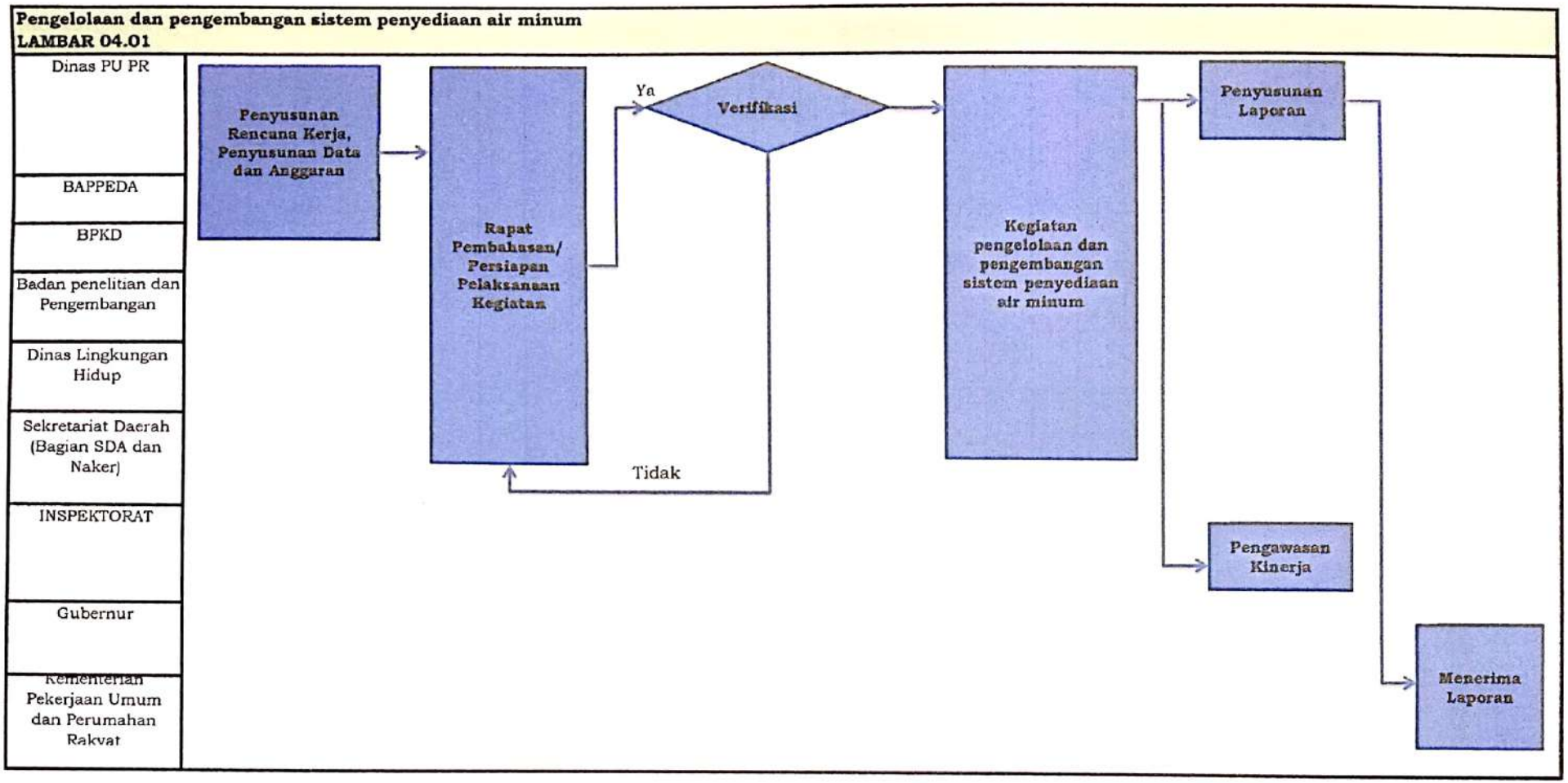
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan sumber daya air (sda)
LAMBAR 03.01



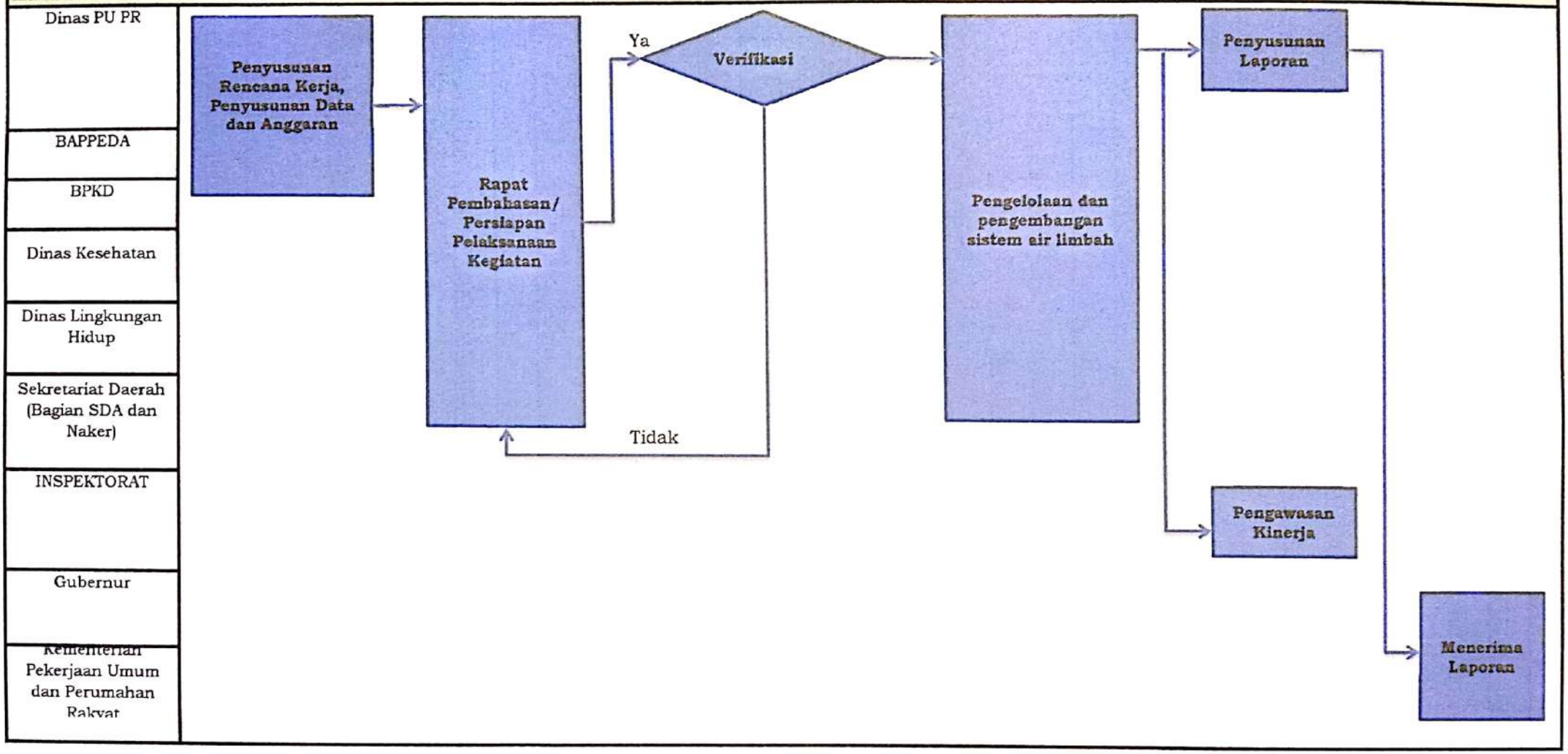
OPD KABAG HUKUM

Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
LAMBAR 04.01



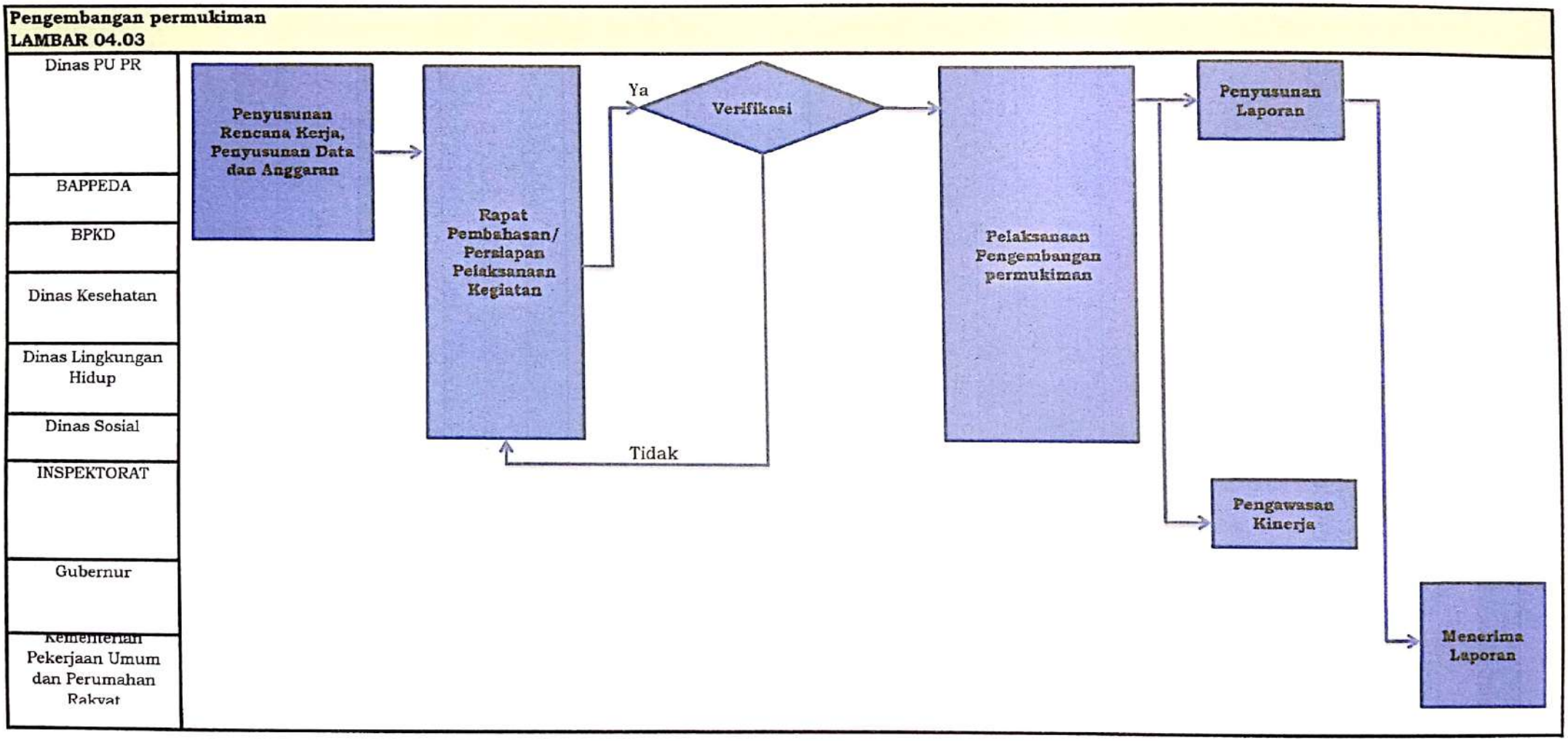
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
LAMBAR - 04.02



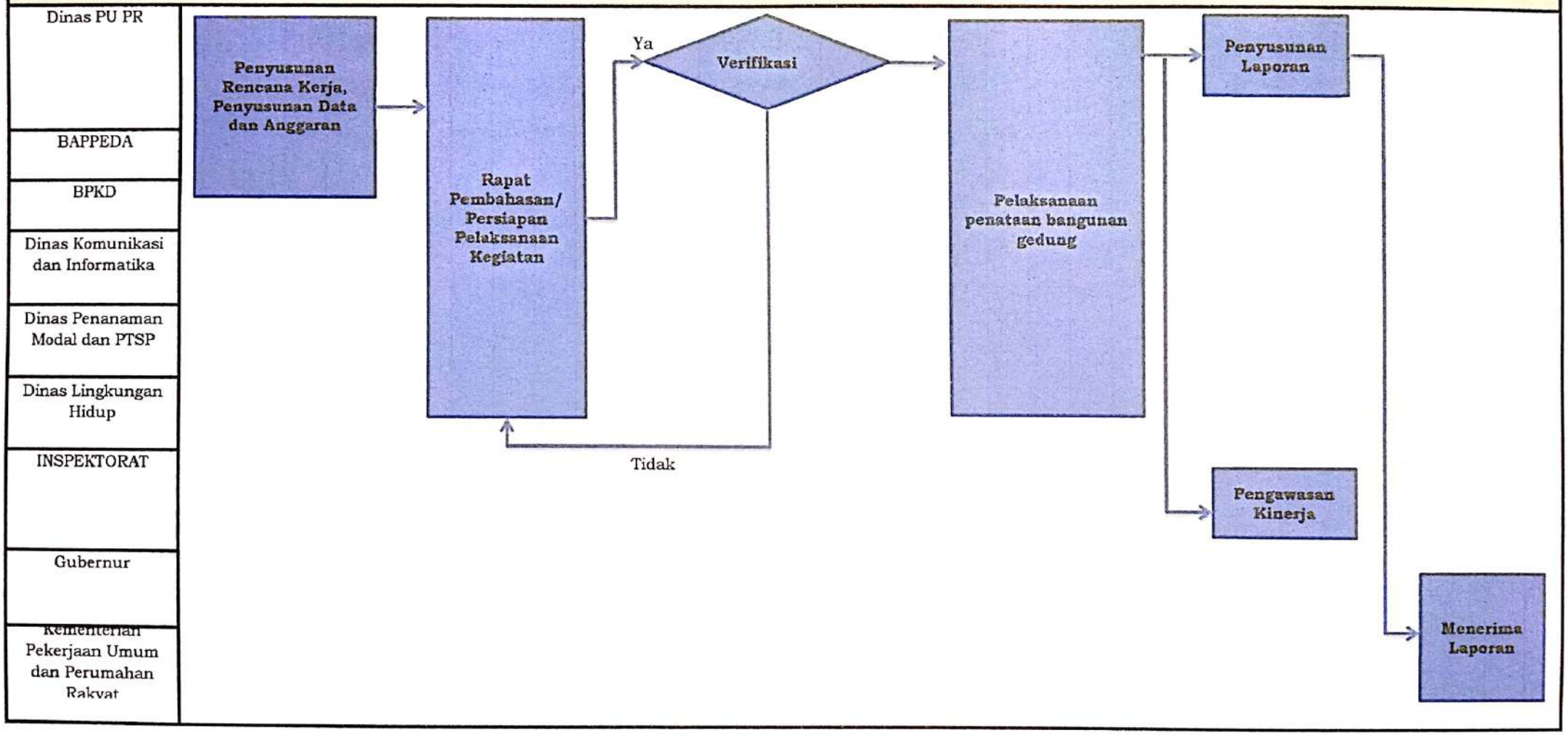
OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan permukiman
LAMBAR 04.03



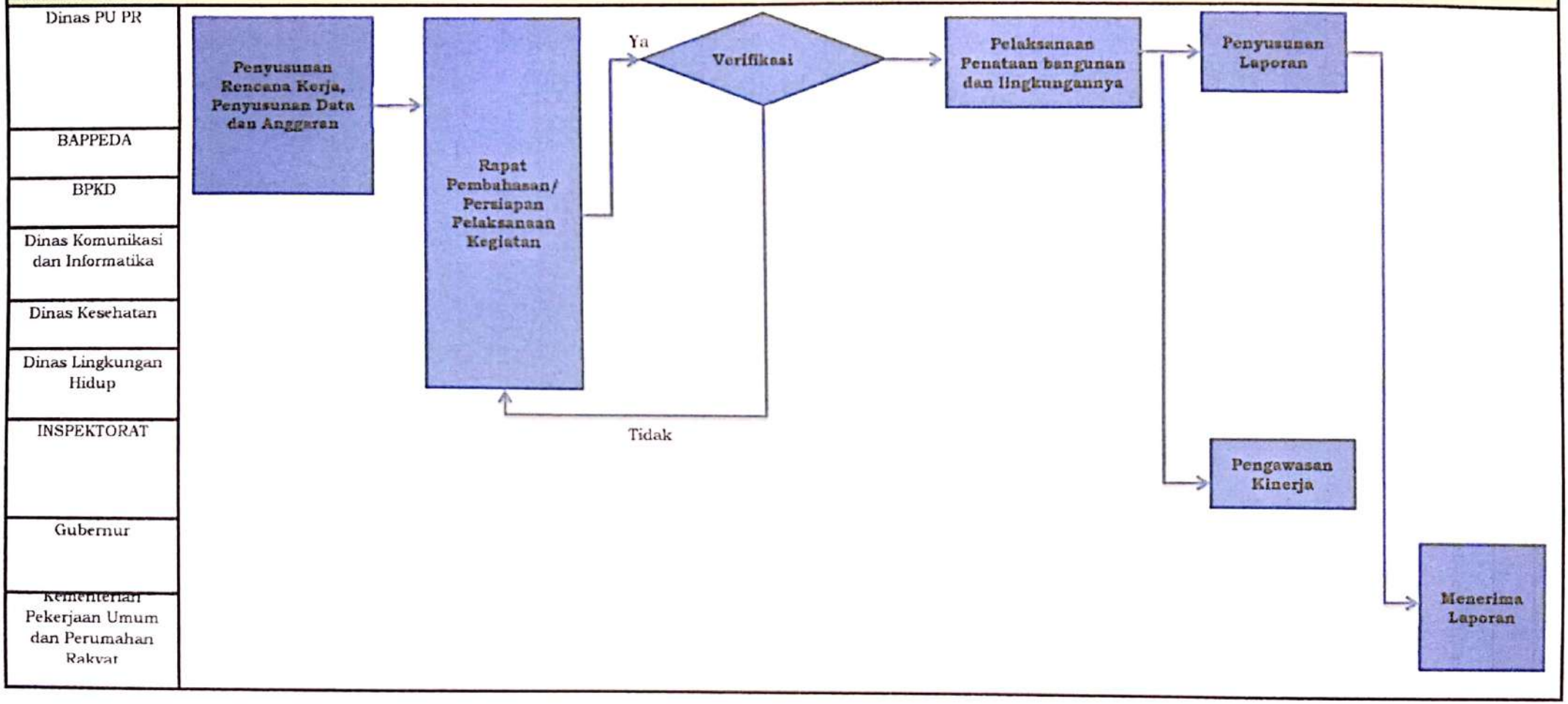
OPD | KABAG HUKUM

Penataan bangunan gedung
LAMBAR 04.04



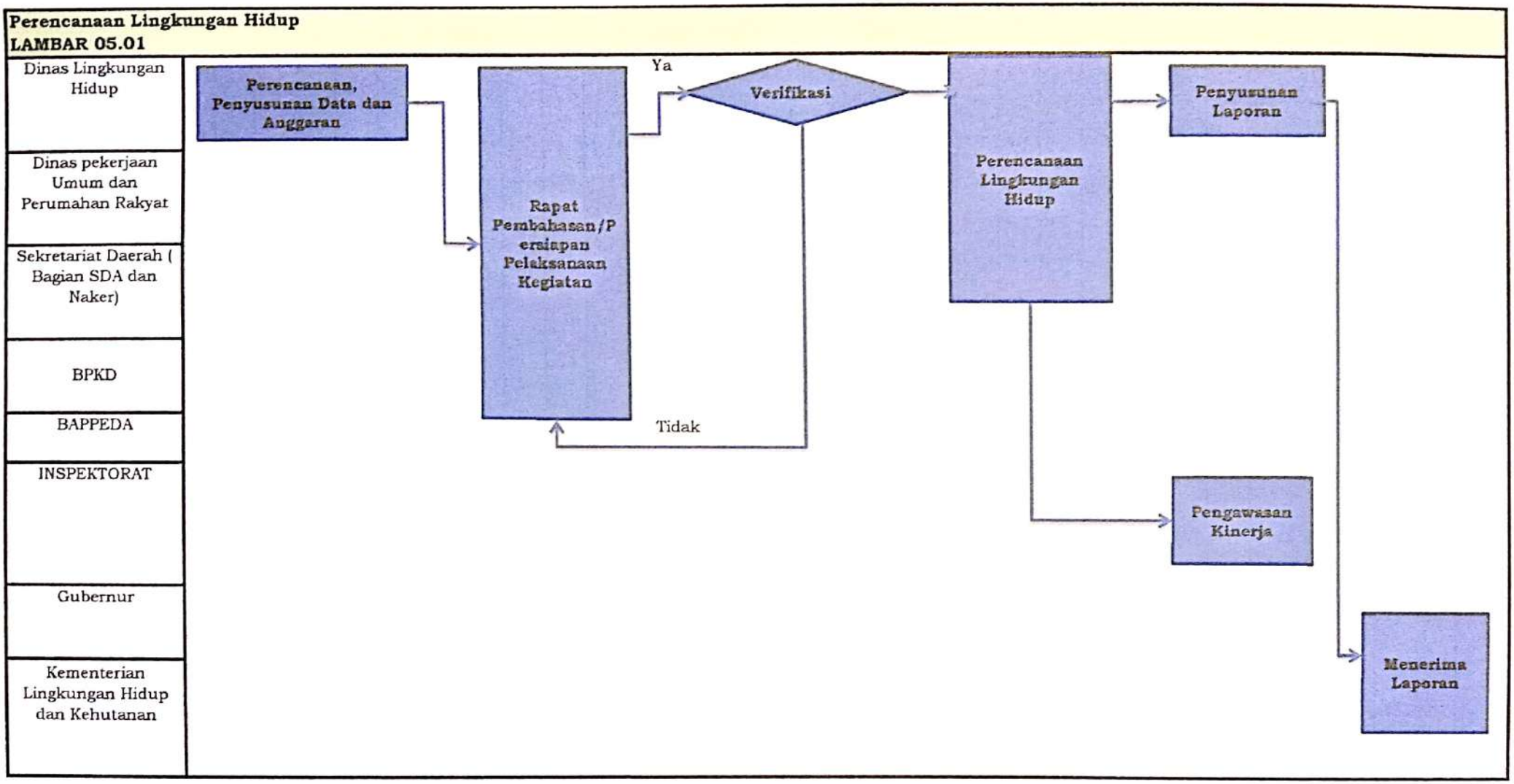
OPD | KABAG HUKUM

Penataan bangunan dan lingkungannya
LAMBAR 04.05



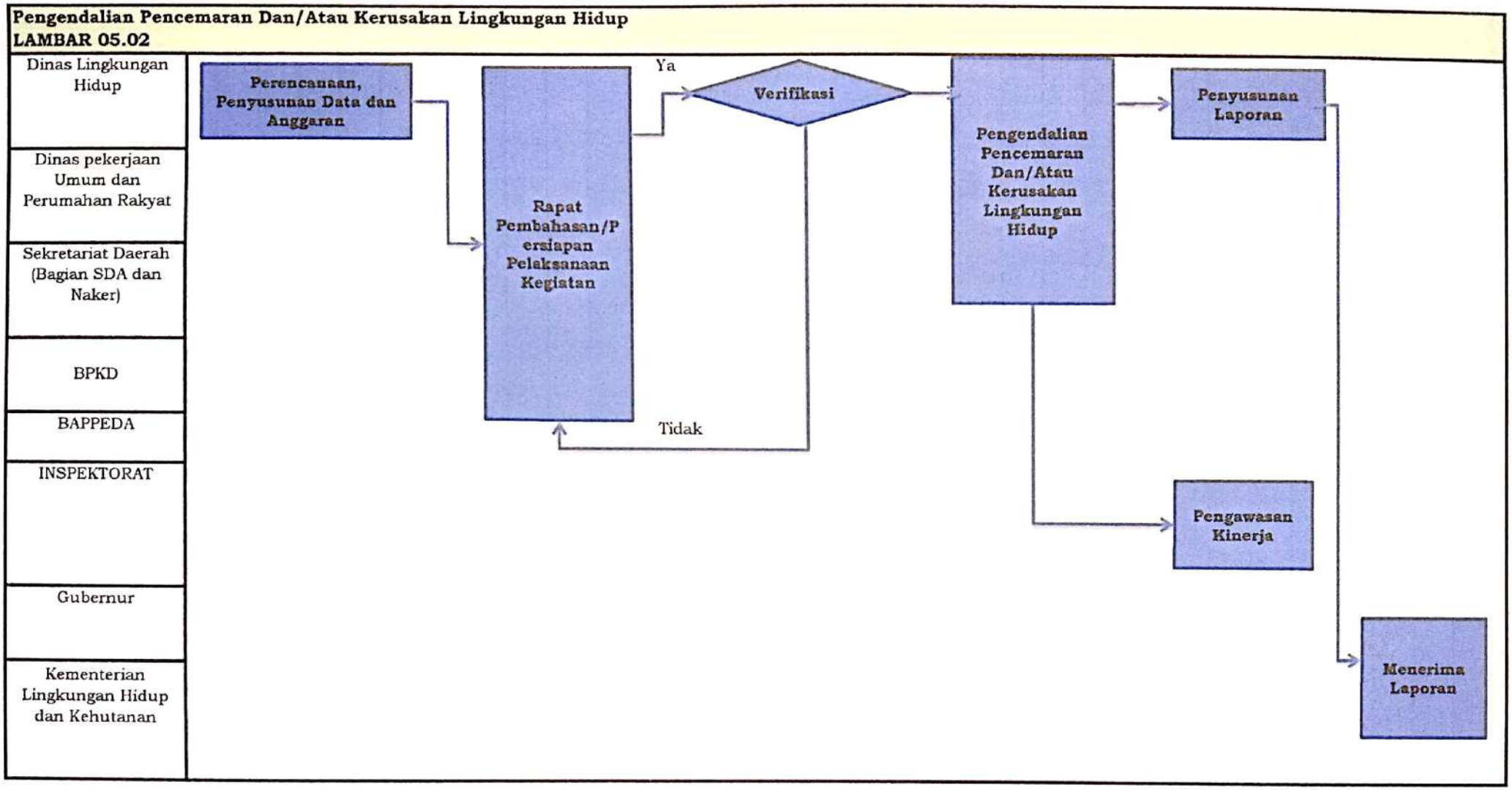
OPD | KABAG HUKUM

Perencanaan Lingkungan Hidup
LAMBAR 05.01



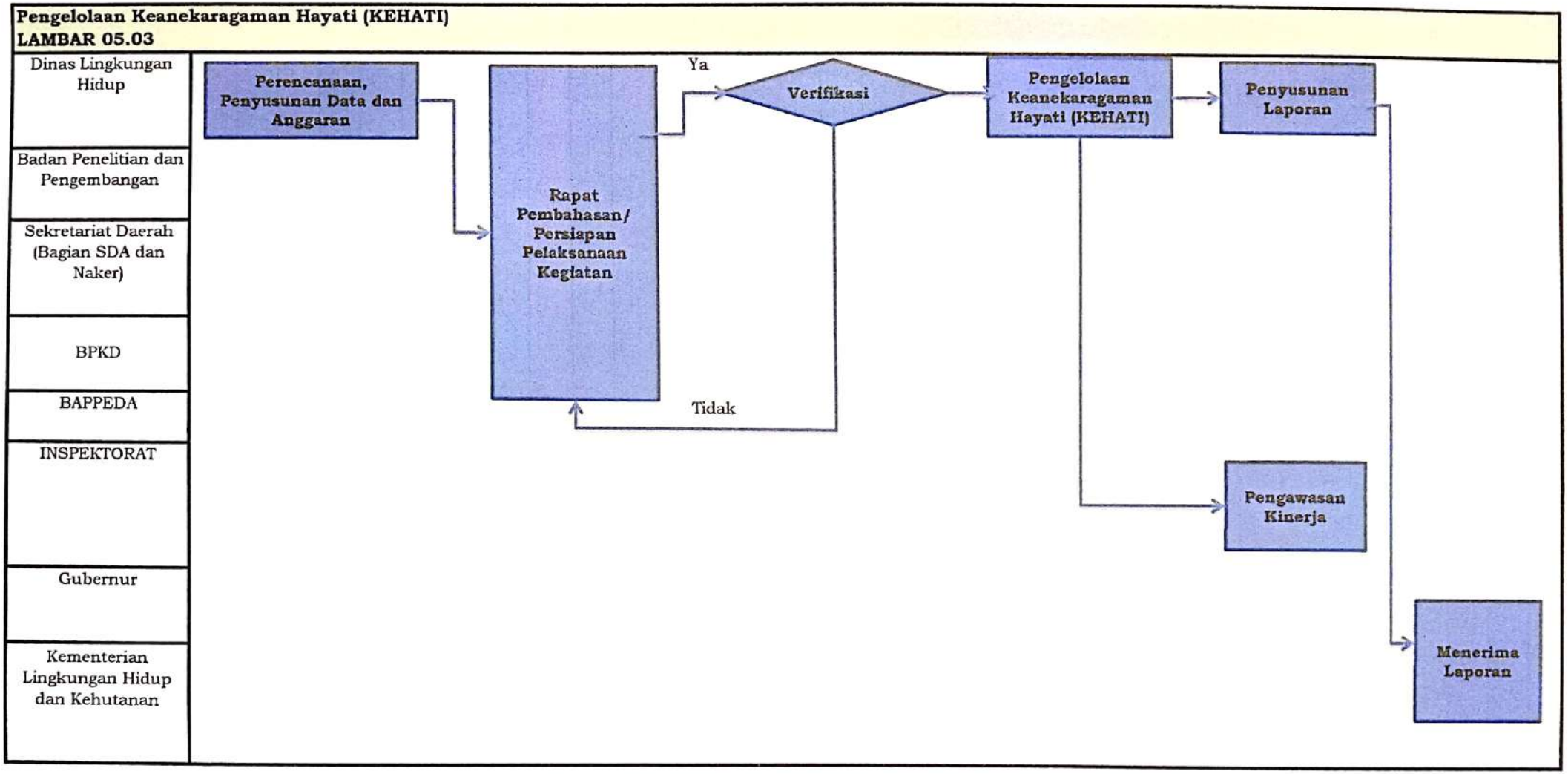
OPD | KABAG HUKUM

Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
LAMBAR 05.02



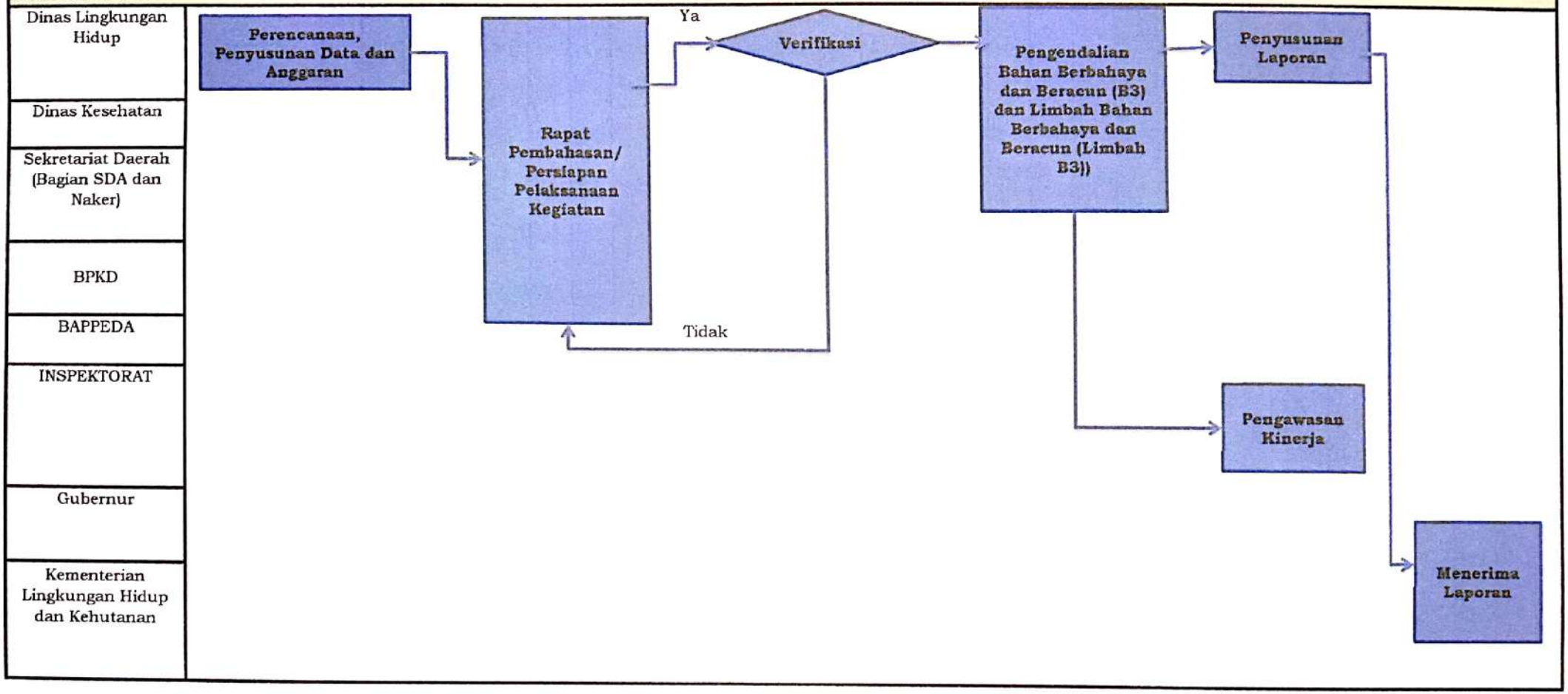
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
LAMBAR 05.03



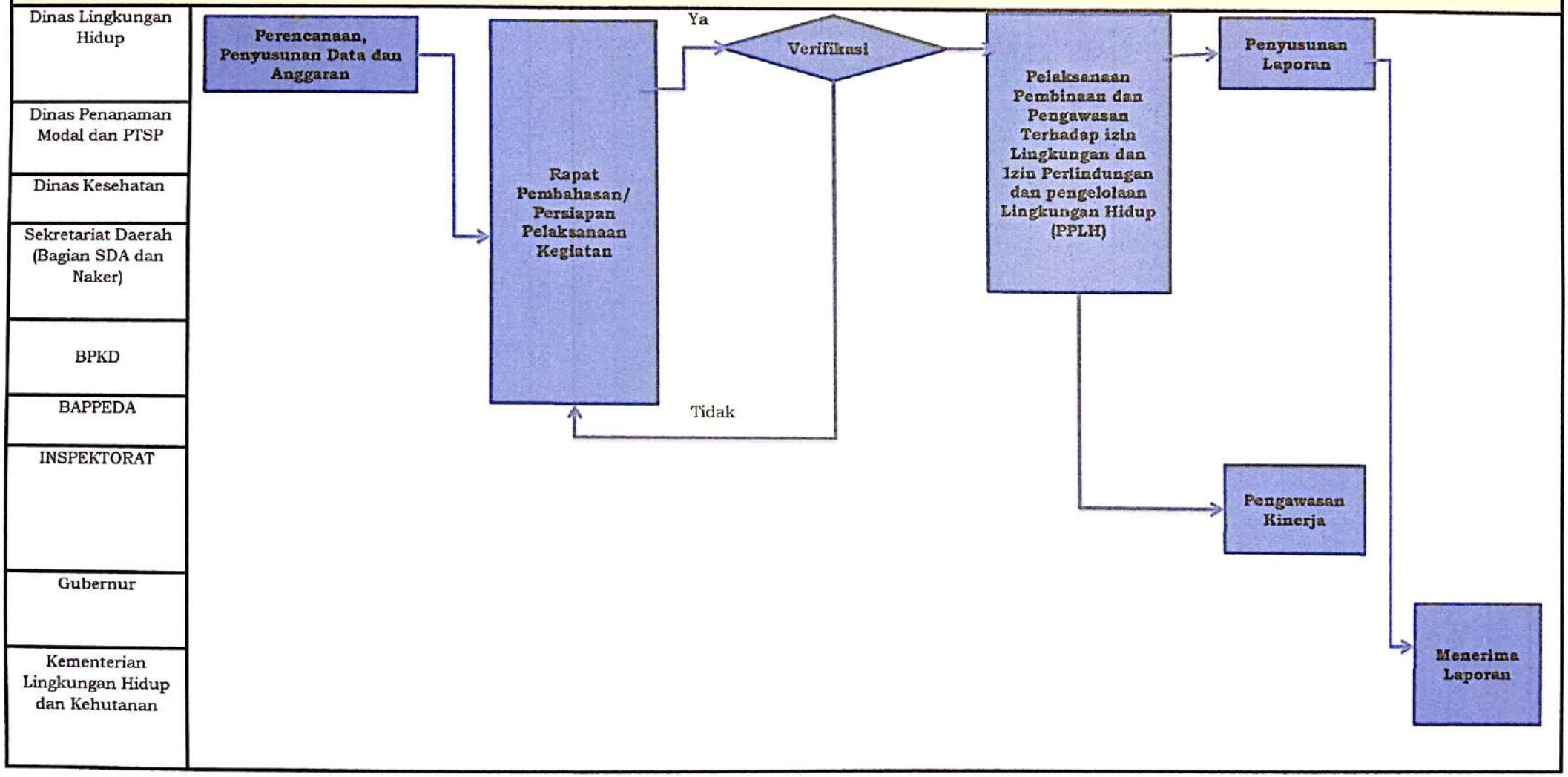
OPD | KABAG HUKUM

Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
LAMBAR 05.04



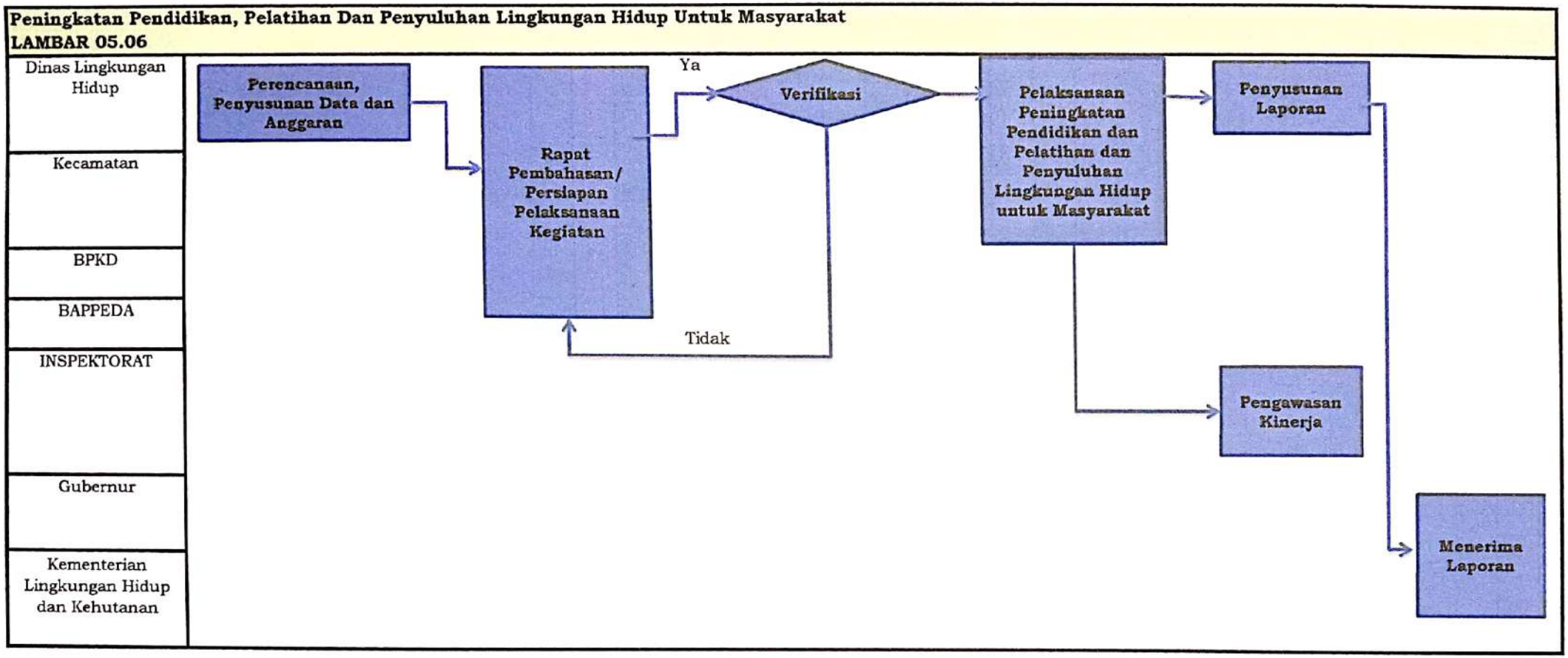
OPD	KABAG HUKUM

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan, dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
LAMBAR 05.05



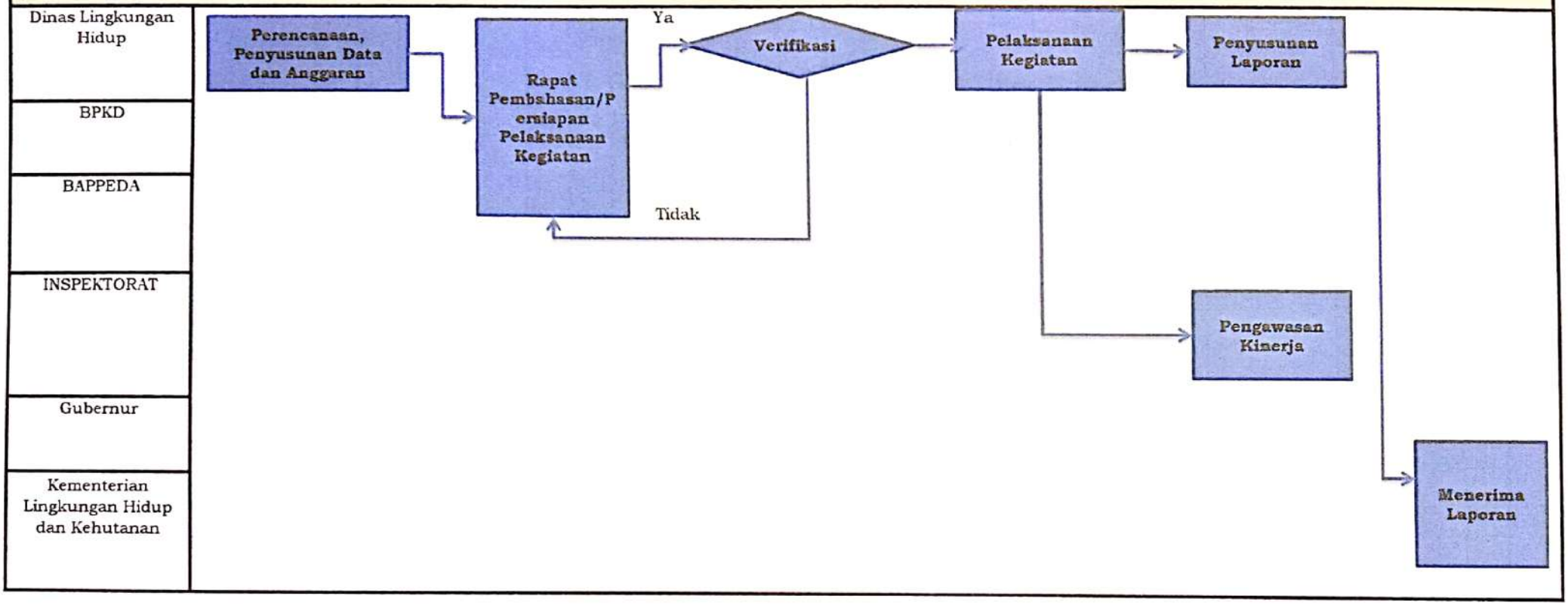
OPD | KABAG HUKUM

Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
LAMBAR 05.06



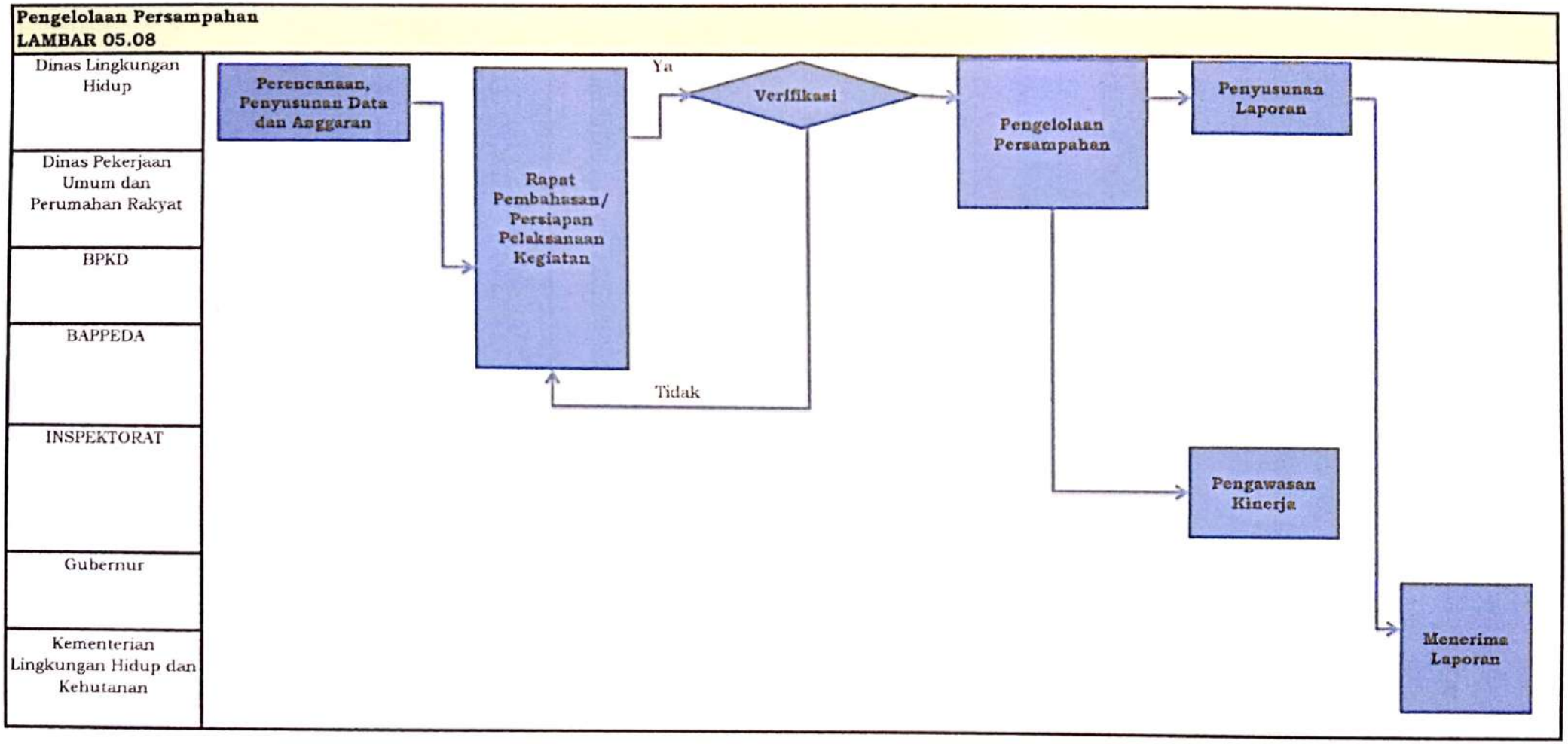
OPD | KABAG HUKUM

Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
LAMBAR 05.07



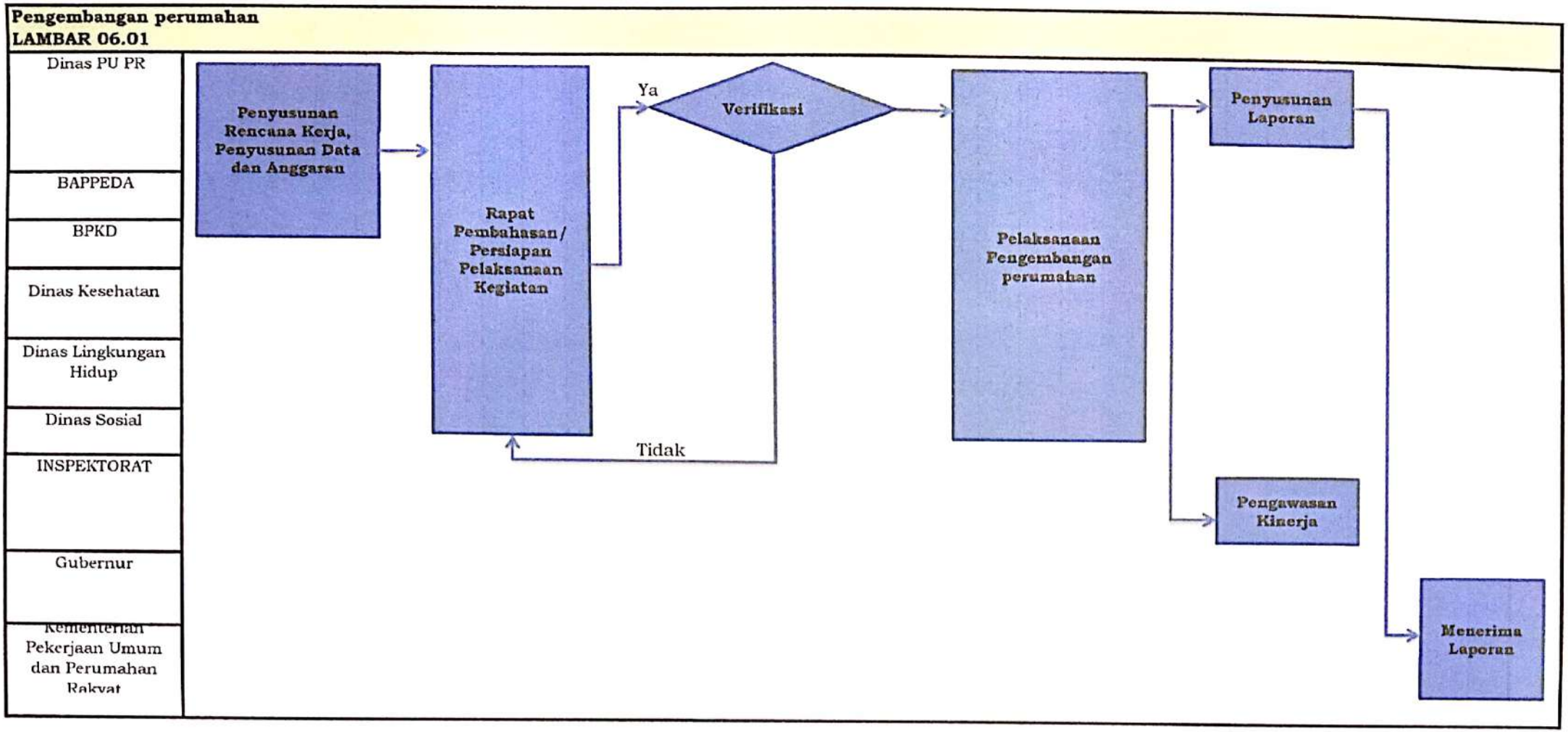
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan Persampahan
LAMBAR 05.08



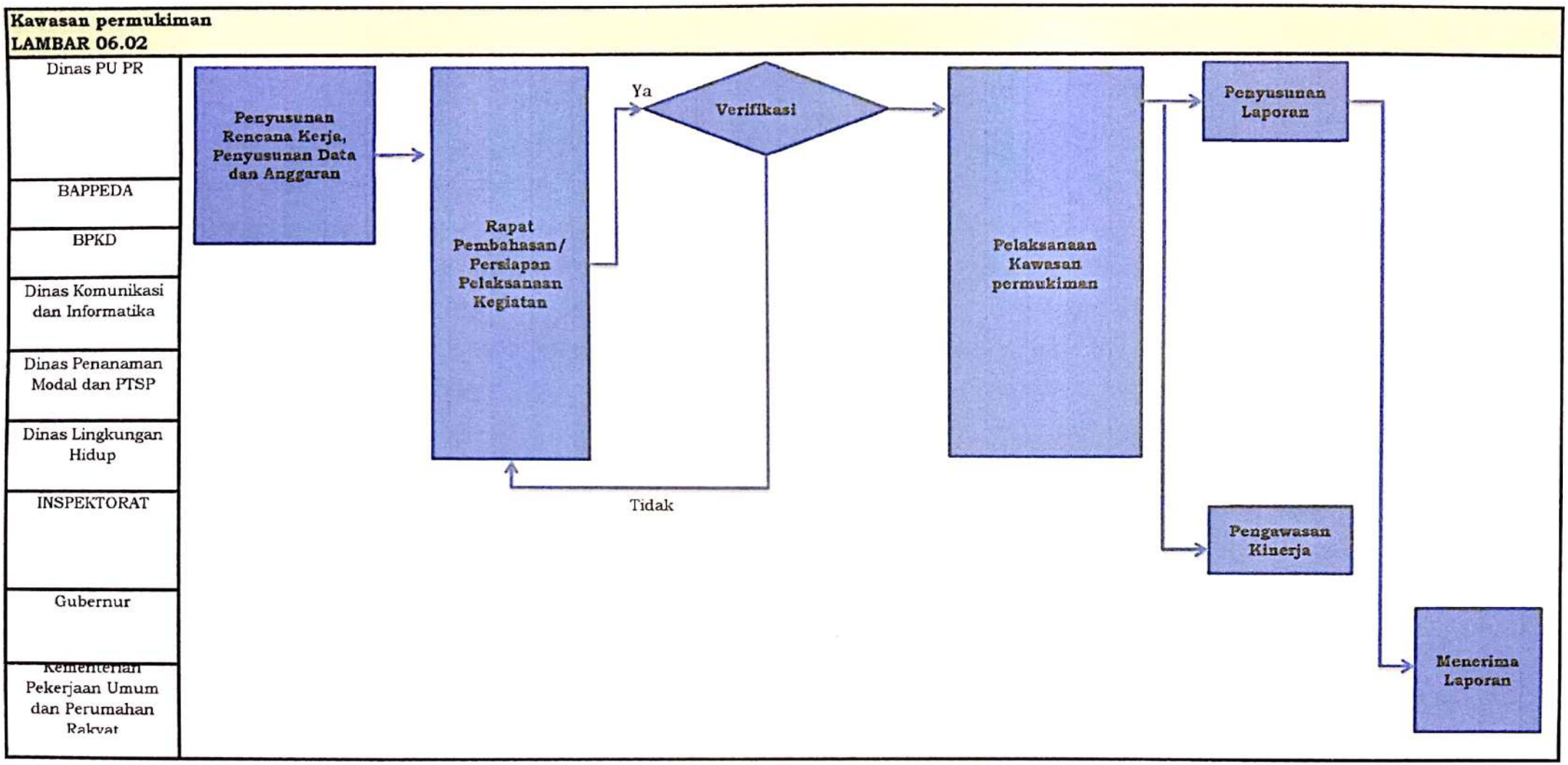
OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan perumahan
LAMBAR 06.01



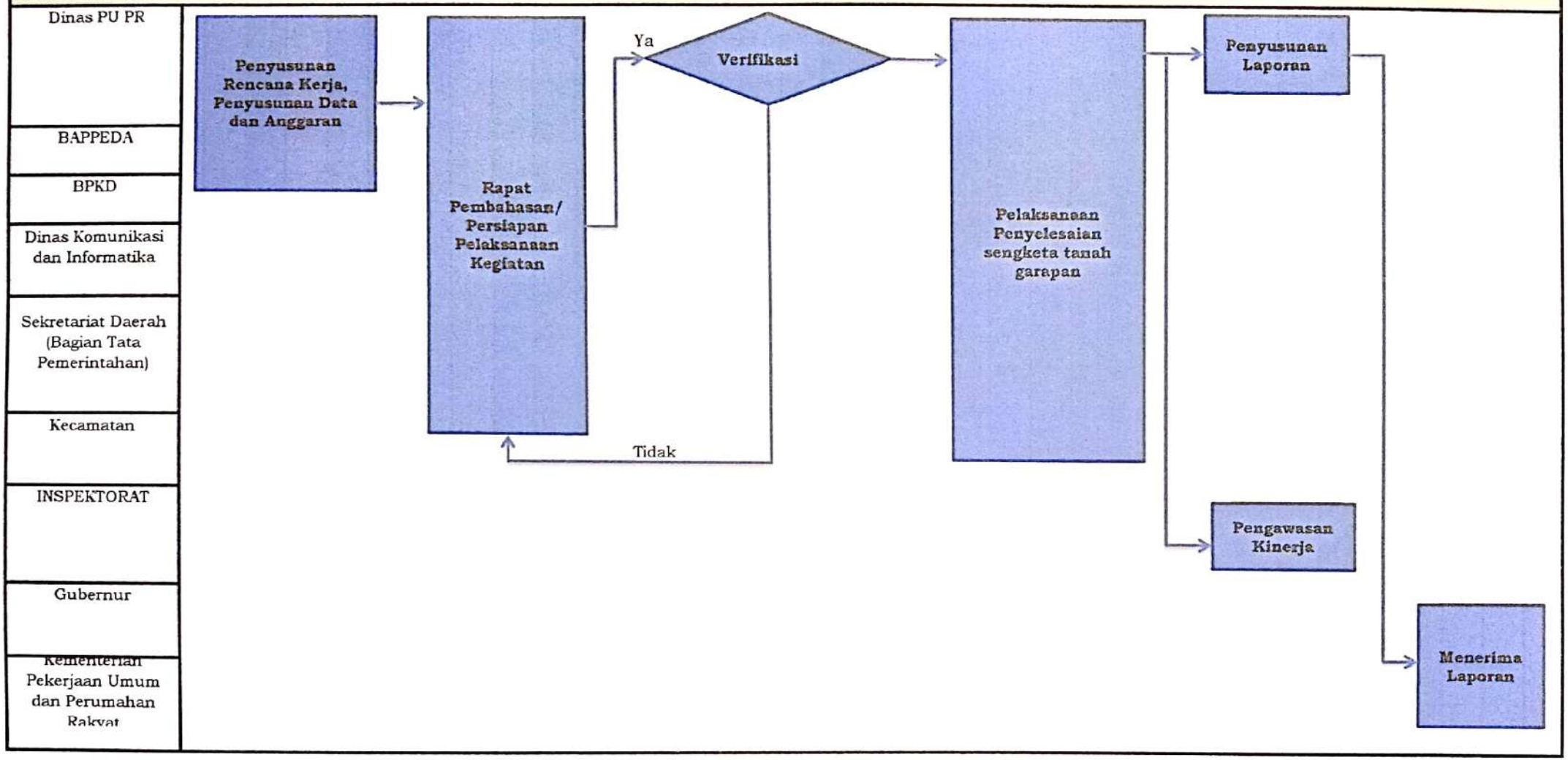
OPD	KABAG HUKUM

Kawasan permukiman
LAMBAR 06.02



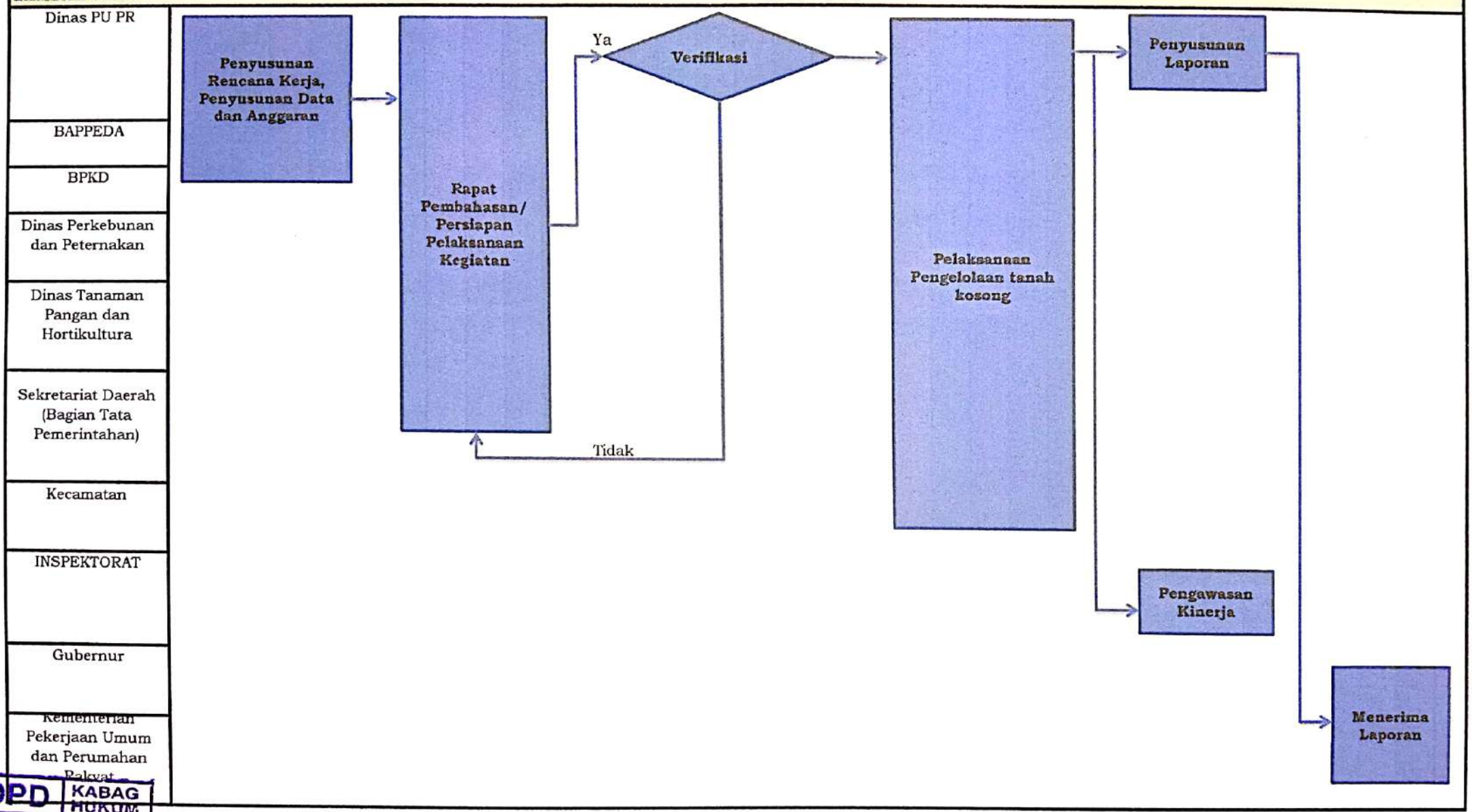
OPD | KABAG HUKUM

Penyelesaian sengketa tanah garapan
LAMBAR 06.03



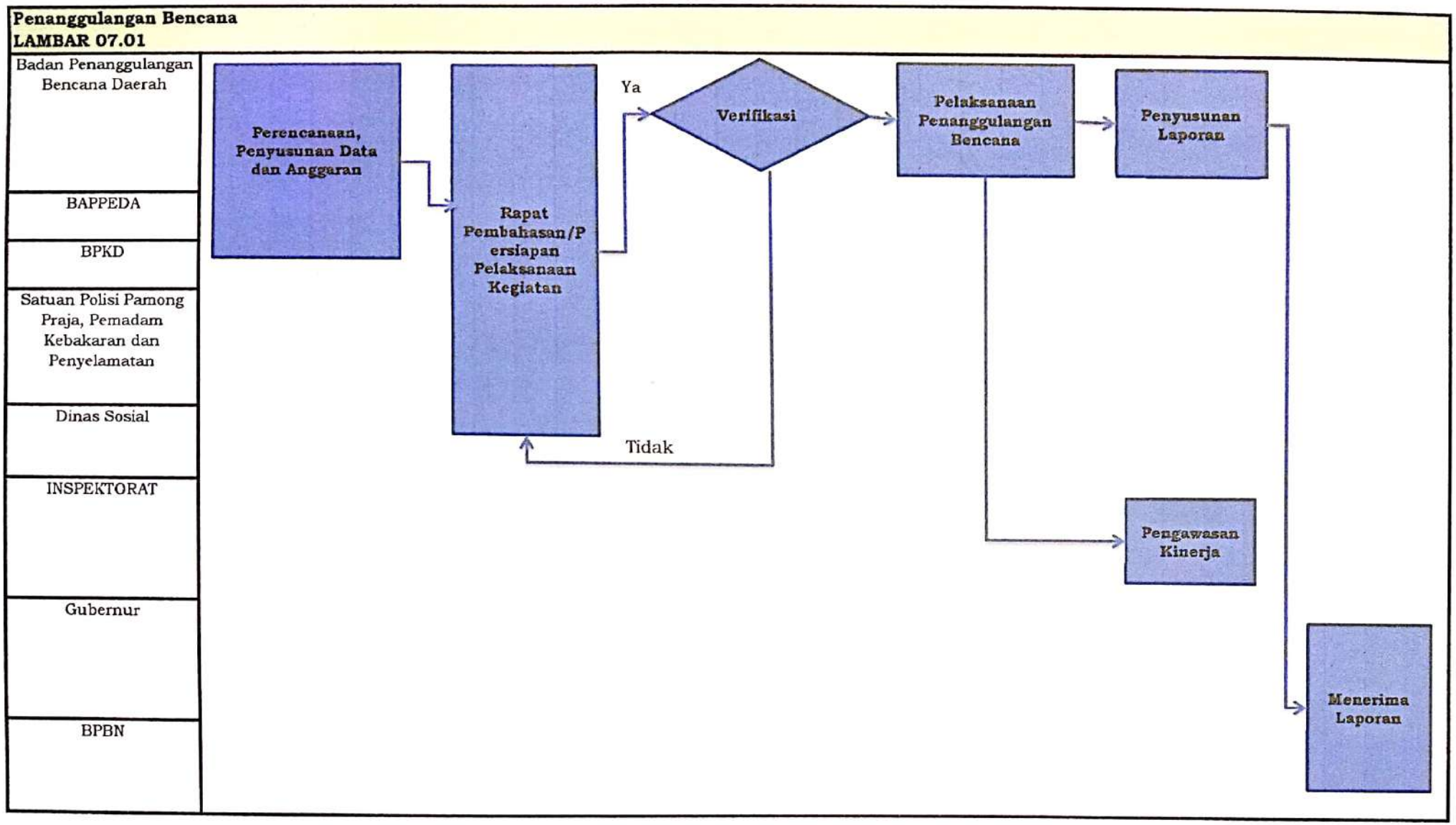
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan tanah kosong
LAMBAR 06.05



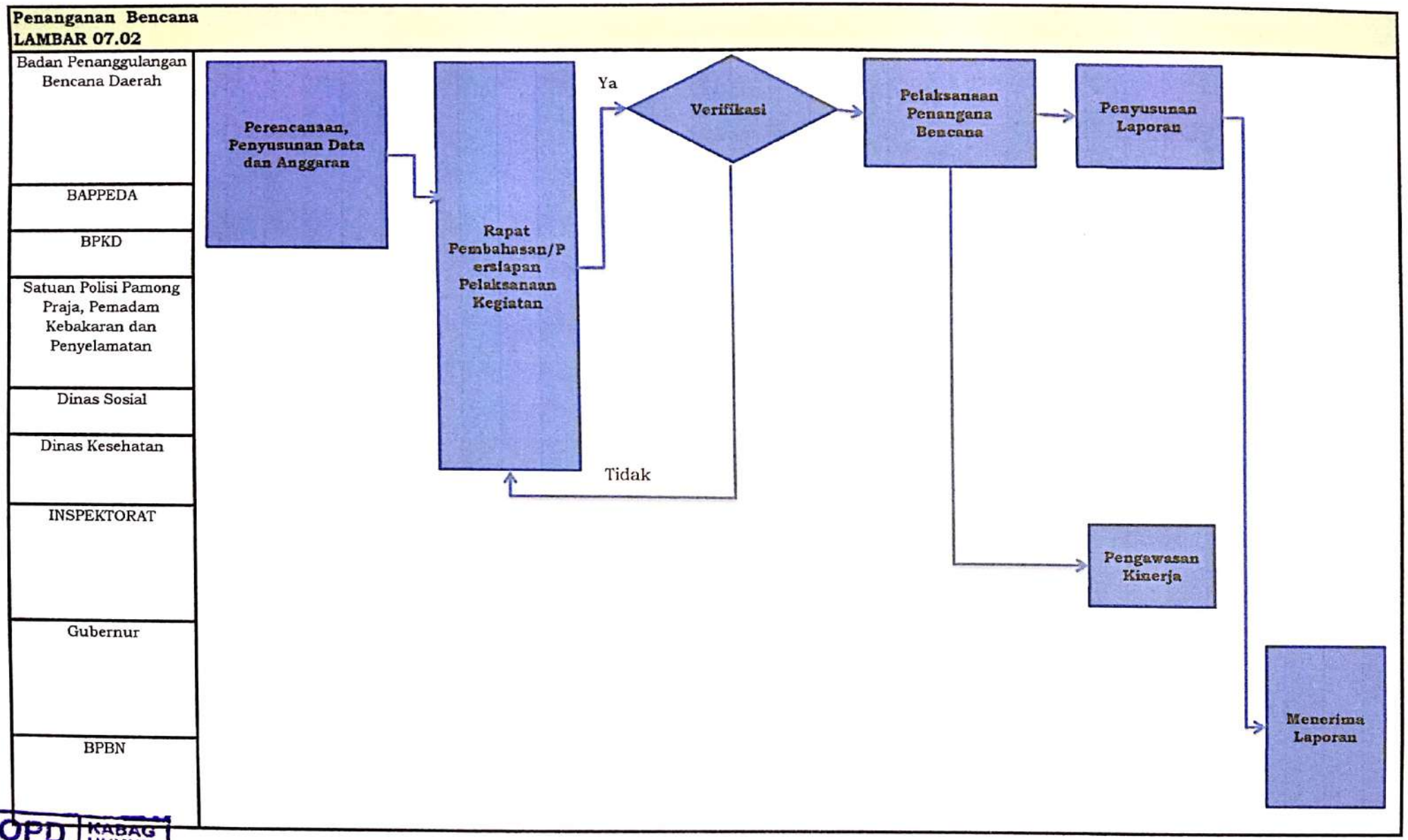
OPD | KABAG HUKUM

Penanggulangan Bencana
LAMBAR 07.01



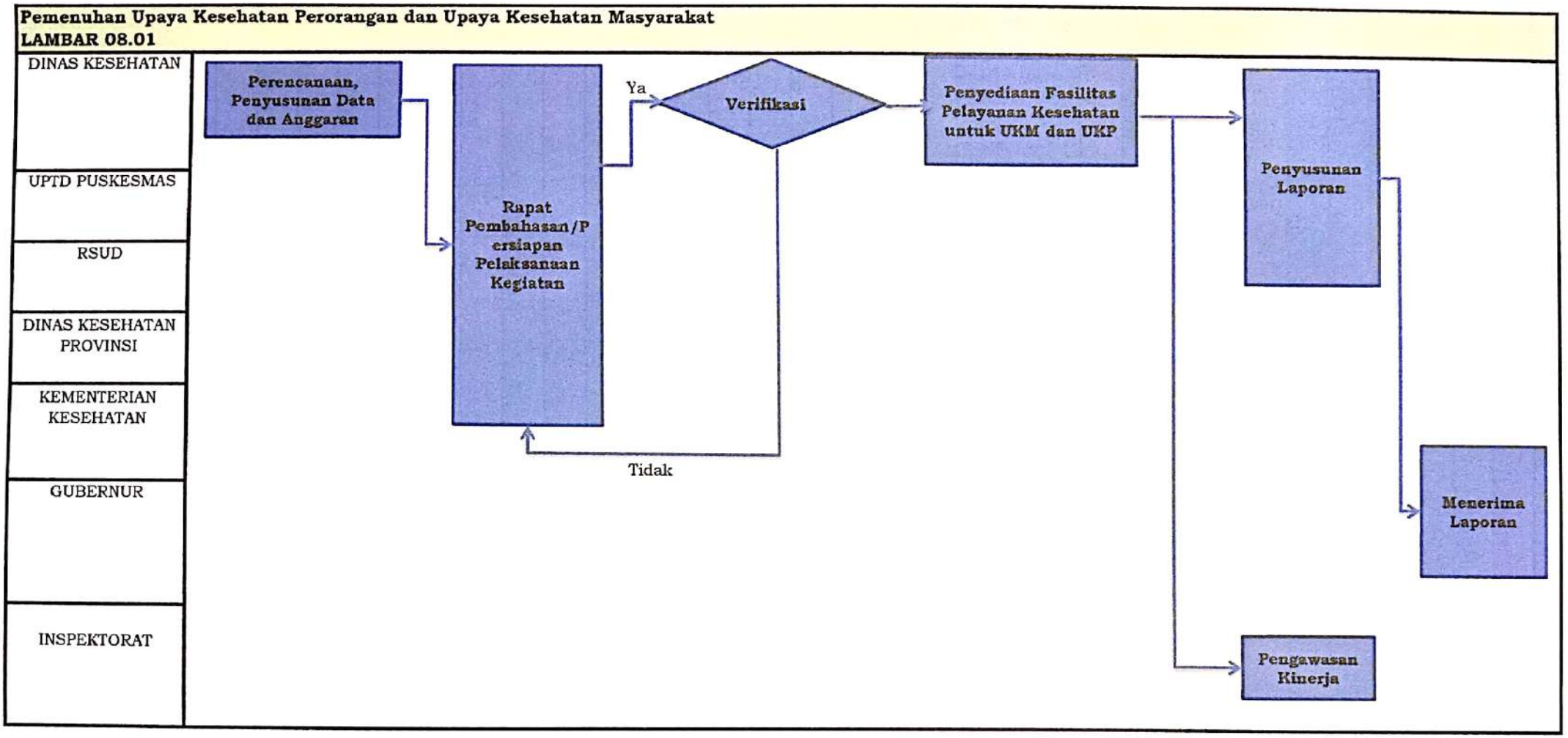
OPD | KABAG HUKUM

Penanganan Bencana
LAMBAR 07.02



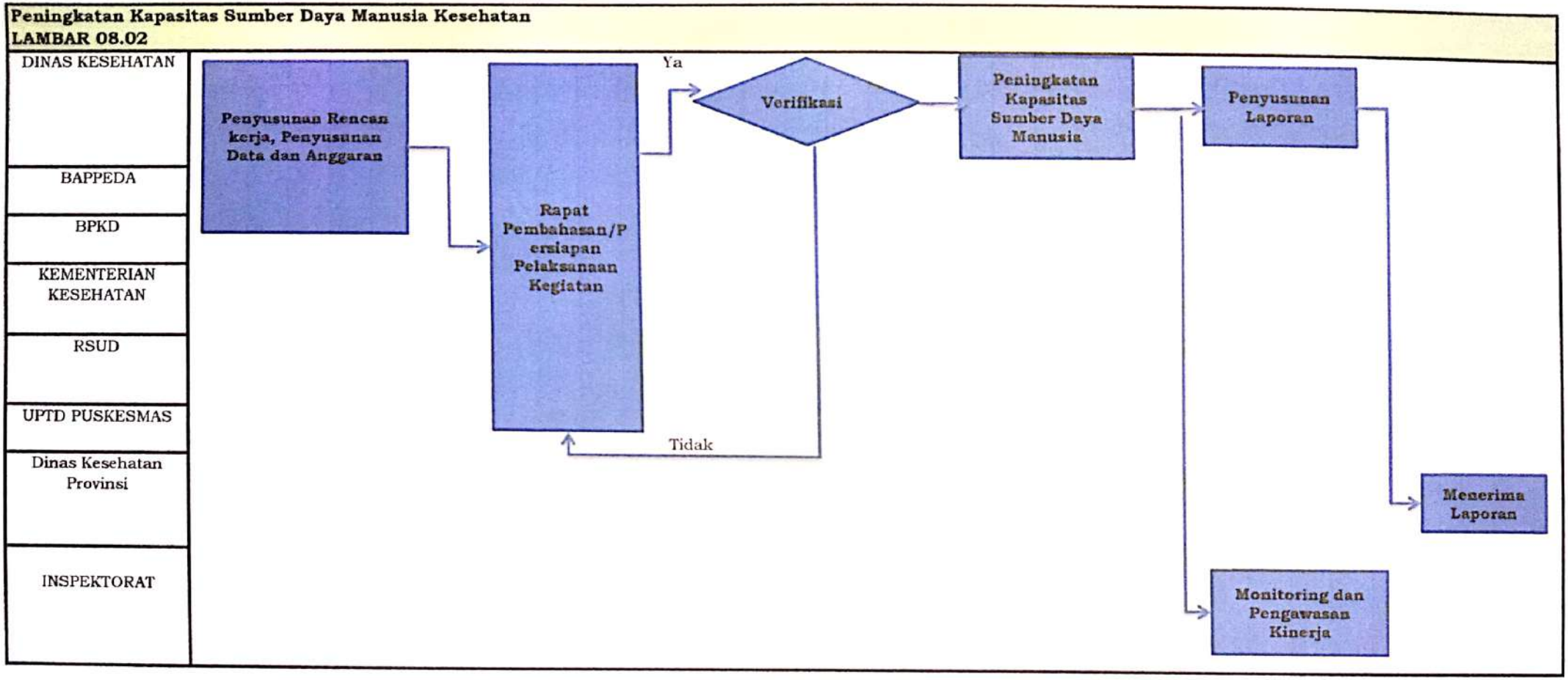
OPD | KABAG HUKUM

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
LAMBAR 08.01



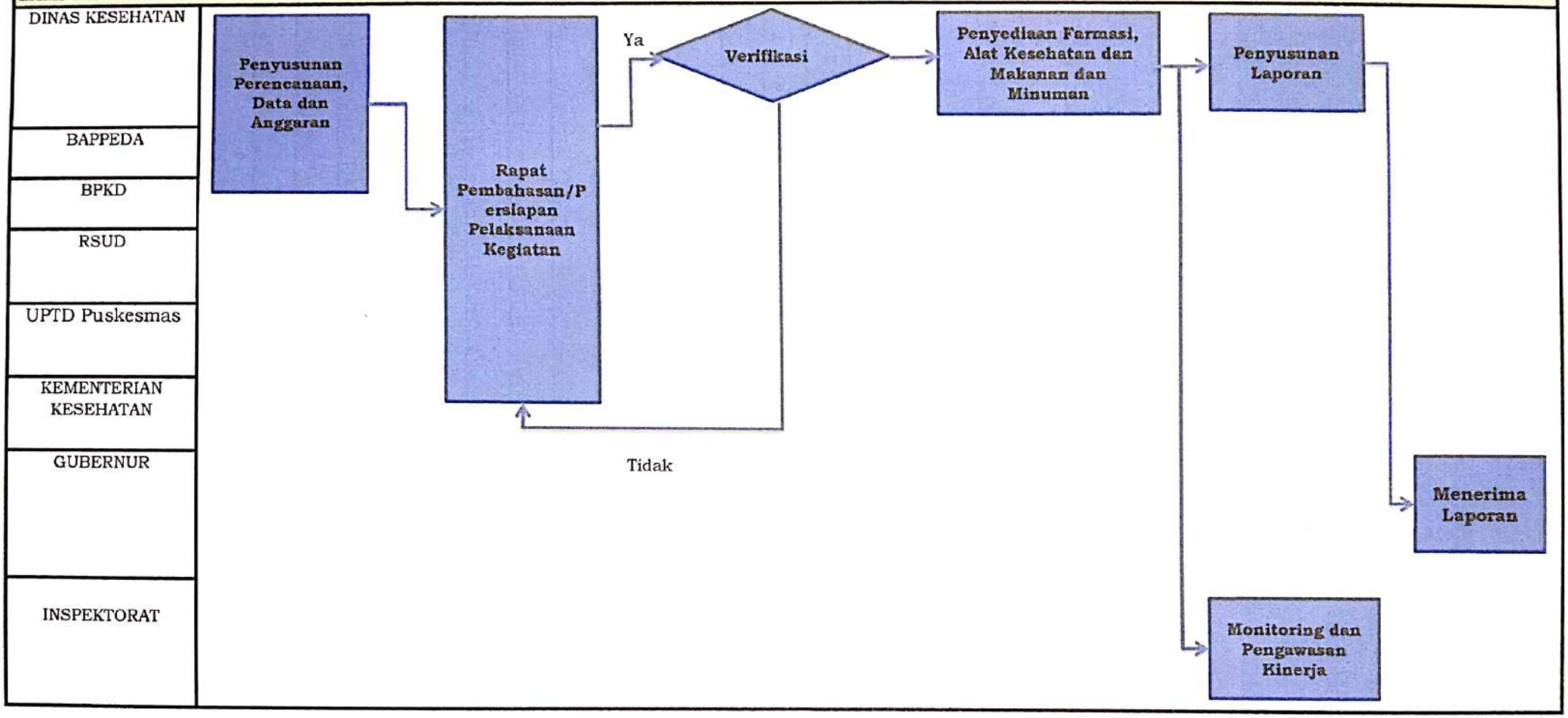
OPD | KABAG HUKUM

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
LAMBAR 08.02



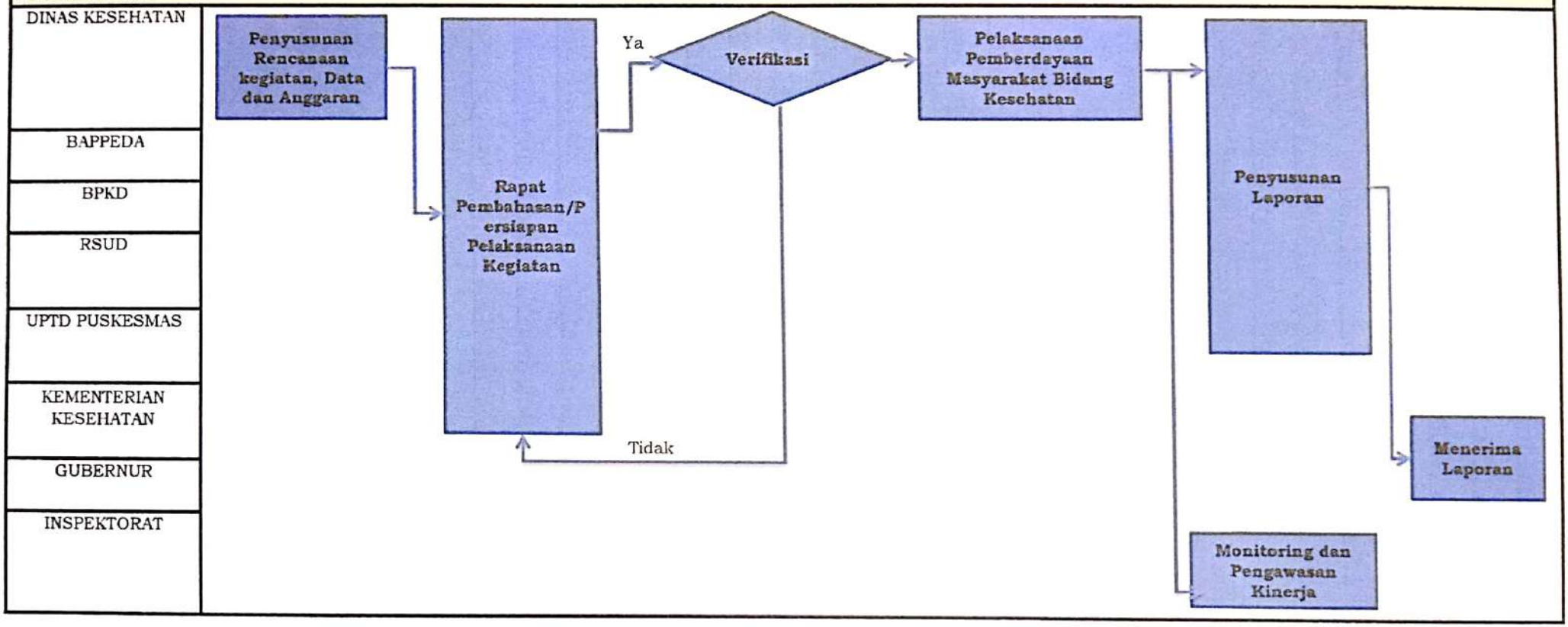
OPD | KABAG HUKUM

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
LAMBAR 08.03



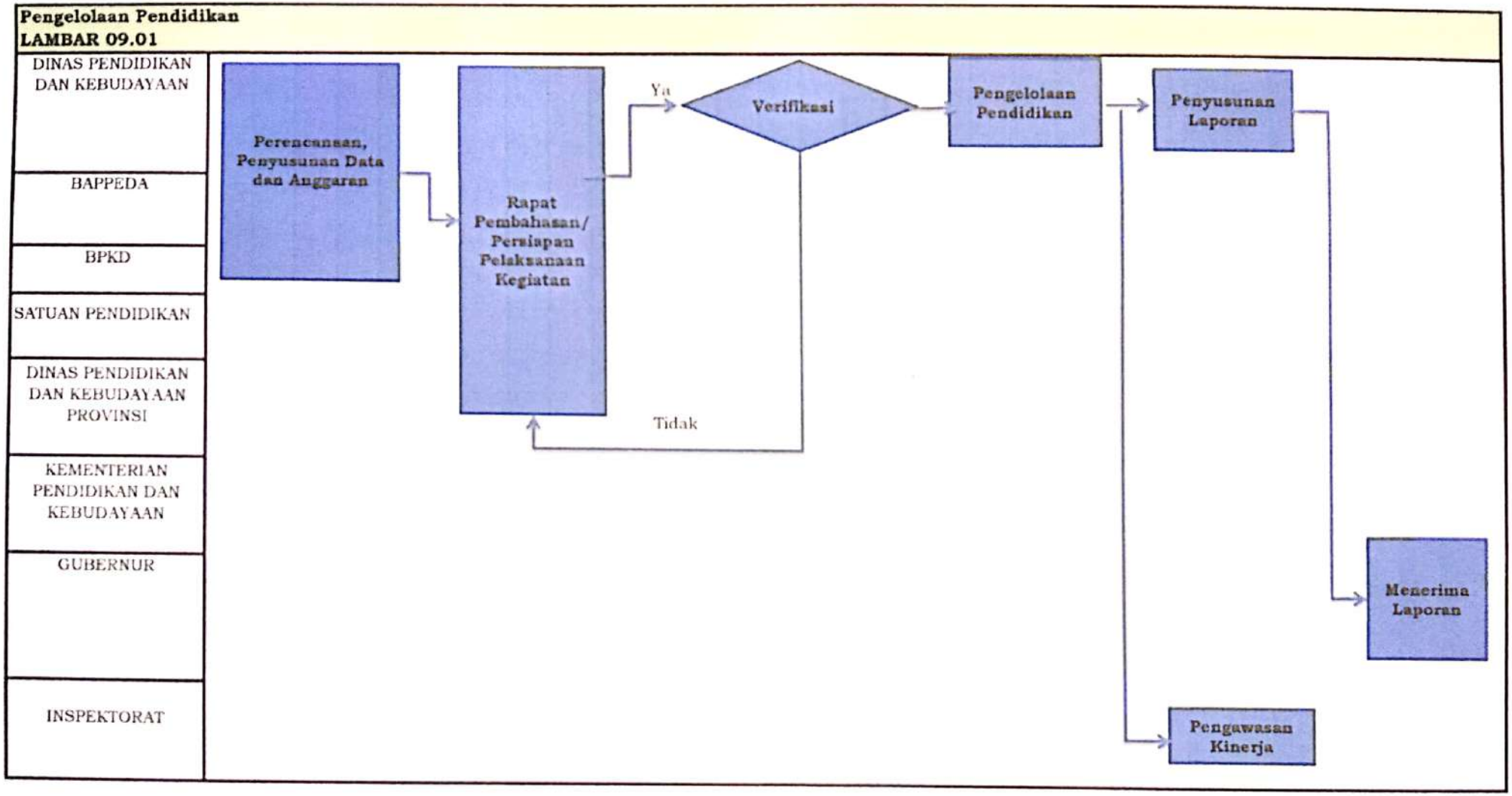
OPD	KABAG HUKUM

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
LAMBAR 08.04



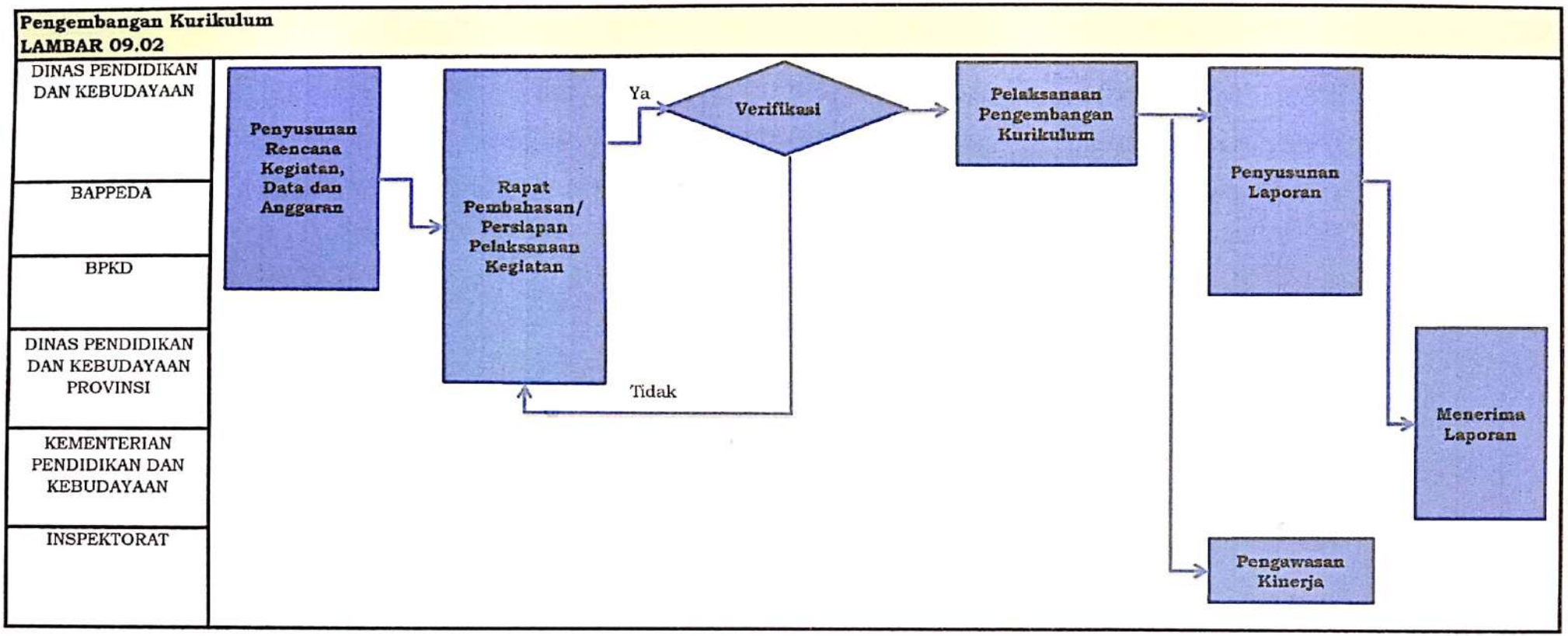
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan Pendidikan
LAMBAR 09.01



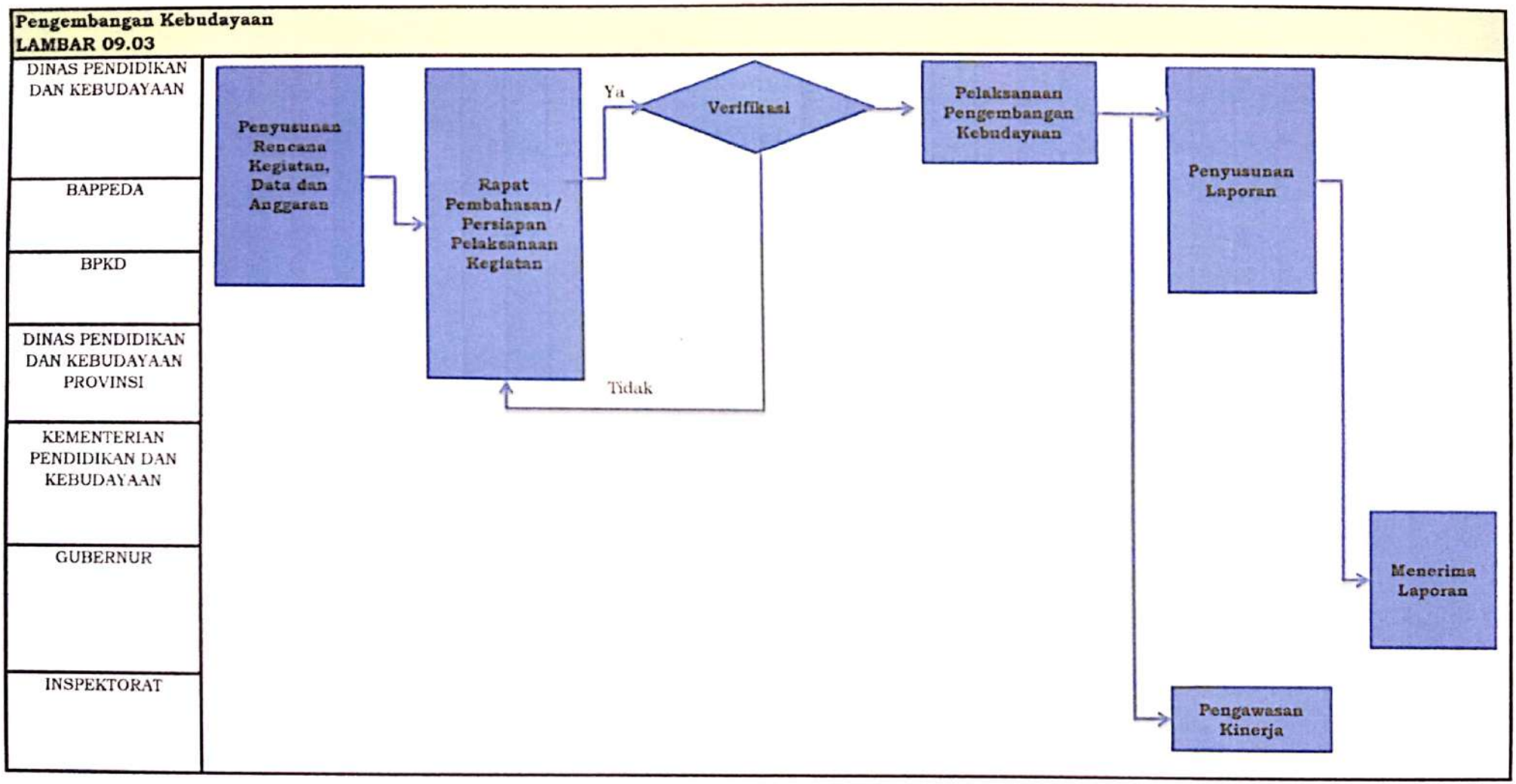
OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan Kurikulum
LAMBAR 09.02



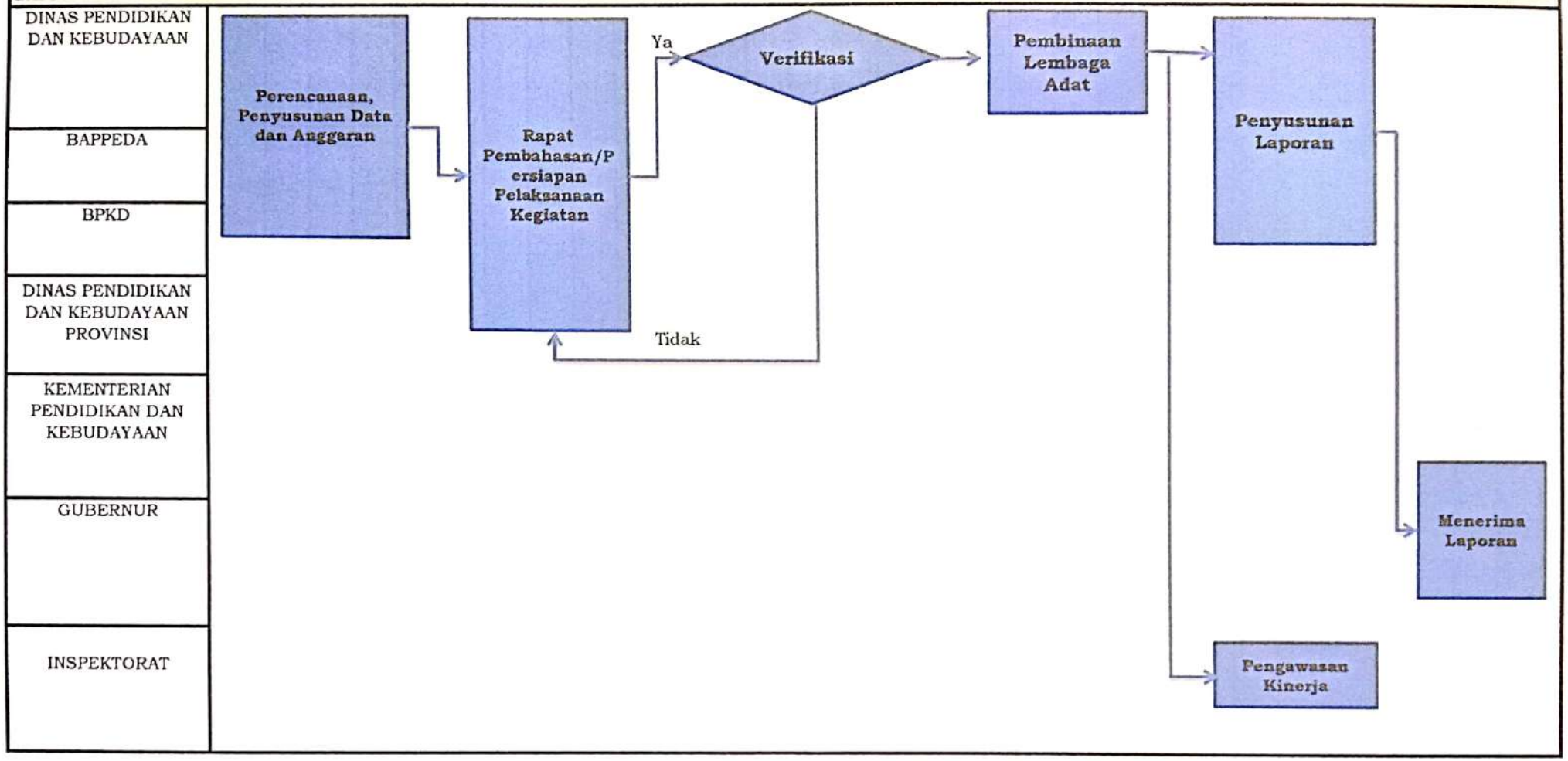
OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan Kebudayaan
LAMBAR 09.03



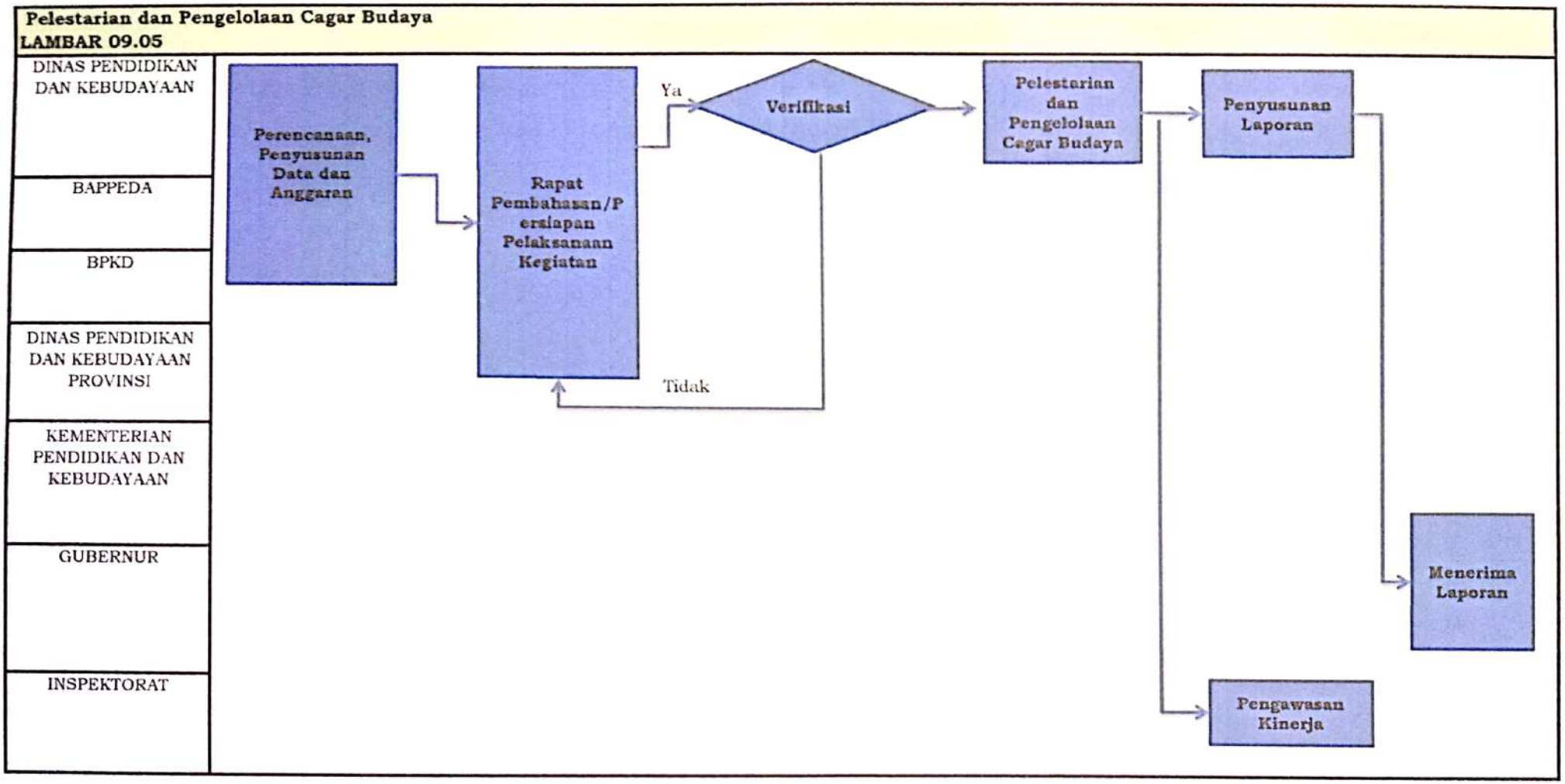
OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan Kesenian Tradisional
LAMBAR 09.04



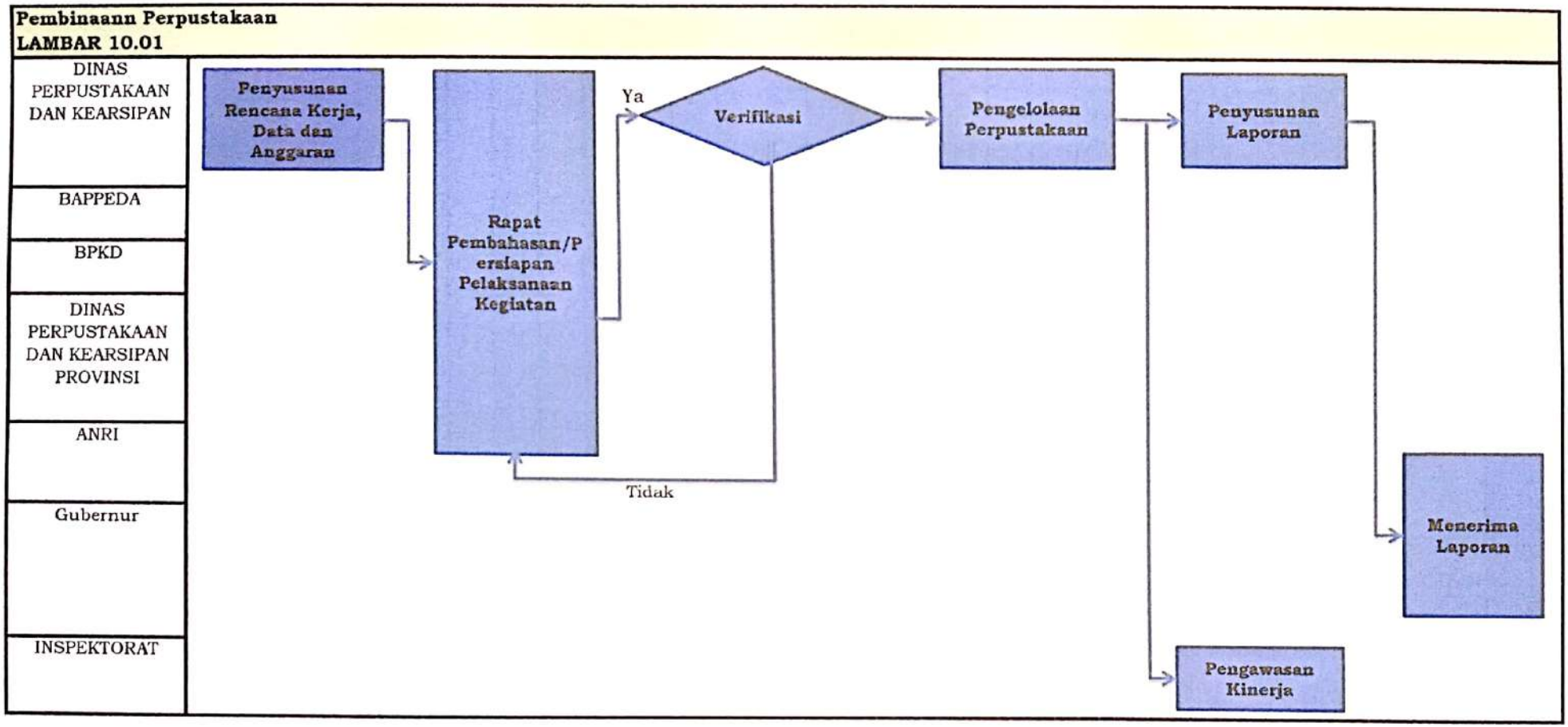
OPD | KABAG HUKUM

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
LAMBAR 09.05



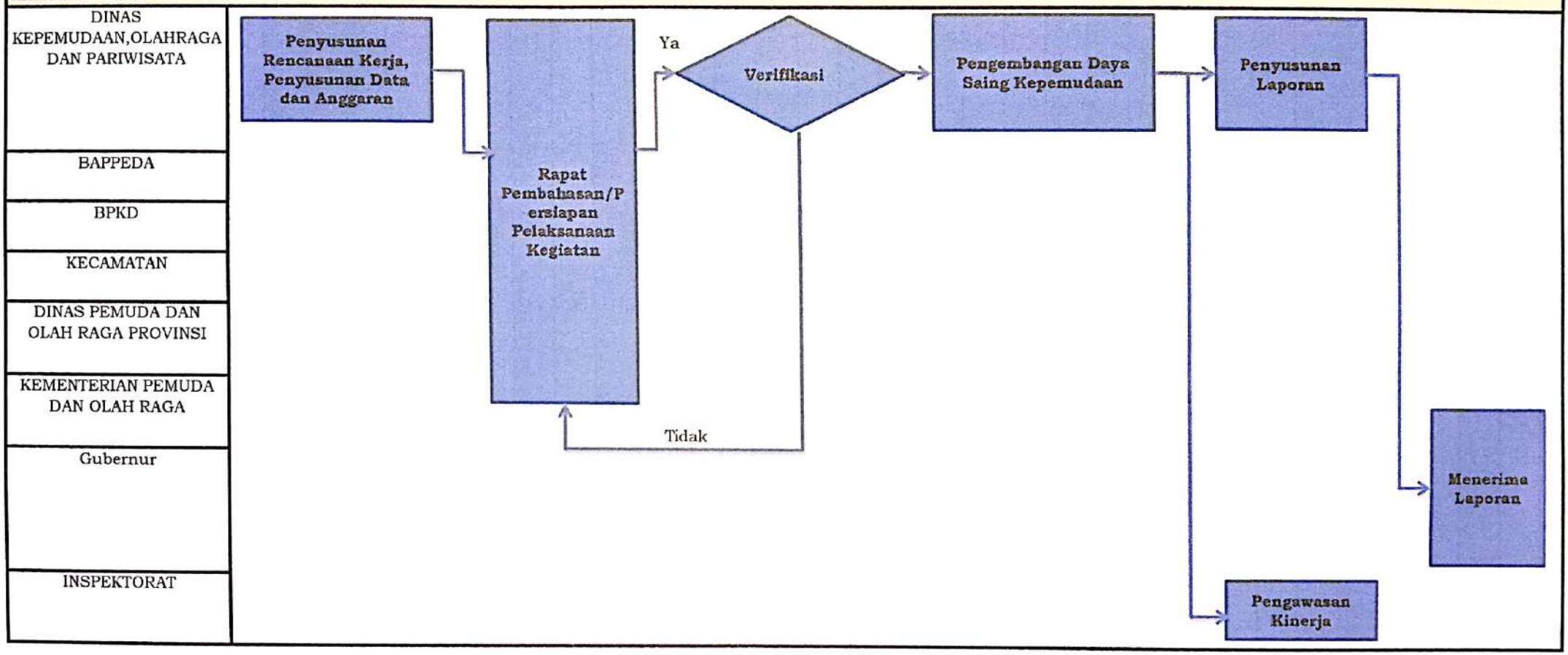
OPD | KABAG HUKUM

Pembinaann Perpustakaan
LAMBAR 10.01



OPD | KABAG HUKUM

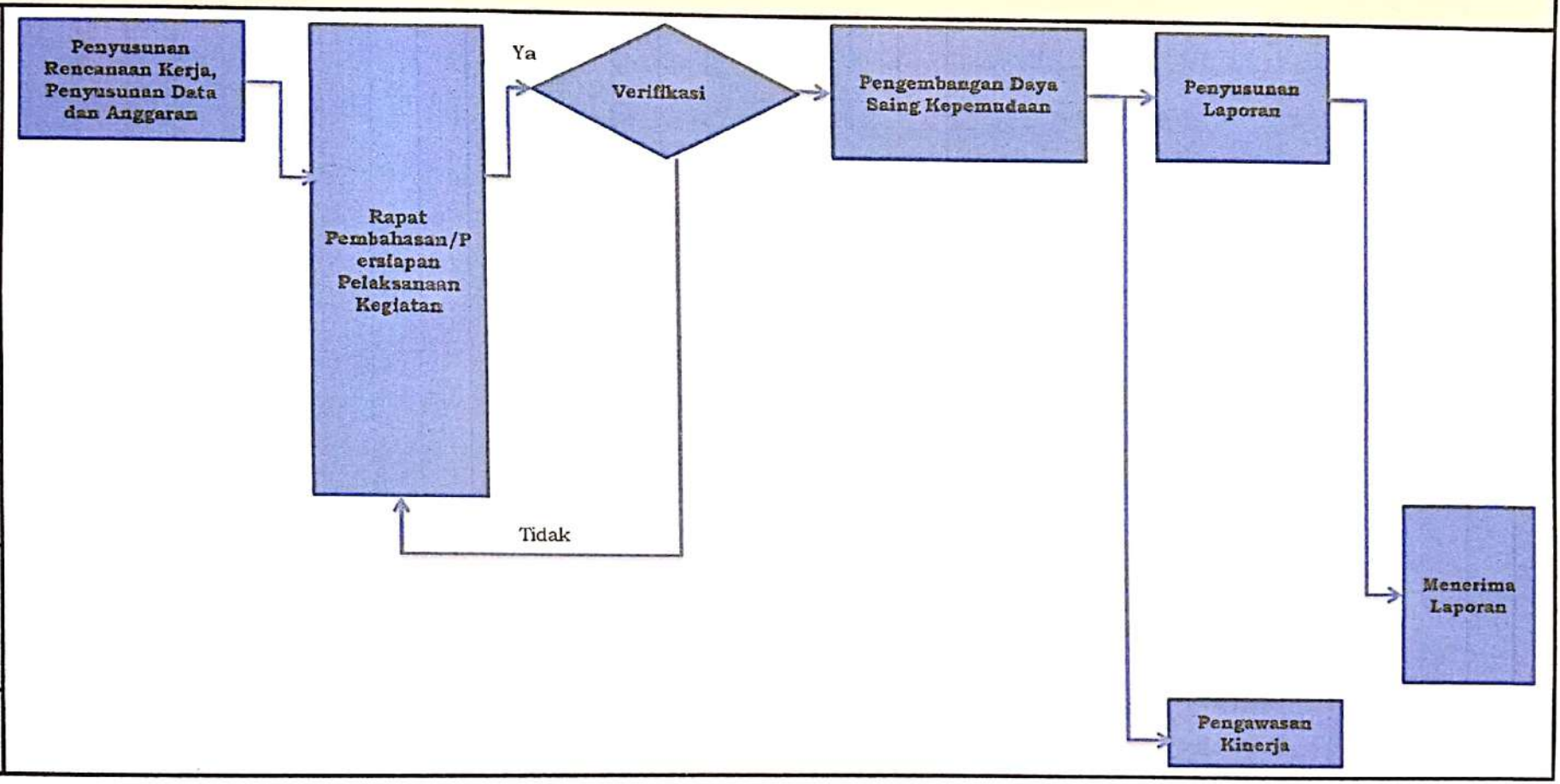
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
LAMBAR 12.01



OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
LAMBAR 13.01

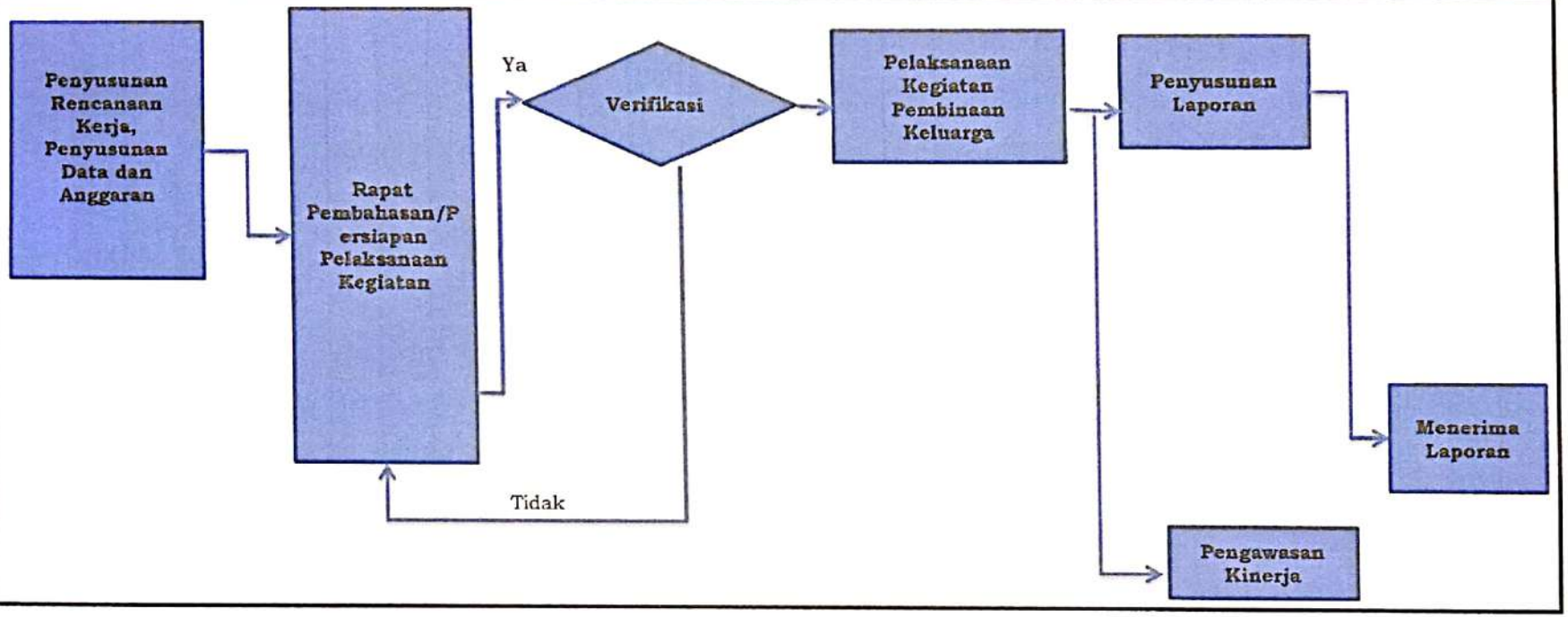
DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA
BAPPEDA
BPKD
KECAMATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Gubernur
INSPEKTORAT



OPD | KABAG HUKUM

Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
LAMBAR 14.01

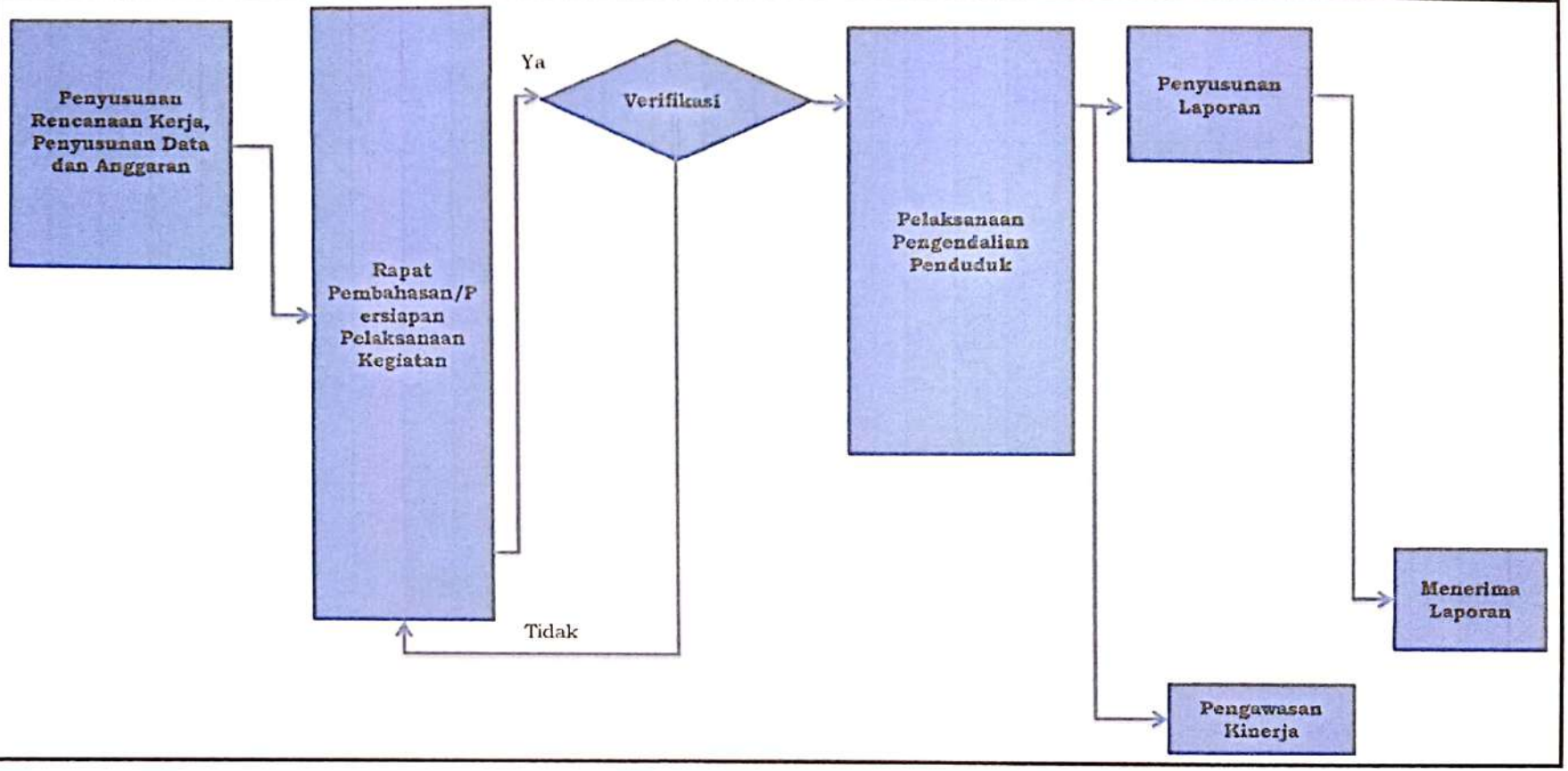
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAPPEDA
BPKD
KECAMATAN
PEMERINTAH PROVINSI
BKKBN
INSPEKTORAT



OPD | KABAG HUKUM

Pengendalian Penduduk
LAMBAR 14.02

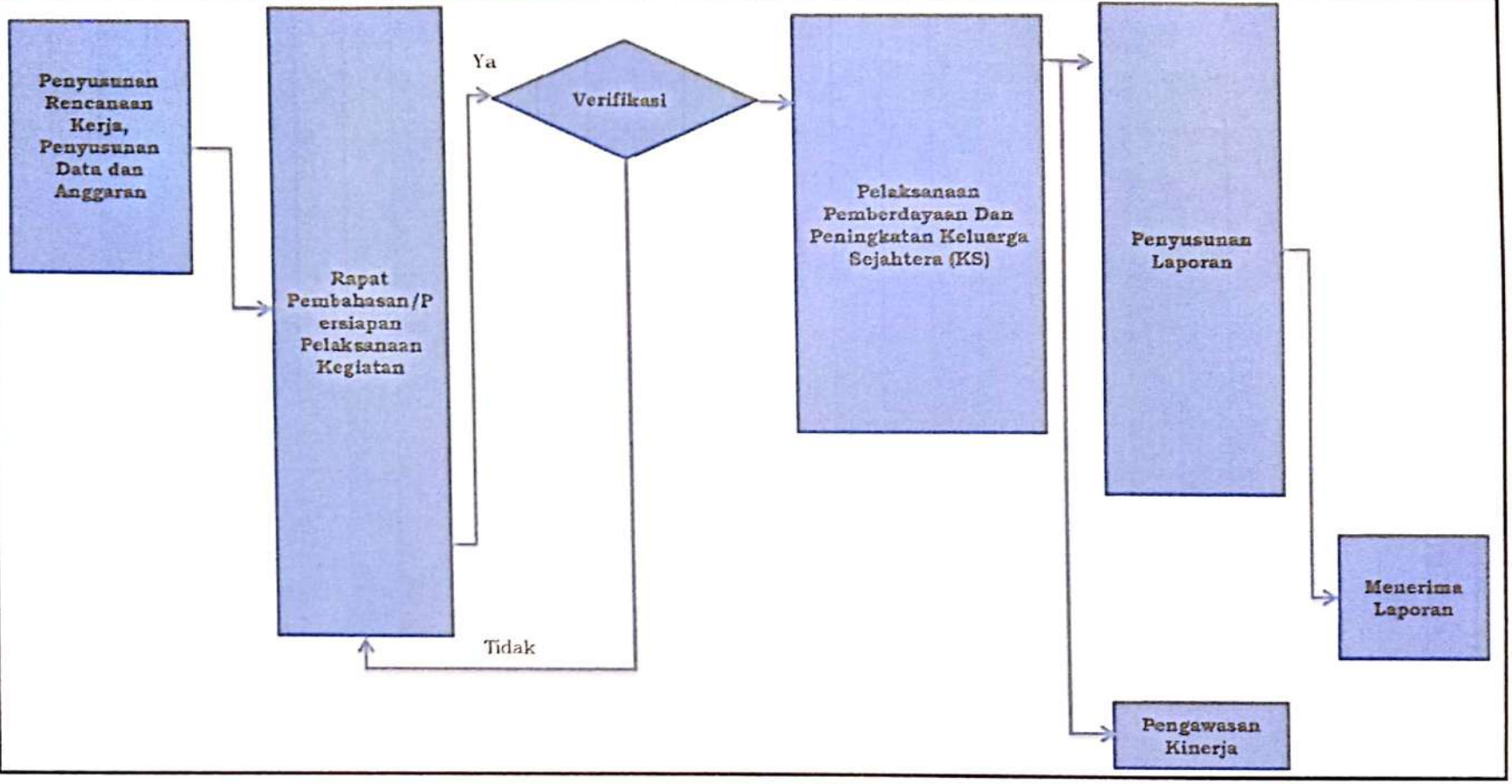
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAPPEDA
BPKD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KECAMATAN
PEMERINTAH PROVINSI
BKKBN
INSPEKTORAT



OPD | KABAG HUKUM

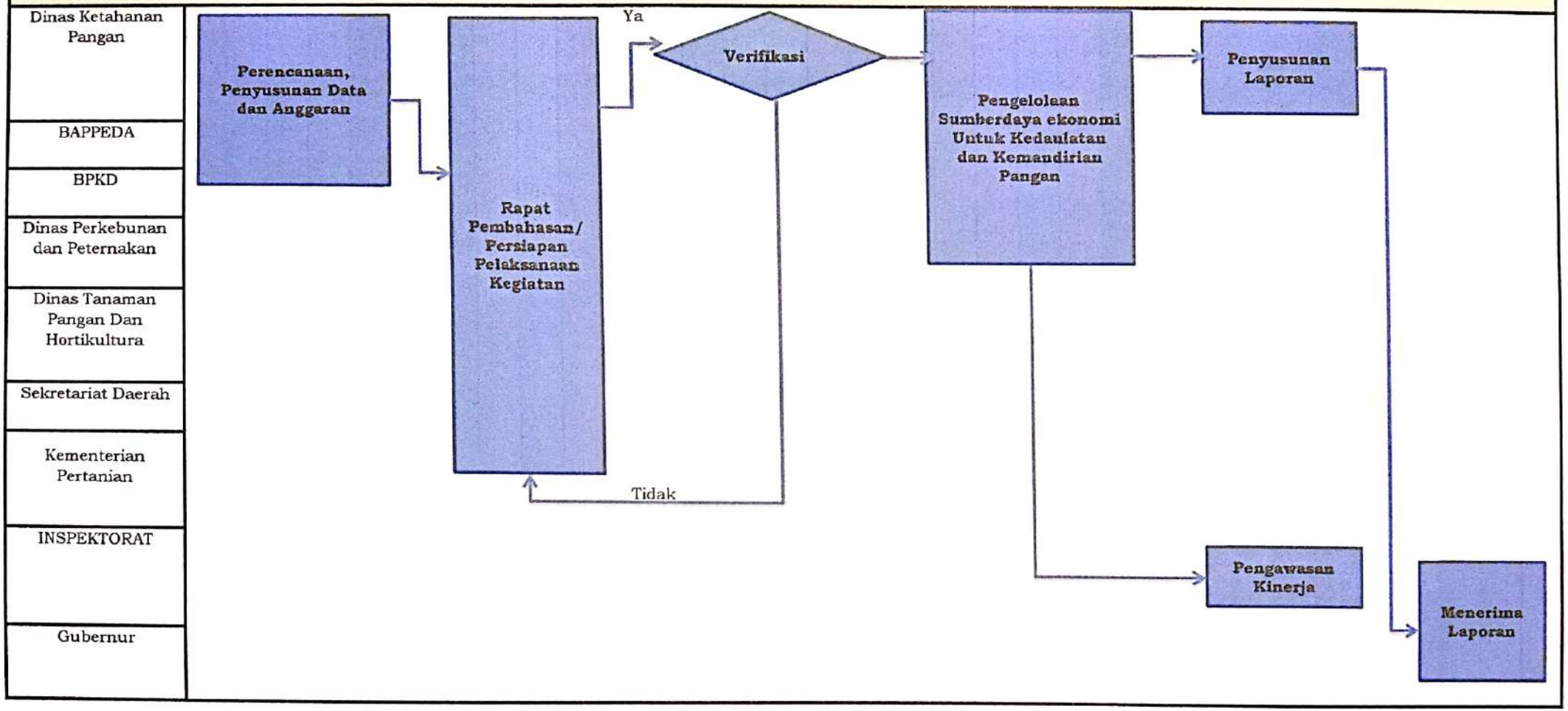
Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
LAMBAR 14.03

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAPPEDA
BPKD
DINAS SOSIAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KECAMATAN
PEMERINTAH PROVINSI
BKKBN
INSPEKTORAT



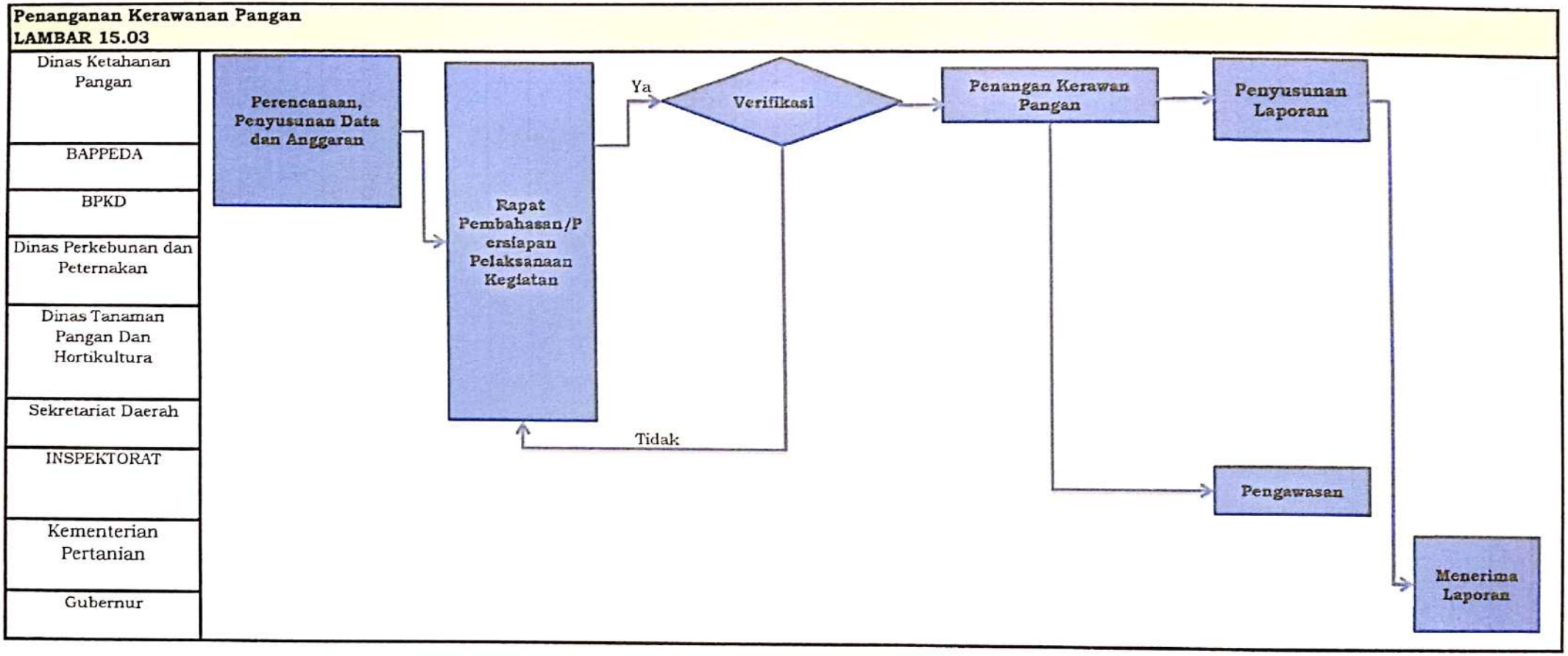
OPD	KABAG HUKUM

Pengelolaan Sumberdaya ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
LAMBAR 15.01



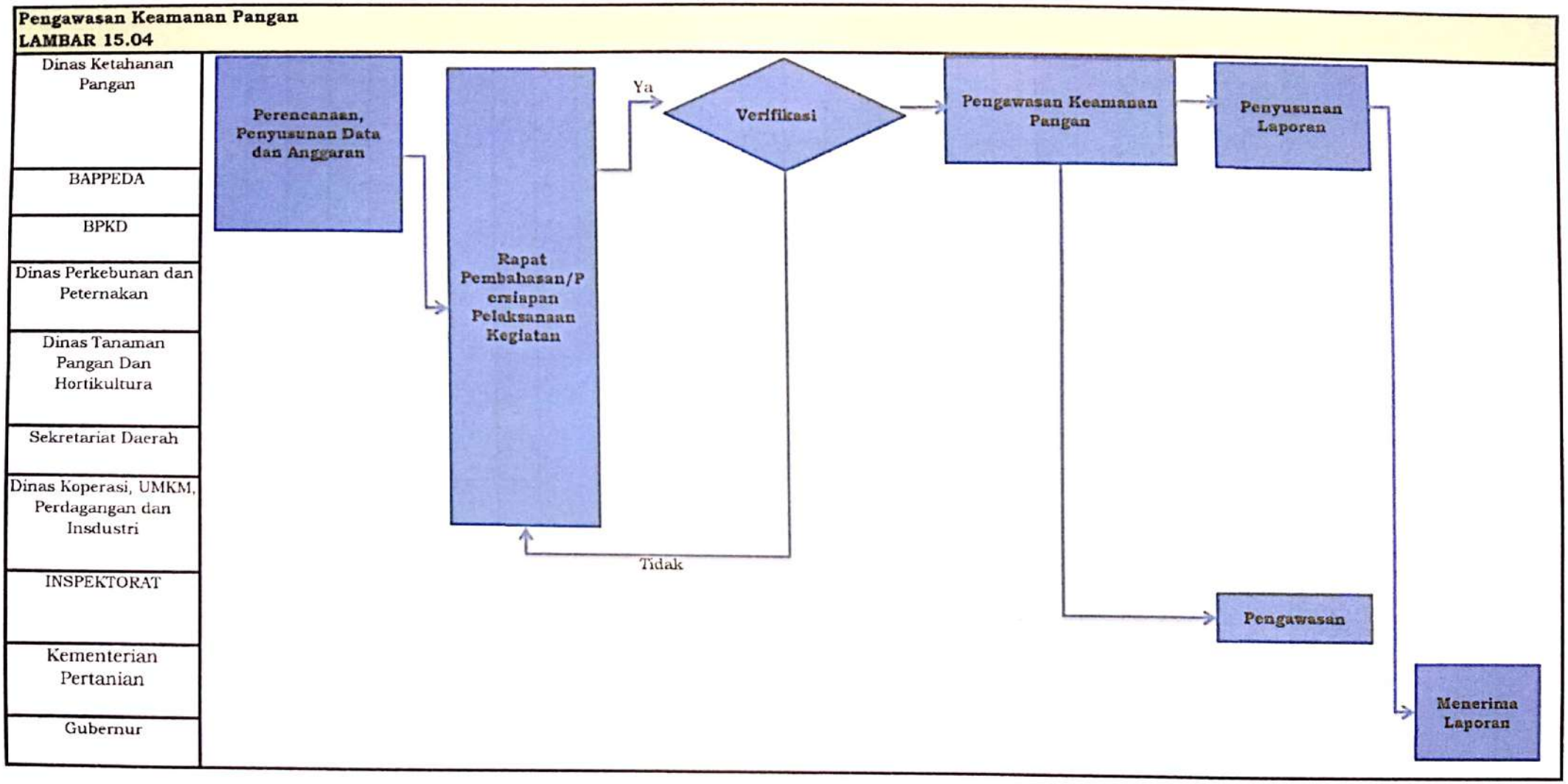
OPD | KABAG HUKUM

Penanganan Kerawanan Pangan
LAMBAR 15.03



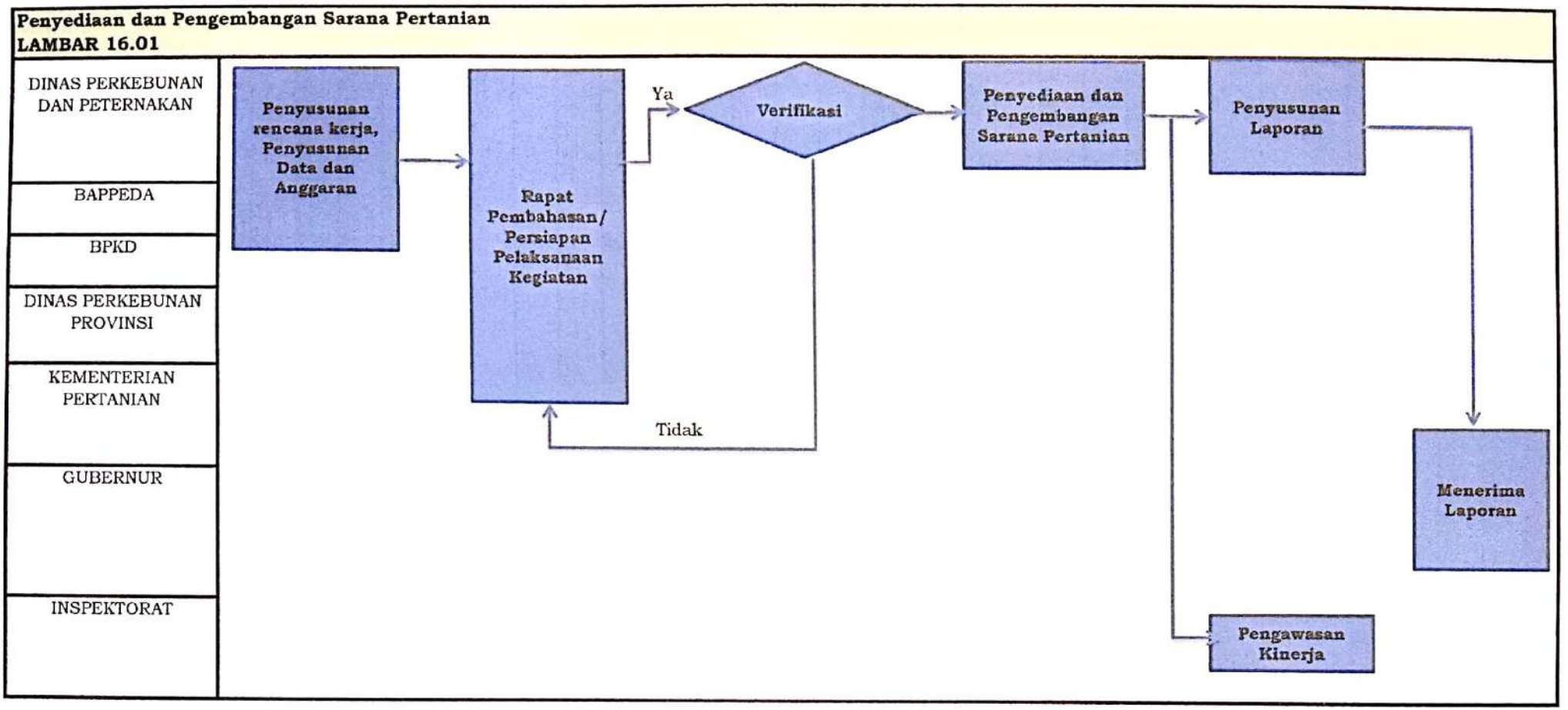
OPD | KABAG HUKUM

Pengawasan Keamanan Pangan
LAMBAR 15.04



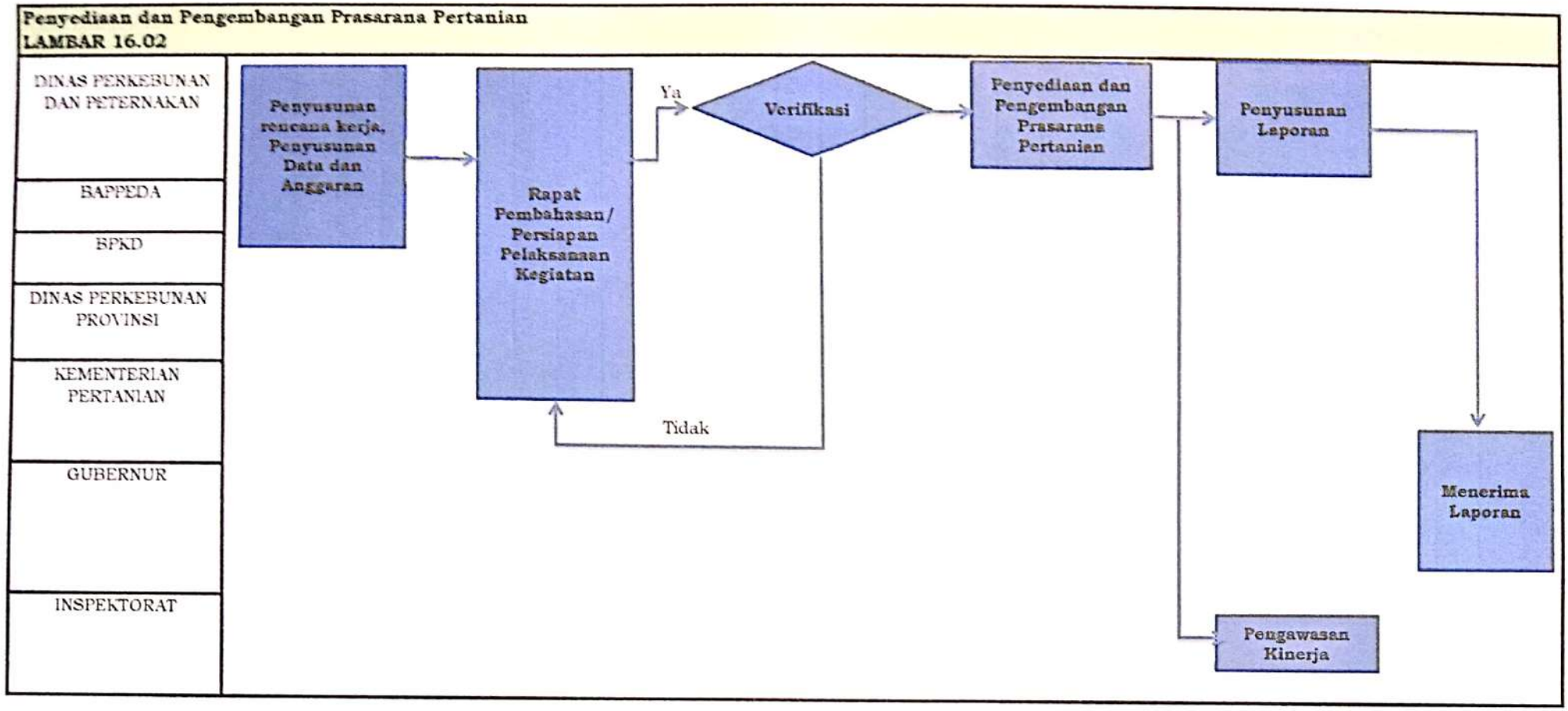
OPD | KABAG HUKUM

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
LAMBAR 16.01



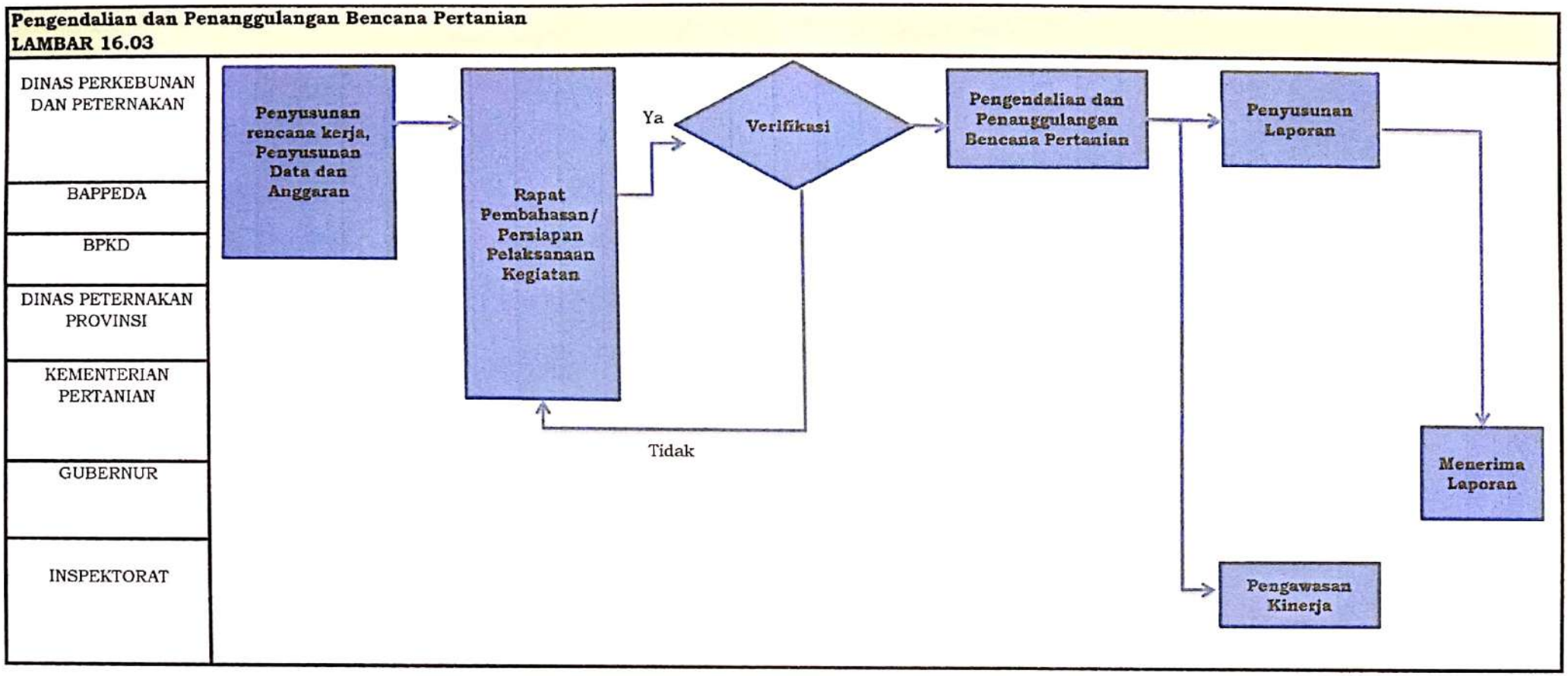
OPD | KABAG HUKUM

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
LAMBAR 16.02



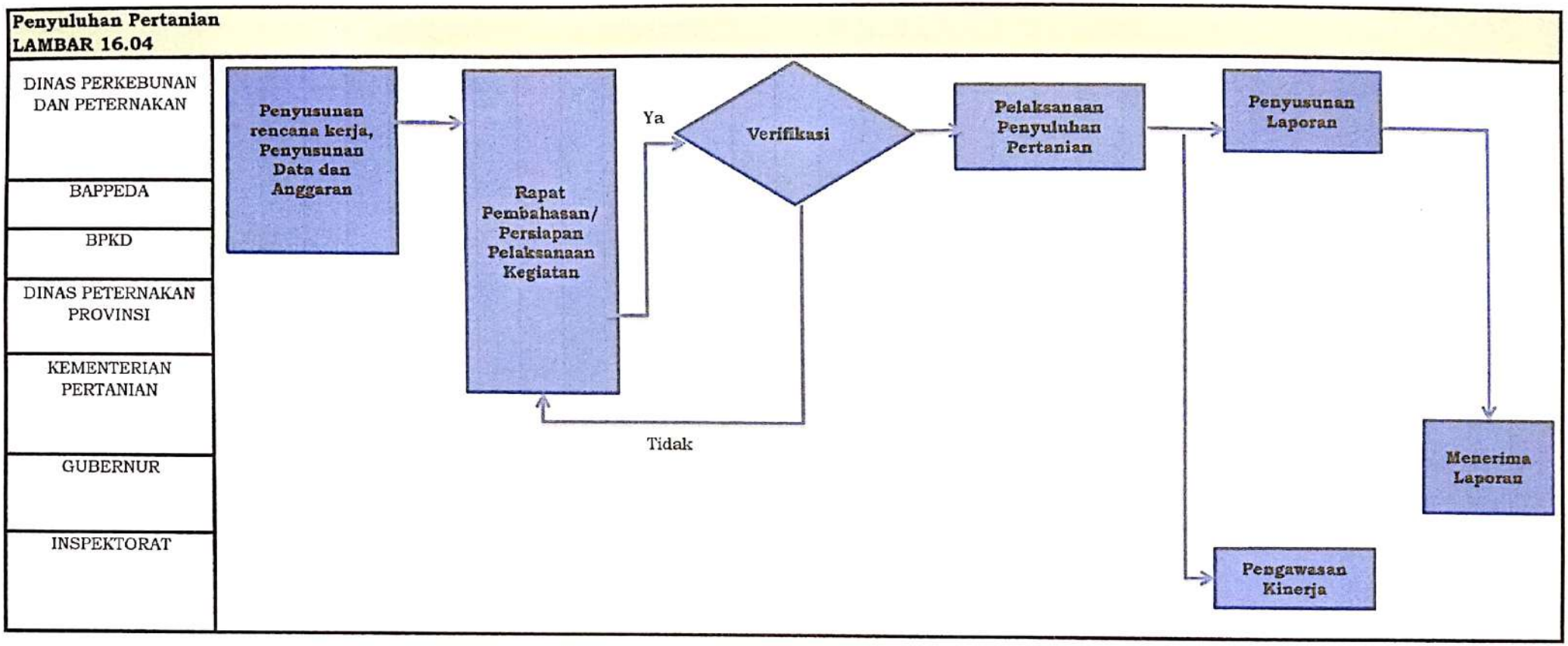
OPD | KABAG HUKUM

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
LAMBAR 16.03



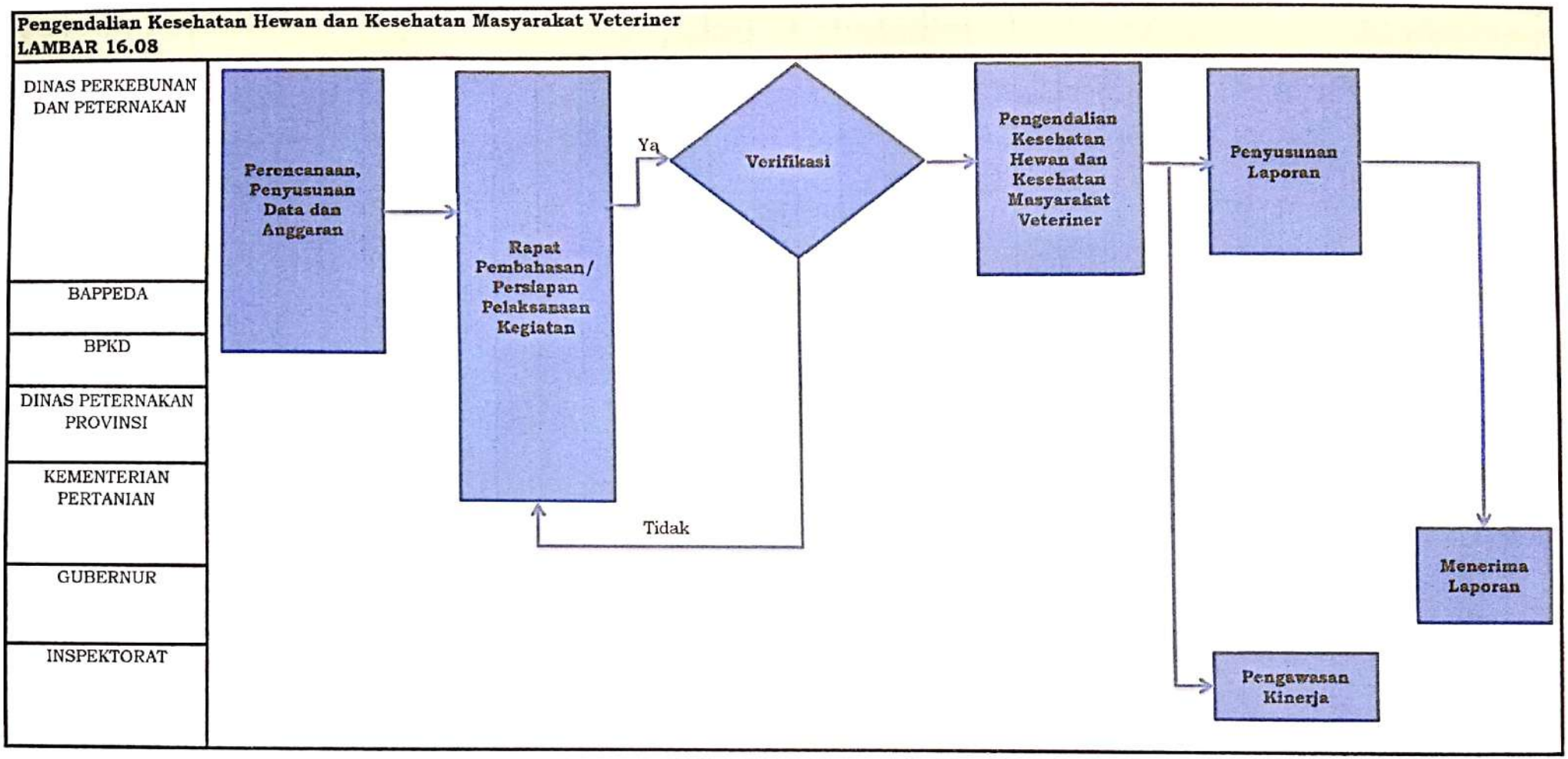
OPD	KABAG HUKUM

Penyuluhan Pertanian
LAMBAR 16.04



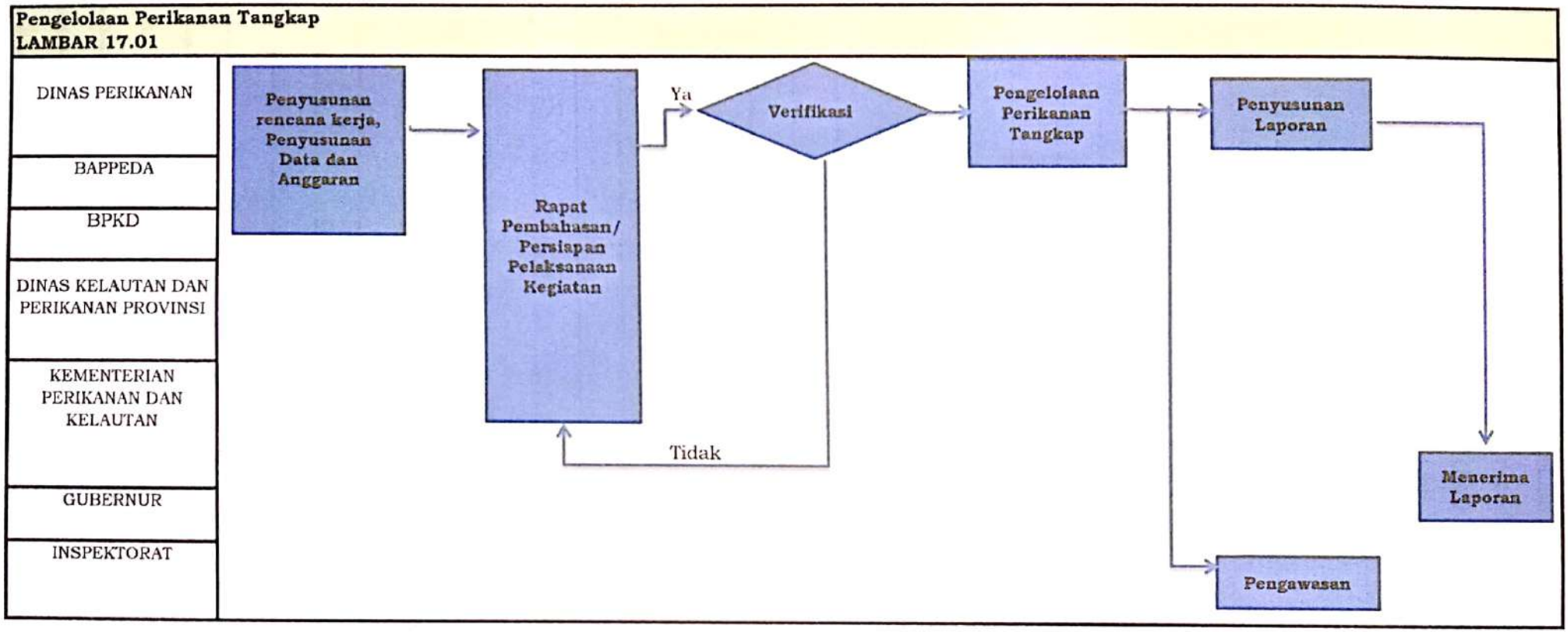
OPD | KABAG HUKUM

Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
LAMBAR 16.08



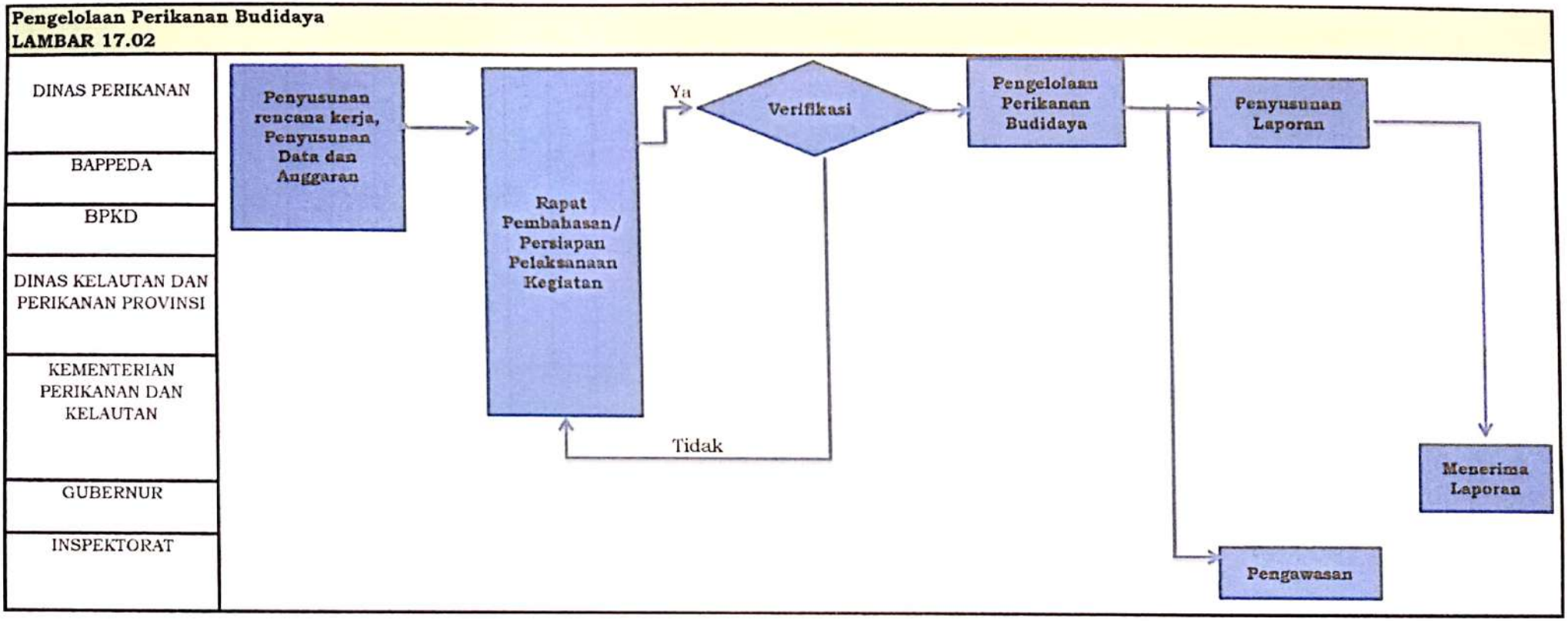
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan Perikanan Tangkap
LAMBAR 17.01



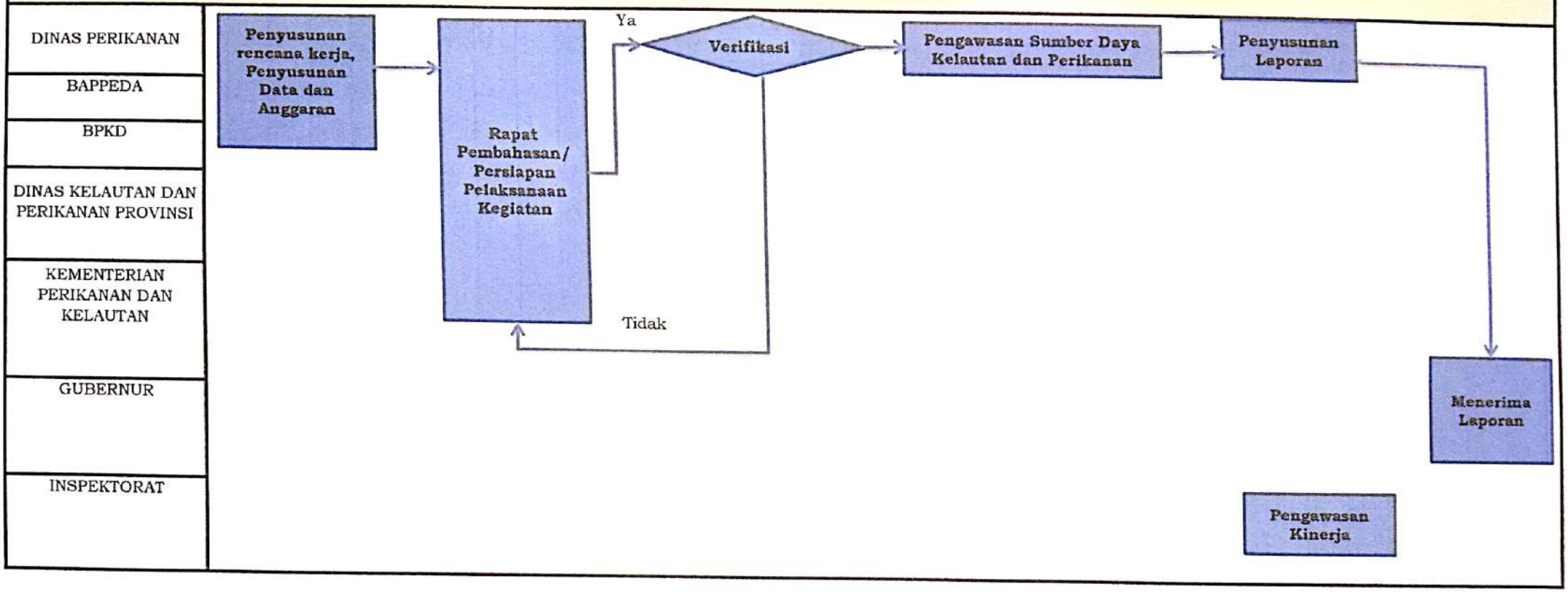
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan Perikanan Budidaya
LAMBAR 17.02



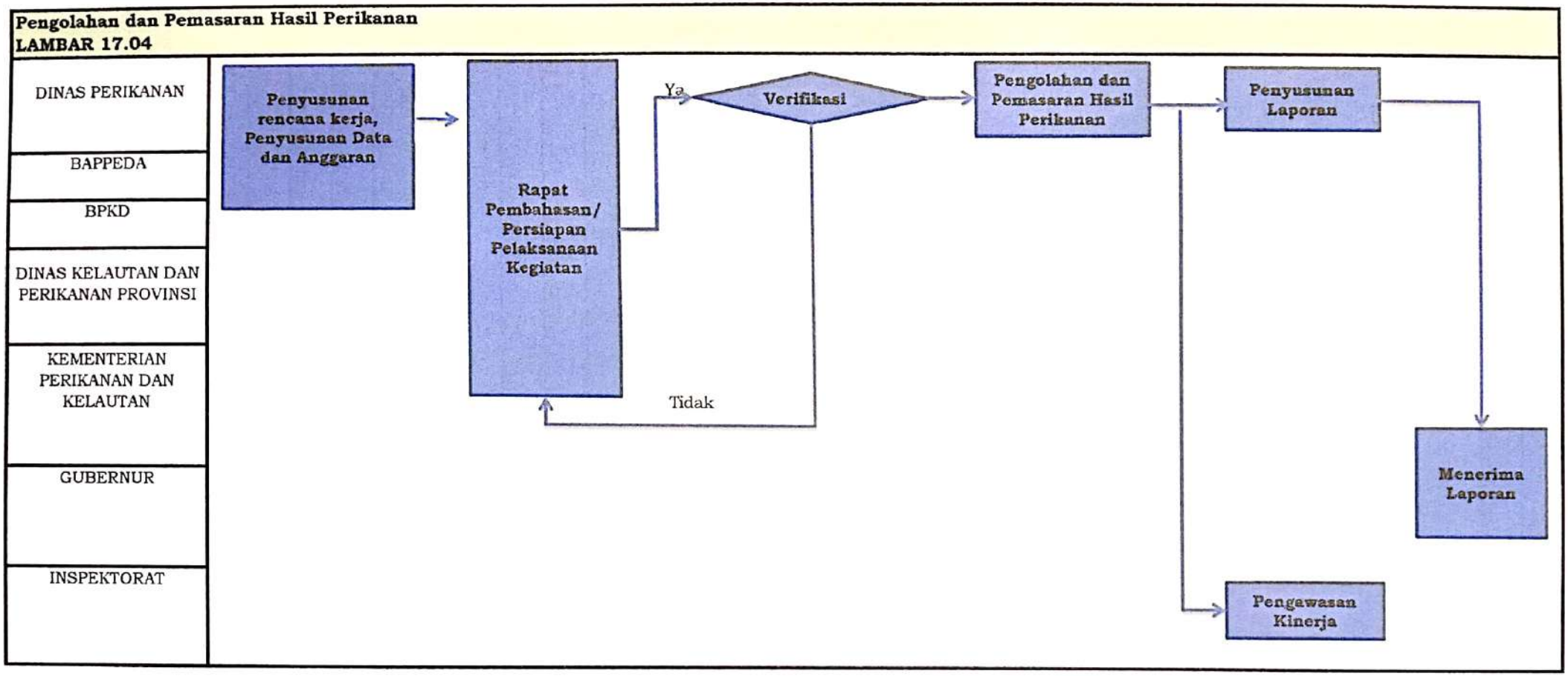
OPD | KABAG HUKUM

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
LAMBAR 17.03



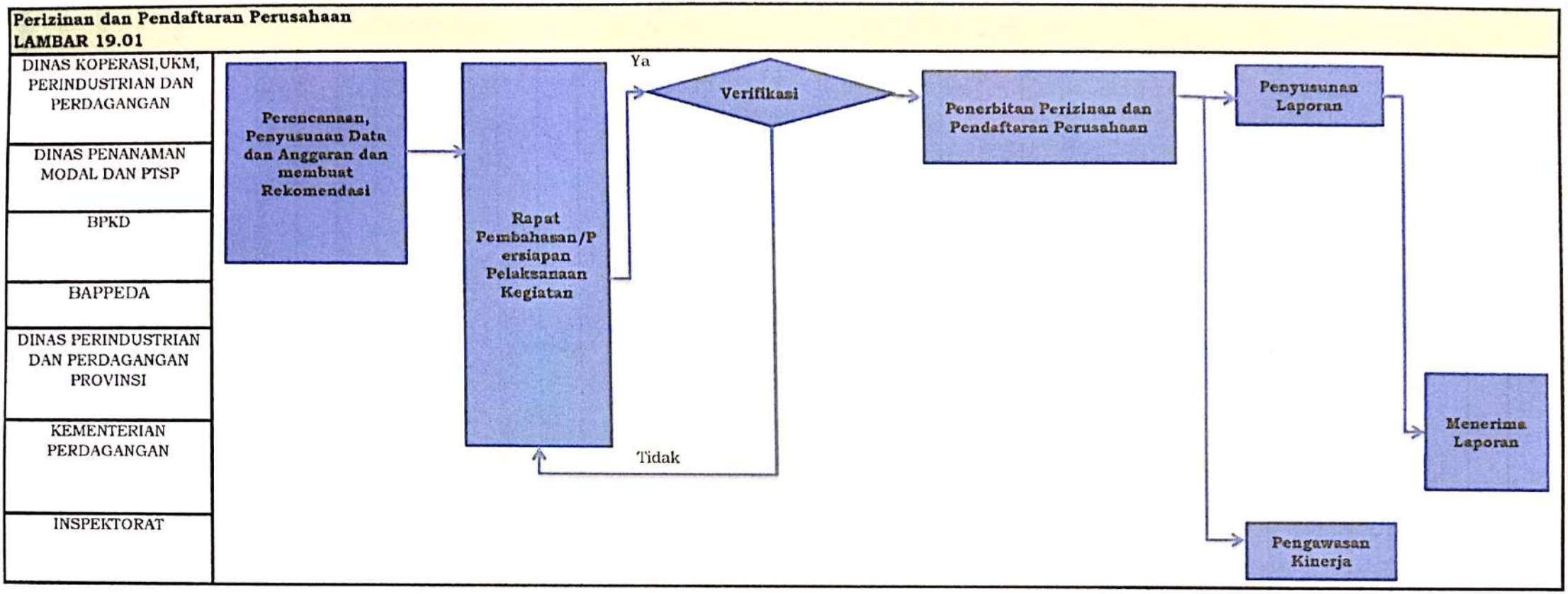
OPD | KABAG HUKUM

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
LAMBAR 17.04



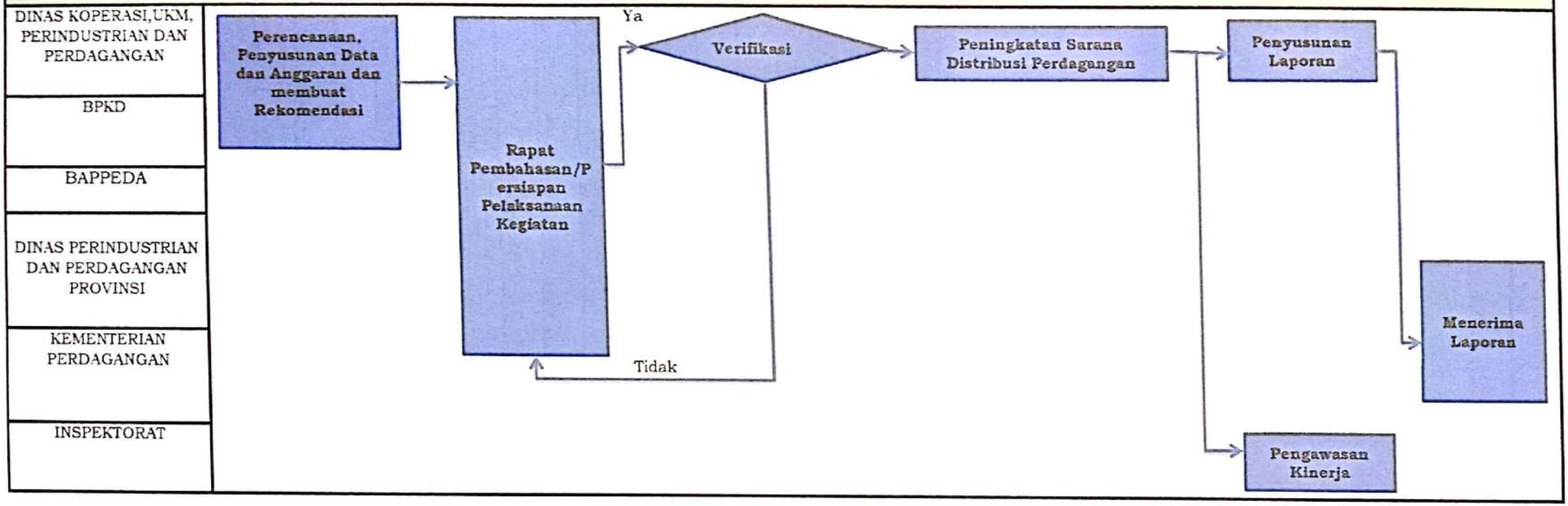
OPD | KABAG HUKUM

Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
LAMBAR 19.01



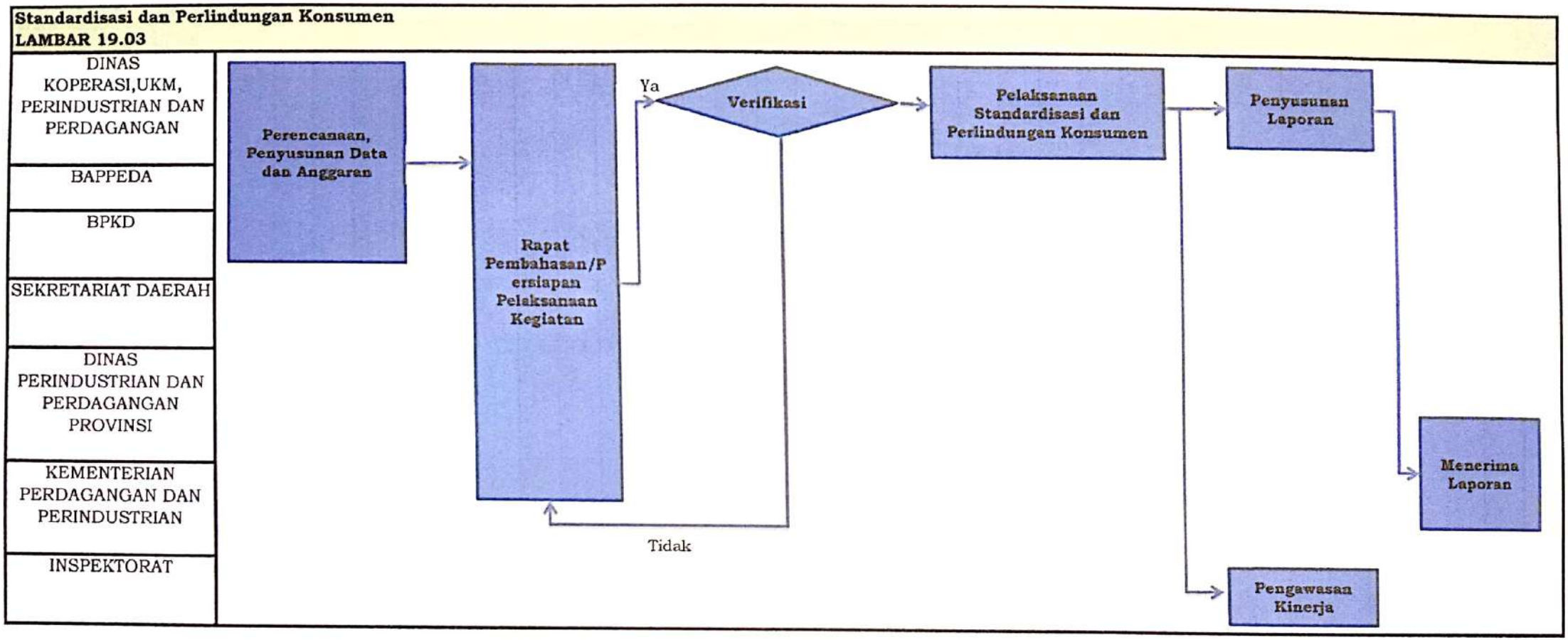
OPD	KABAG HUKUM

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
LAMBAR 19.02



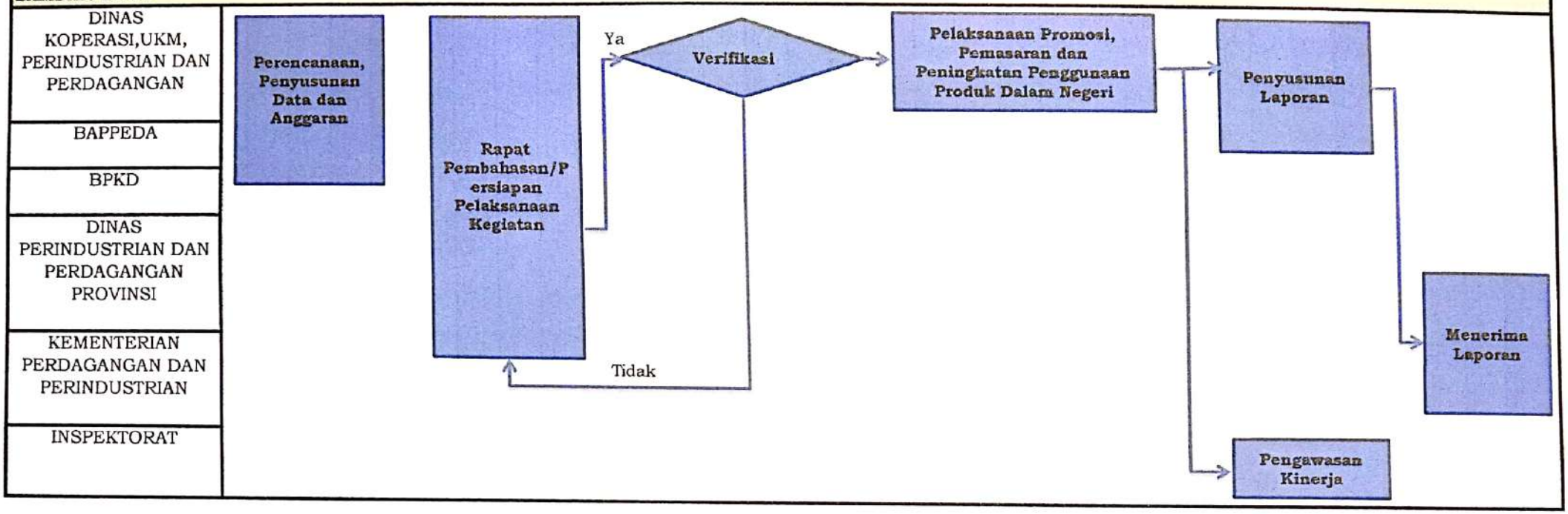
OPD | KABAG HUKUM

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
LAMBAR 19.03



OPD | KABAG HUKUM

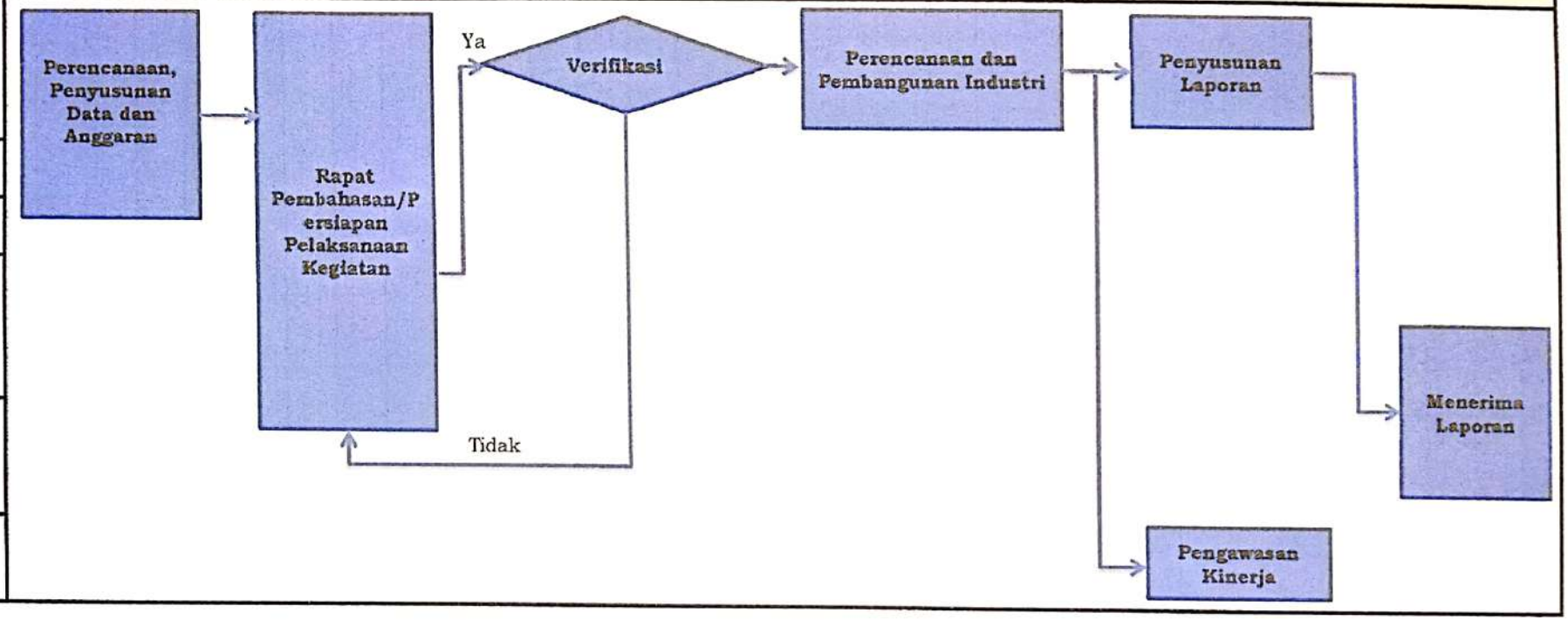
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
LAMBAR 19.04



OPD | KABAG HUKUM

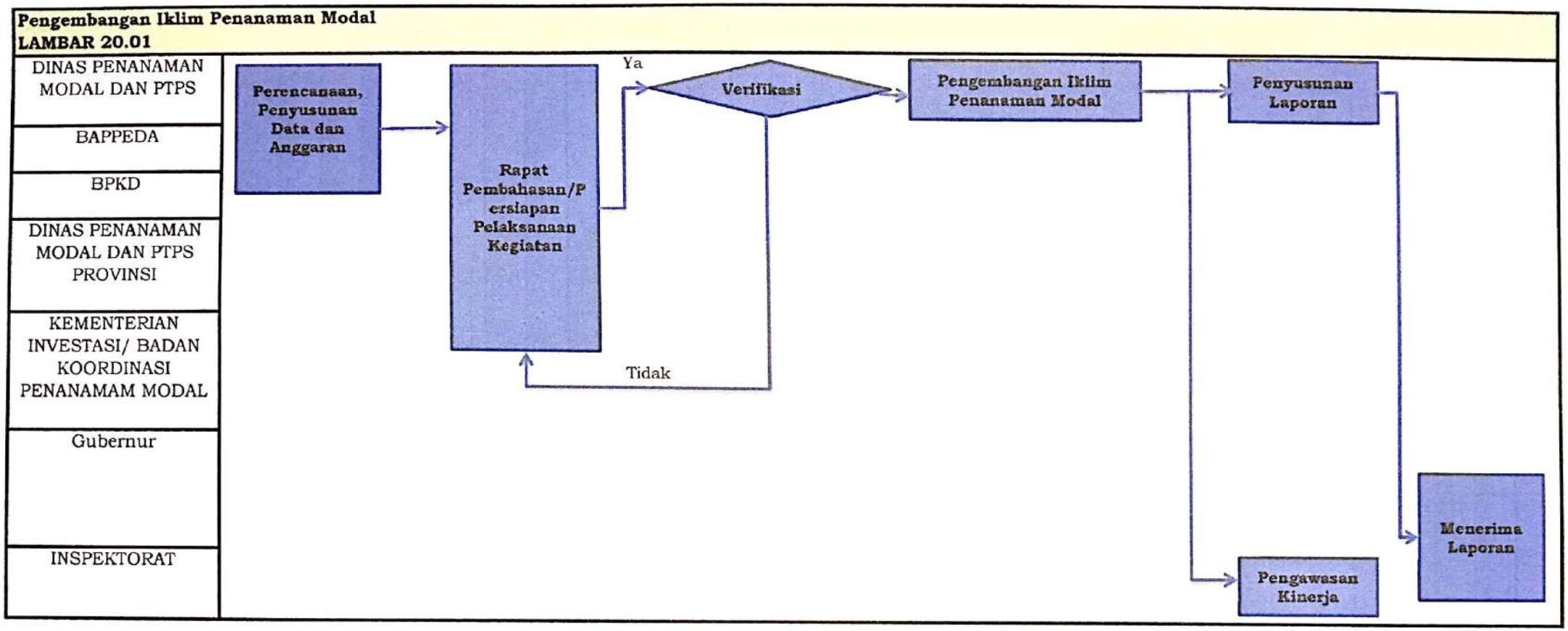
Perencanaan dan Pembangunan Industri
LAMBAR 19.05

DINAS KOPERASI,UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BAPPEDA
BPKD
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
INSPEKTORAT



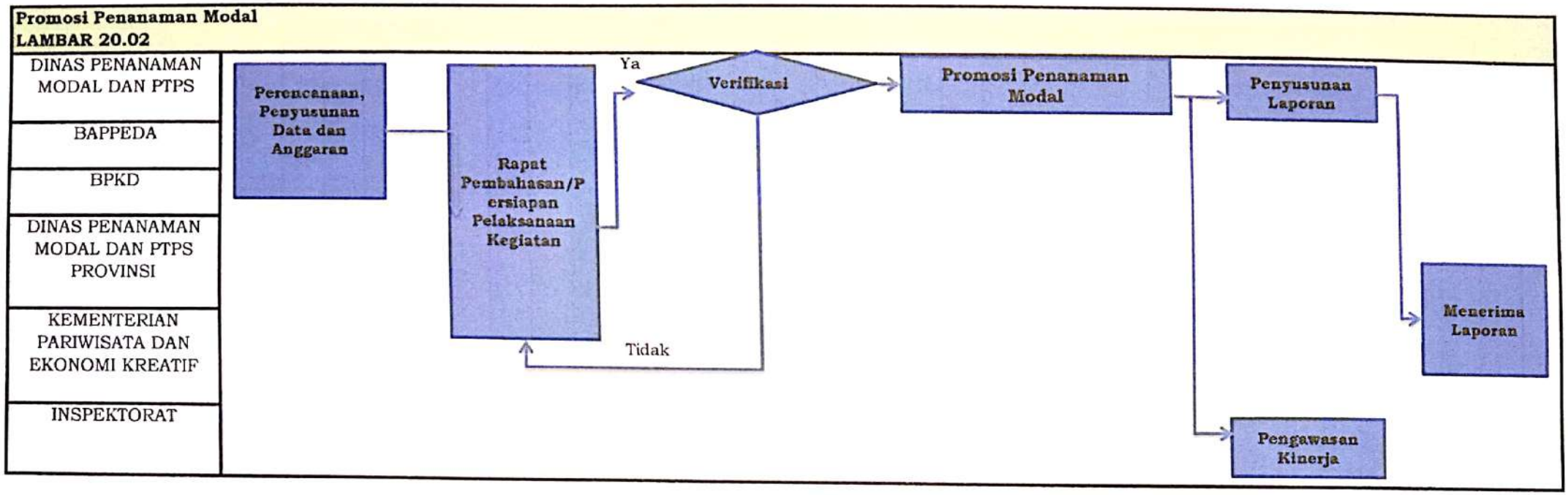
OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan Iklim Penanaman Modal
LAMBAR 20.01



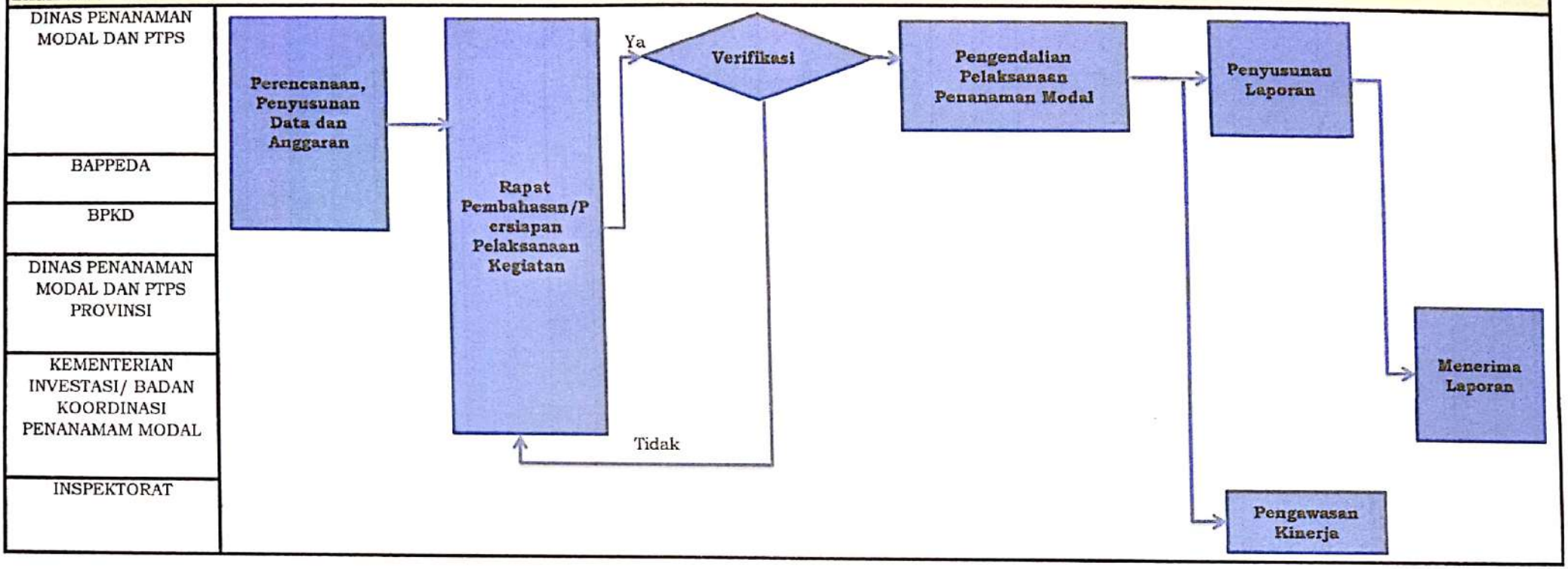
OPD | KABAG HUKUM

Promosi Penanaman Modal
LAMBAR 20.02



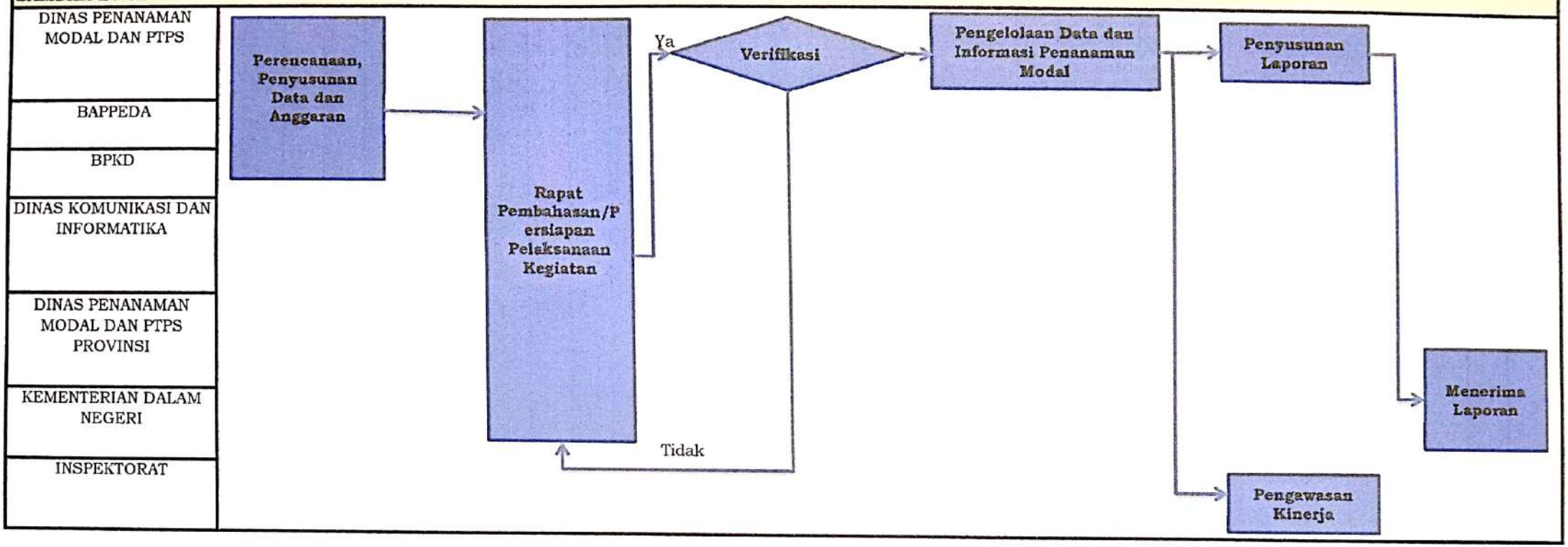
OPD | KABAG HUKUM

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
LAMBAR 20.03



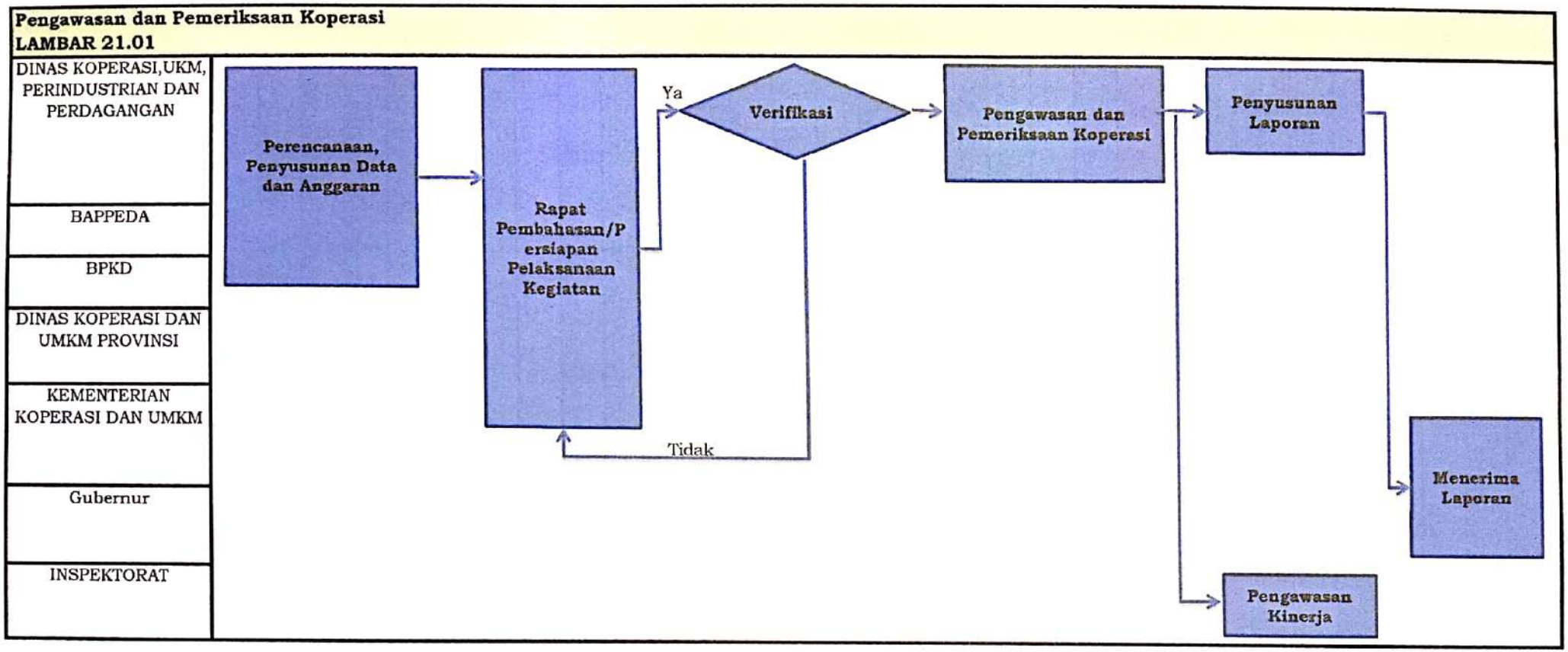
OPD	KABAG HUKUM

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
LAMBAR 20.04



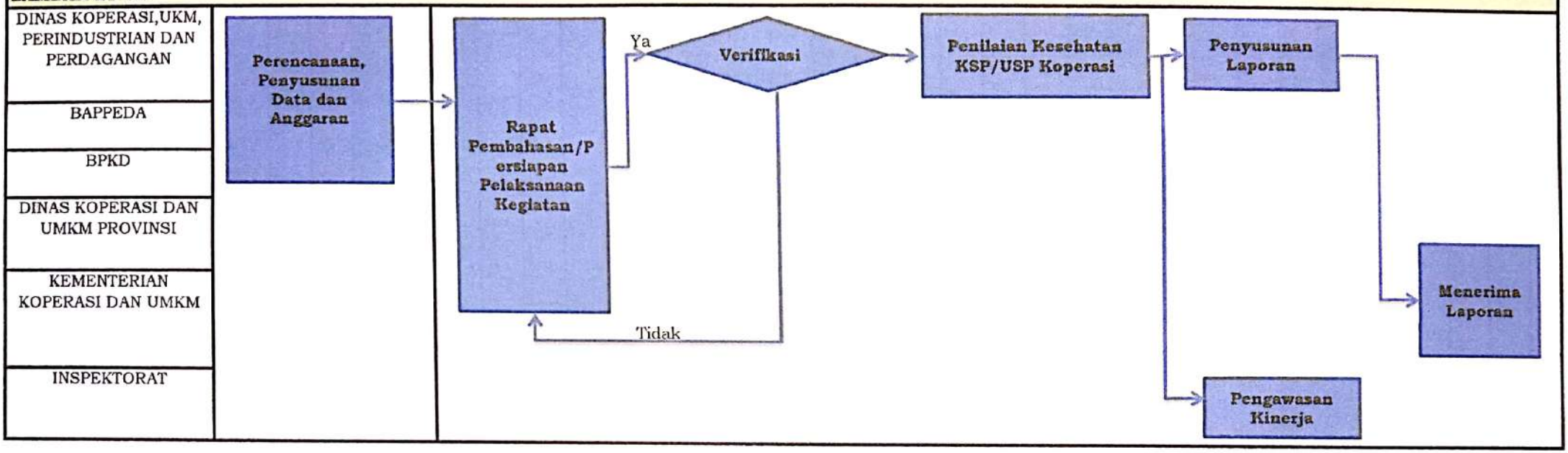
OPD | KABAG HUKUM

Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
LAMBAR 21.01



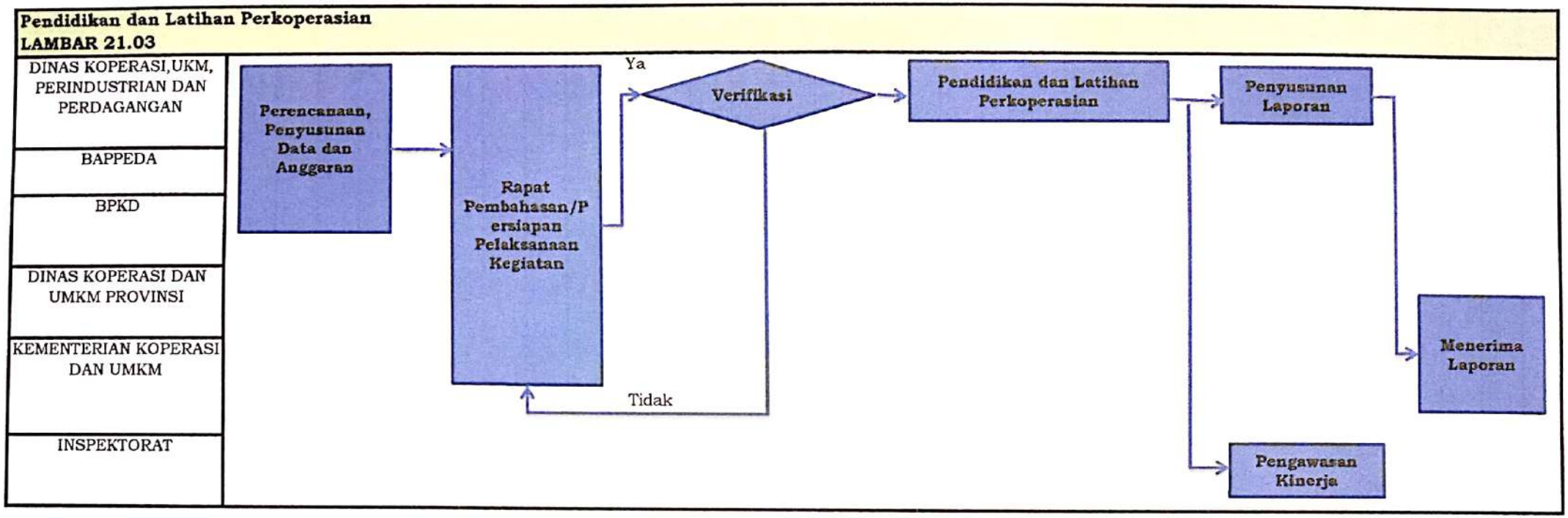
OPD | KABAG HUKUM

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
LAMBAR 21.02



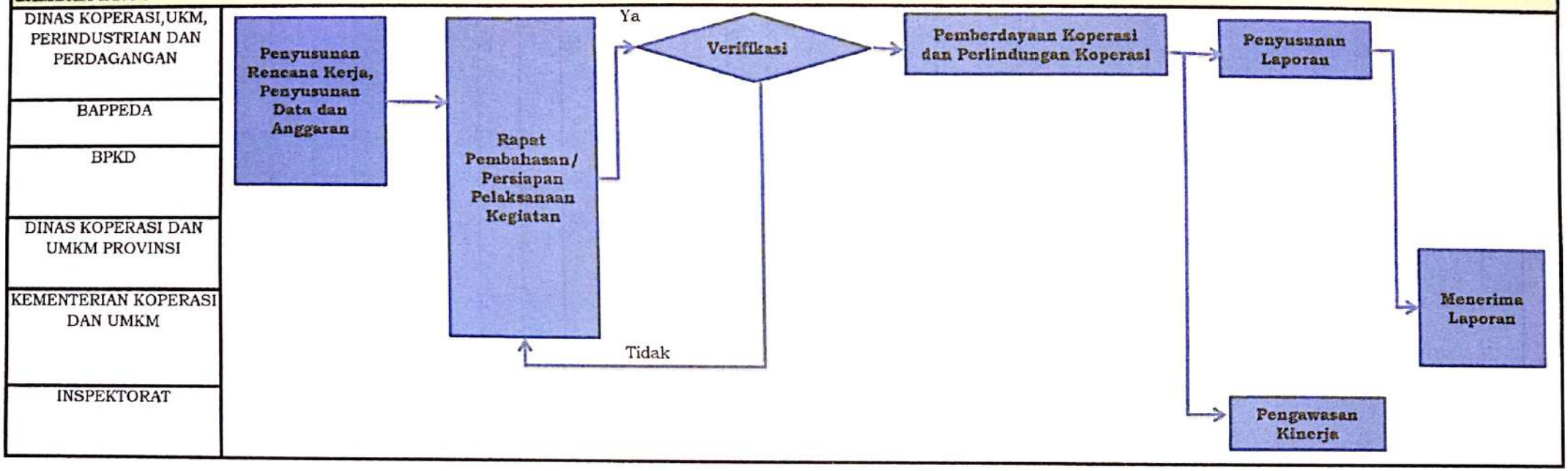
OPD	KABAG HUKUM

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
LAMBAR 21.03



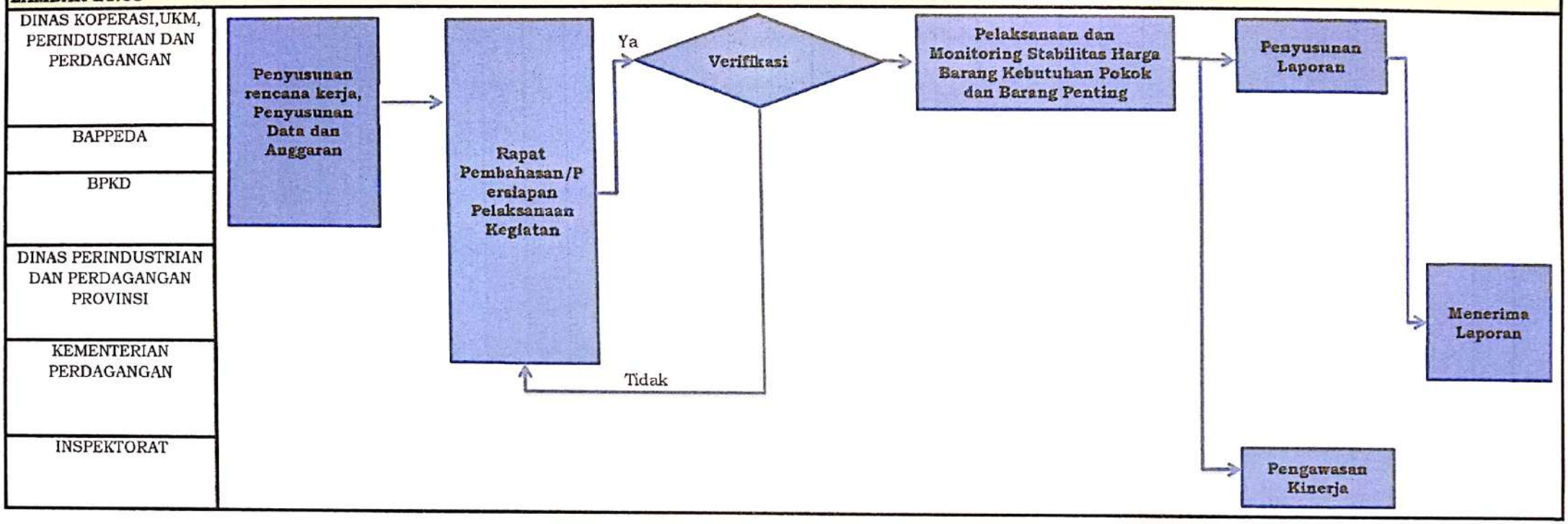
OPD | KABAG HUKUM

Pemberdayaan Koperasi dan Perlindungan Koperasi
LAMBAR 21.04



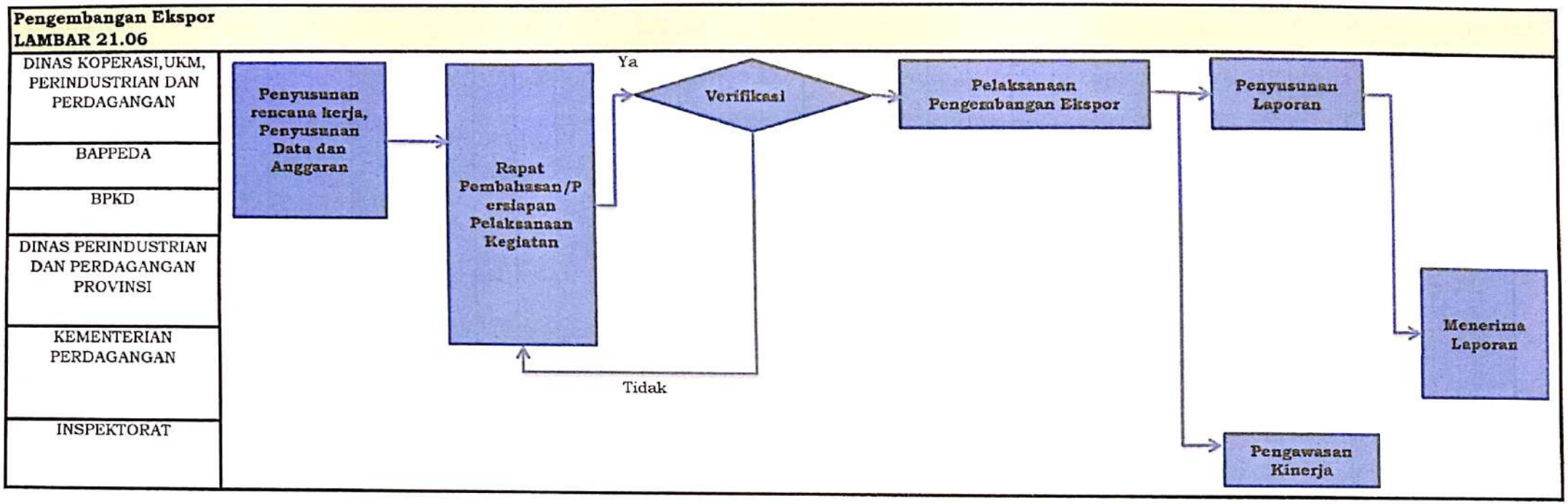
OPD | KABAG HUKUM

Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
LAMBAR 21.05



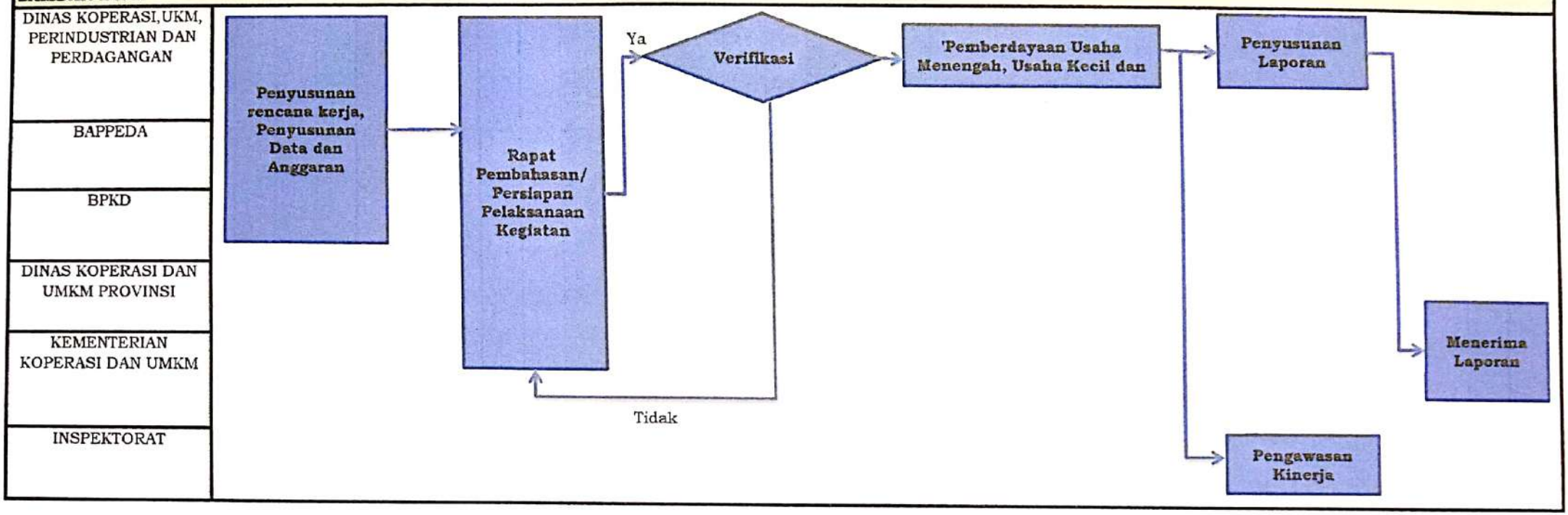
OPD | KABAG HUKUM

Pengembangan Ekspor
LAMBAR 21.06



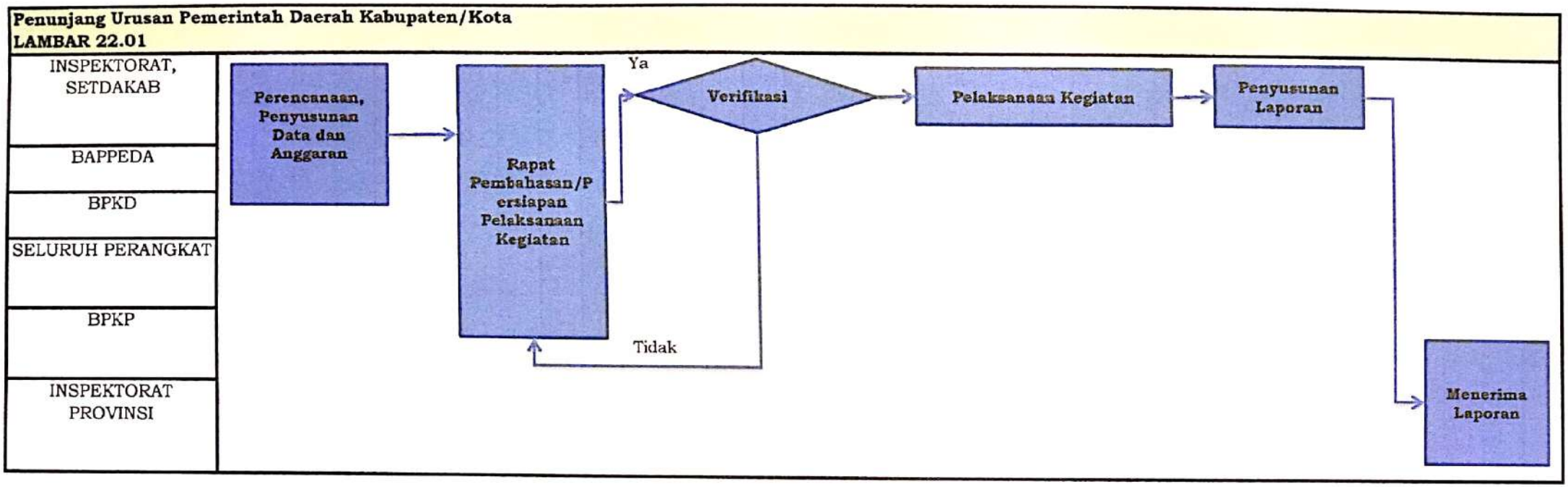
OPD | KABAG HUKUM

Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
LAMBAR 21.07



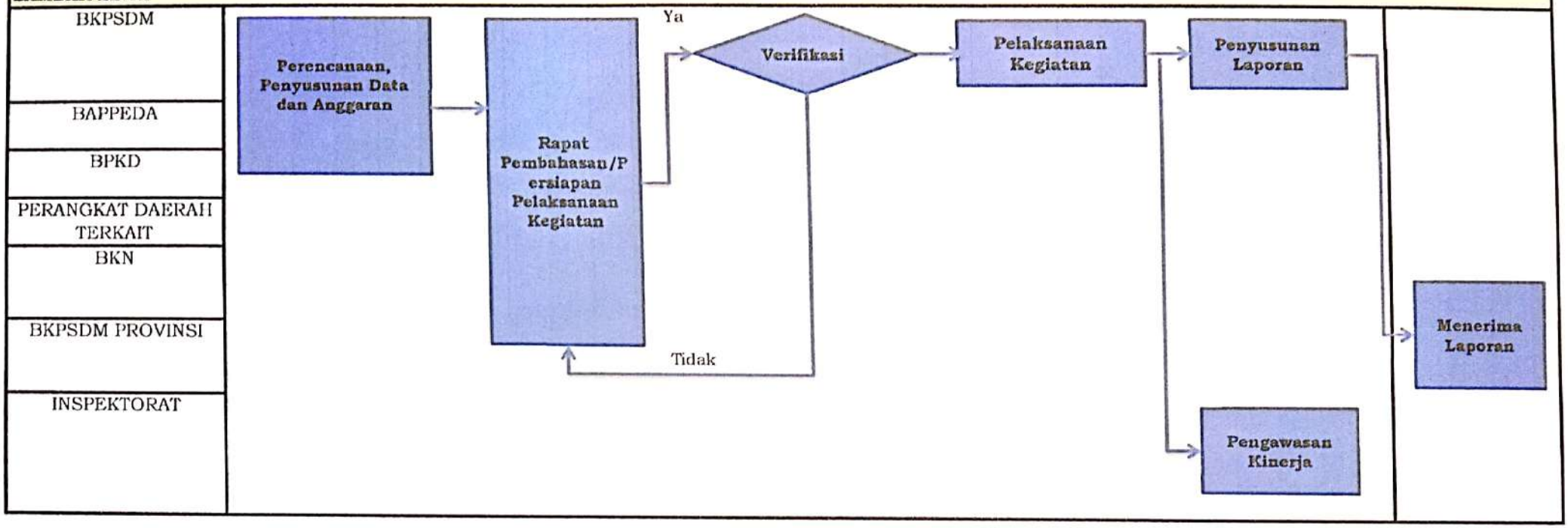
OPD | KABAG HUKUM

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
LAMBAR 22.01



OPD | KABAG HUKUM

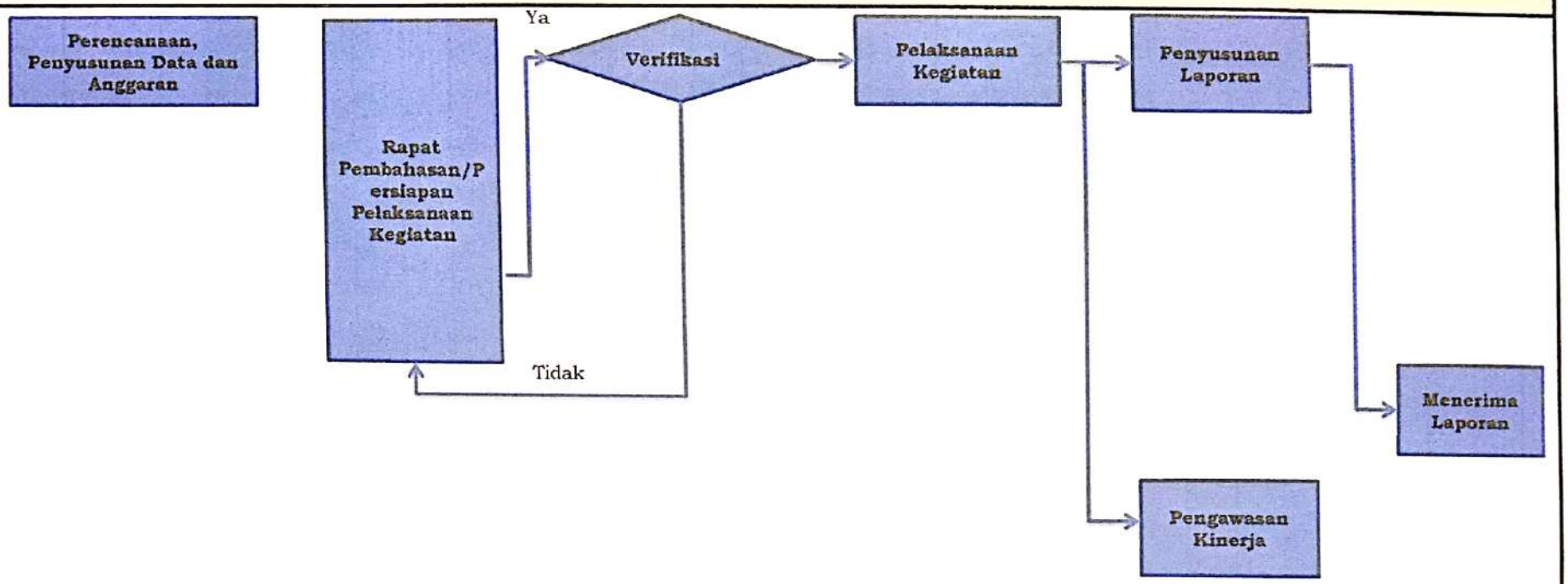
Kepegawaian Daerah
LAMBAR 22.02



OPD | KABAG HUKUM

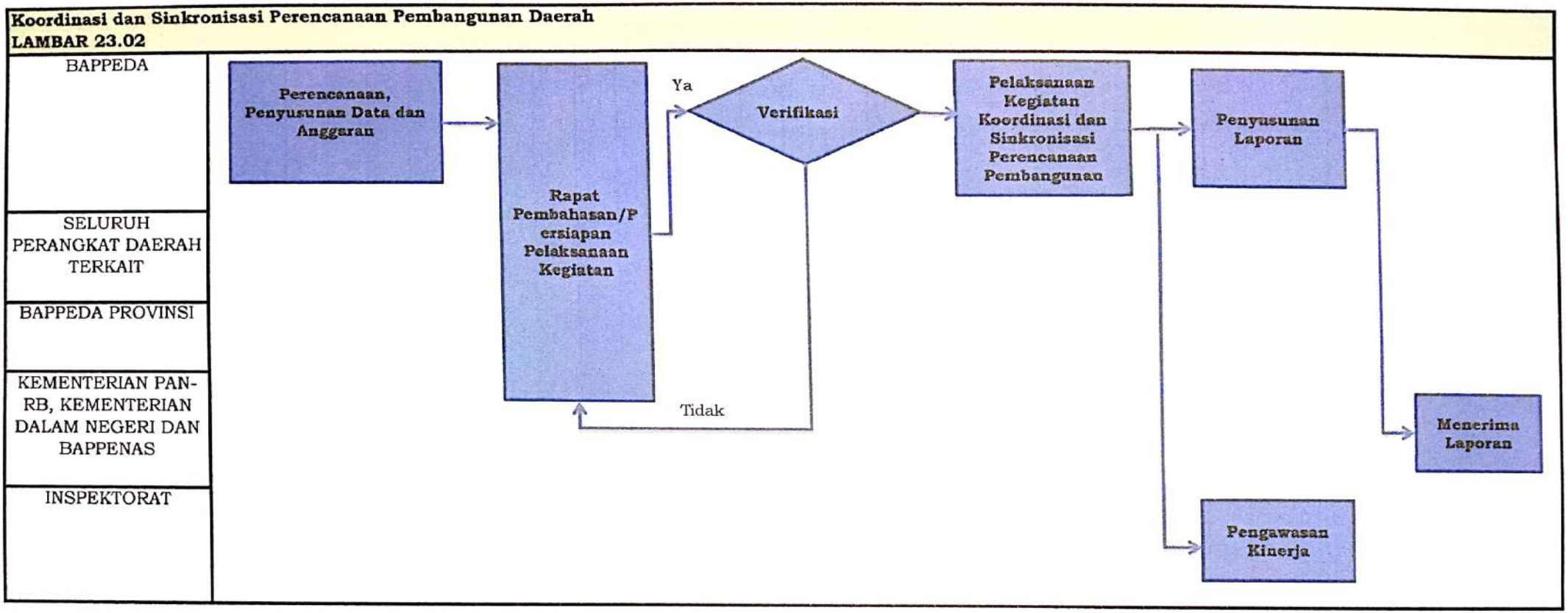
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
LAMBAR 23.01

BAPPEDA
SELURUH PERANGKAT DAERAH TERKAIT
BAPPEDA PROVINSI
KEMENTERIAN PAN-RB, KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BAPPENAS
INSPEKTORAT



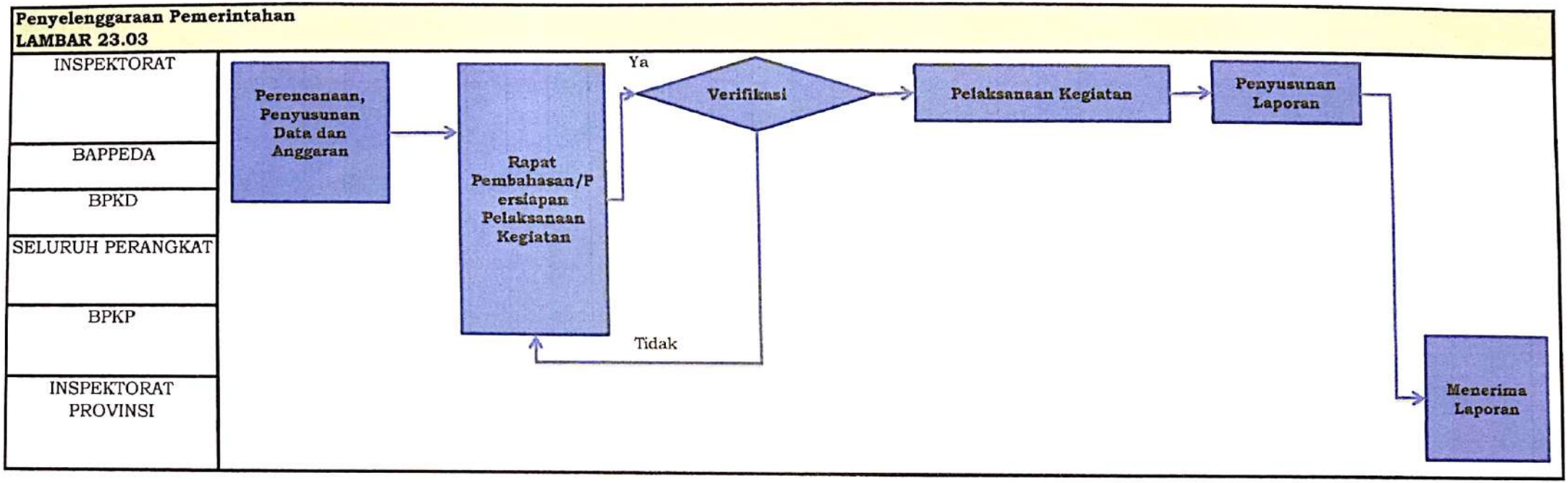
OPD	KABAG HUKUM

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
LAMBAR 23.02



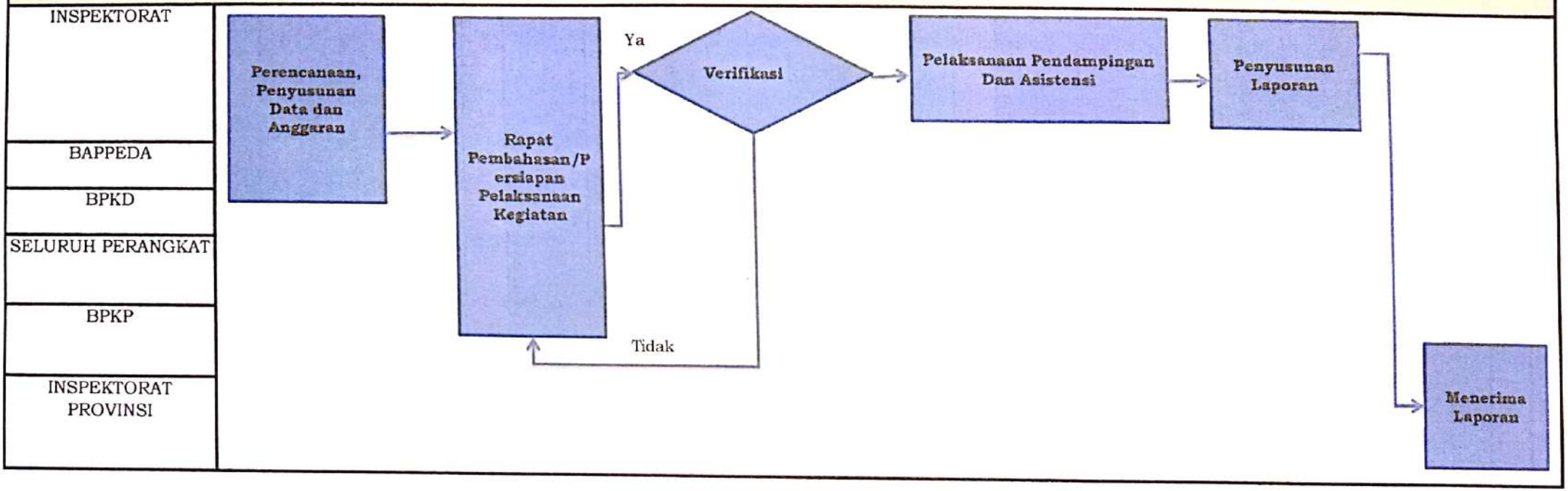
OPD | KABAG HUKUM

Penyelenggaraan Pemerintahan
LAMBAR 23.03



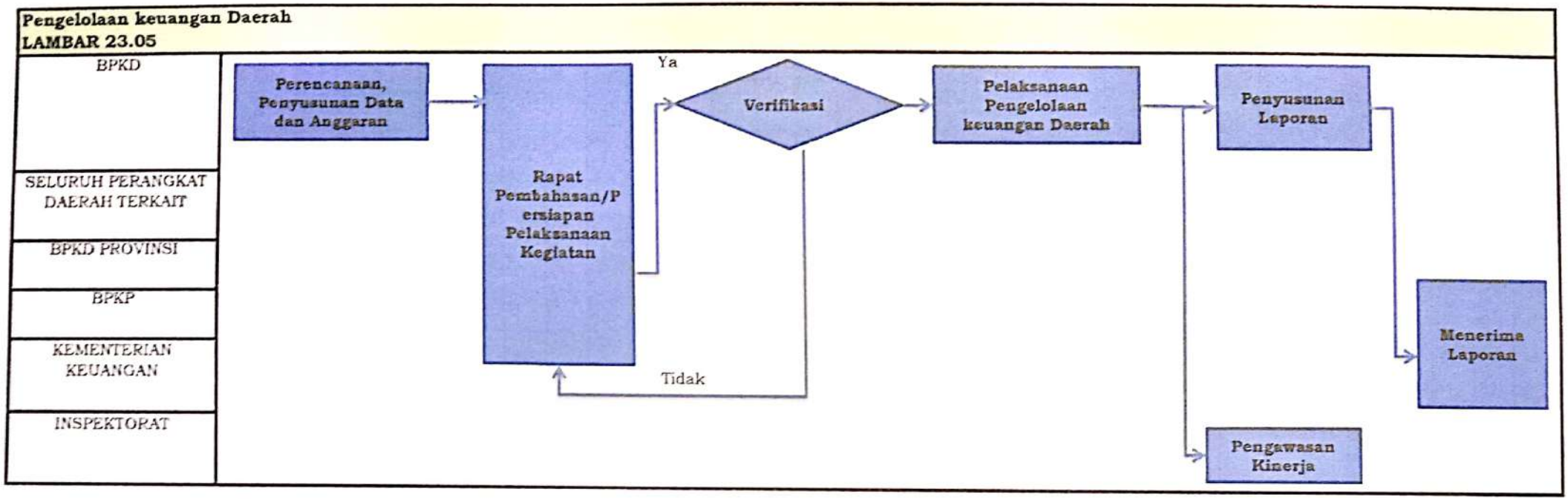
OPD | KABAG HUKUM

Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
LAMBAR 23.04



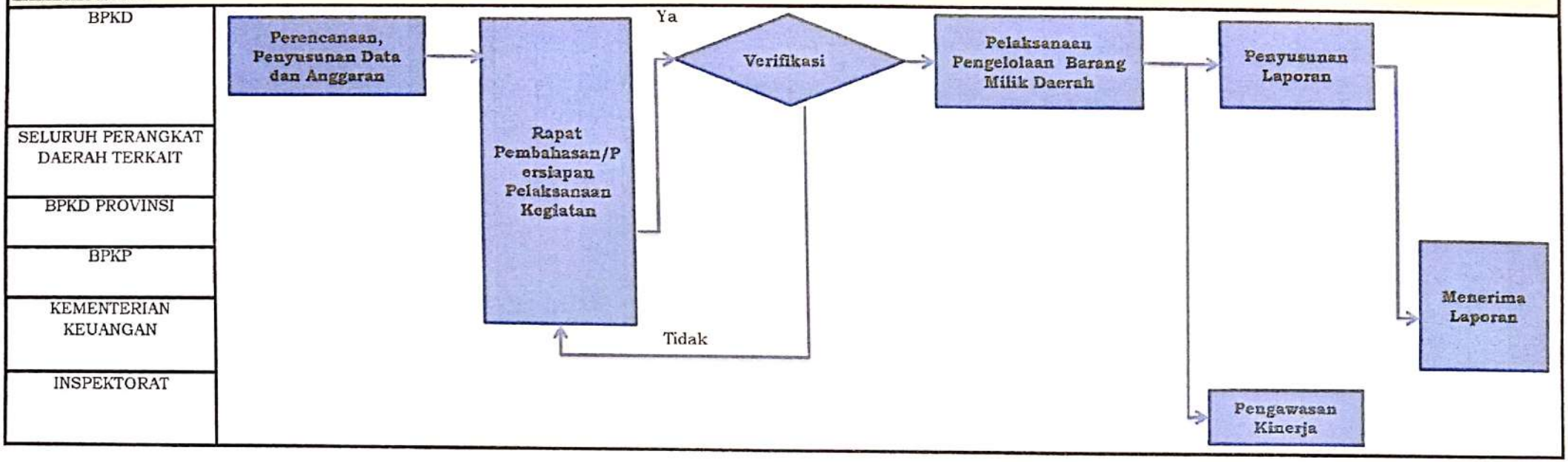
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan keuangan Daerah
LAMBAR 23.05



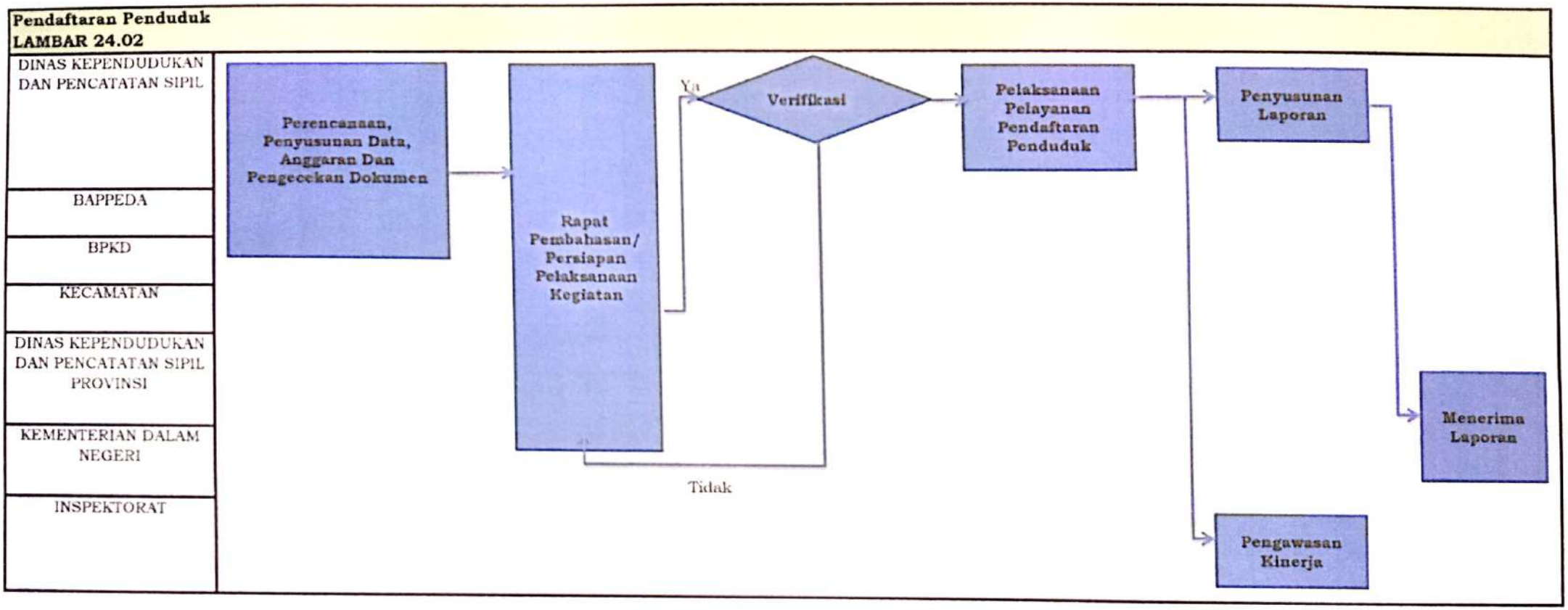
OPD | KABAG HUKUM

Pengelolaan Barang Milik Daerah
LAMBAR 23.06



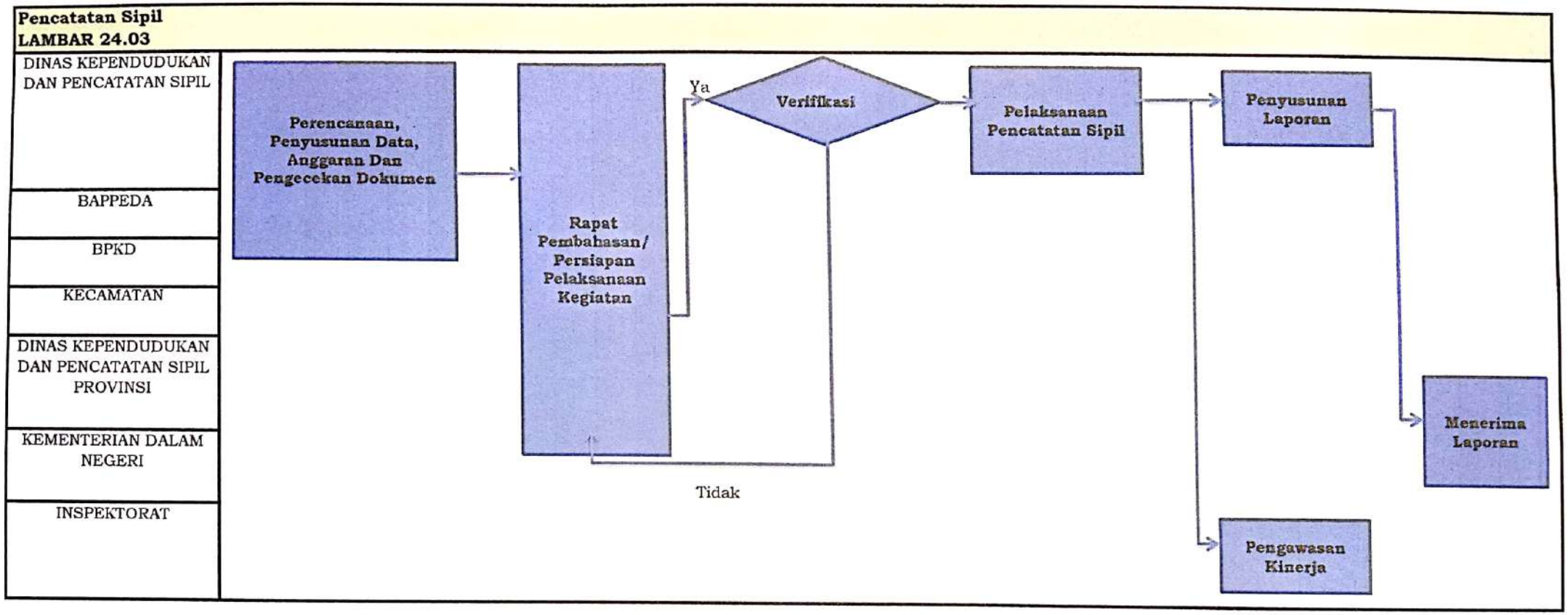
OPD | KABAG HUKUM

Pendaftaran Penduduk
LAMBAR 24.02



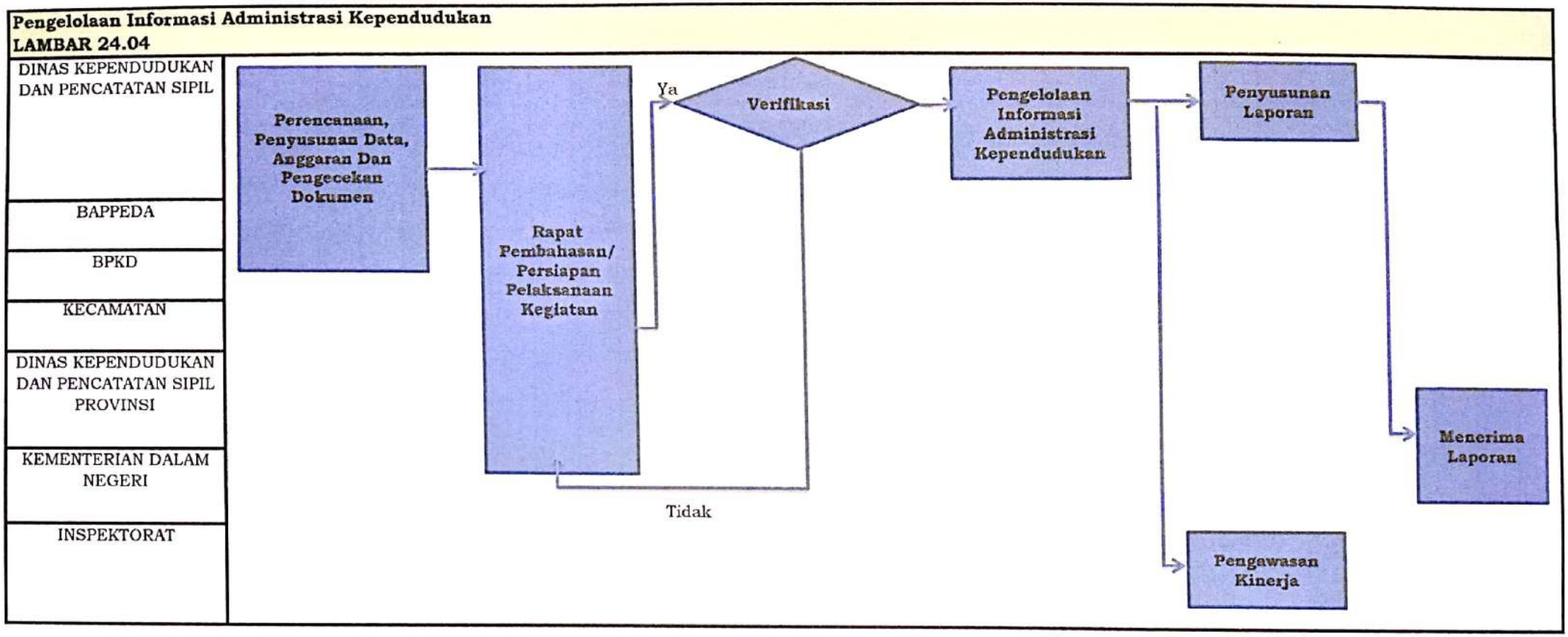
OPD | KABAG HUKUM

Pencatatan Sipil
LAMBAR 24.03



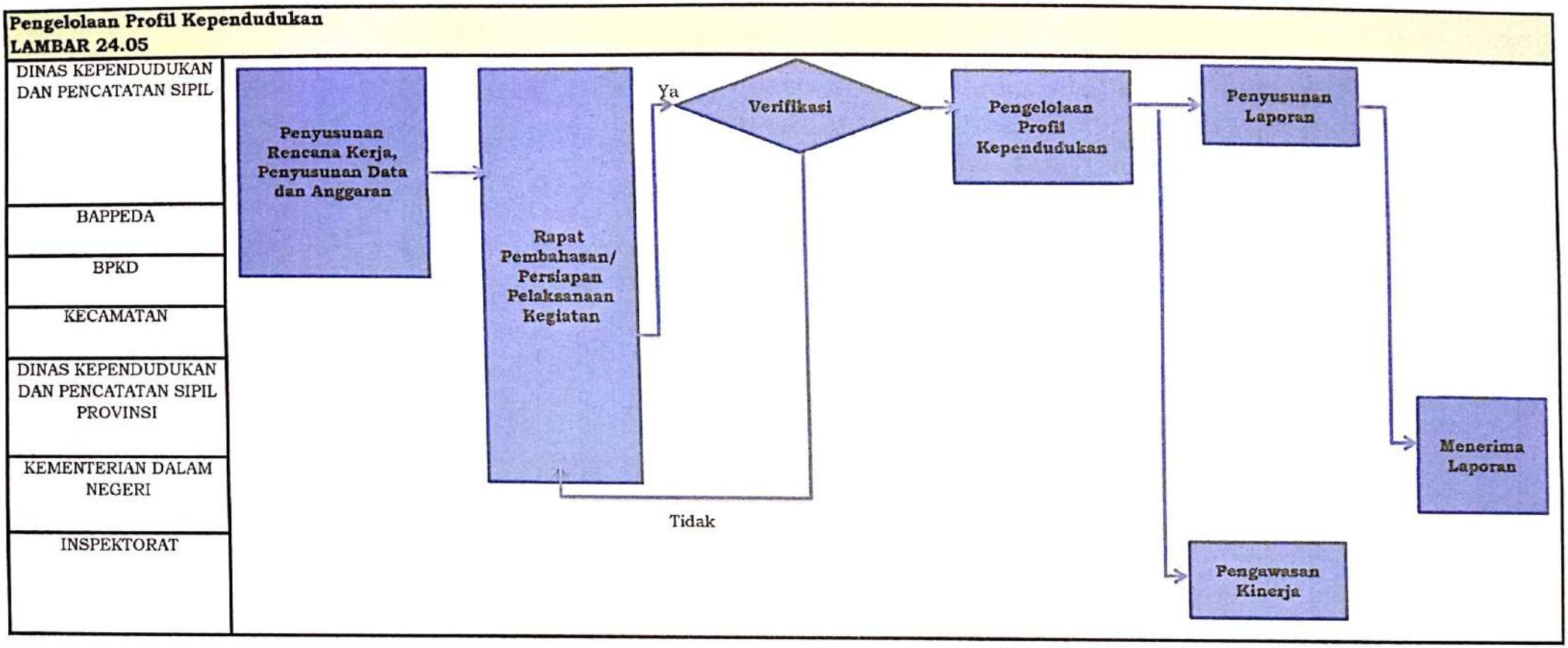
OPD	KABAG HUKUM

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
LAMBAR 24.04



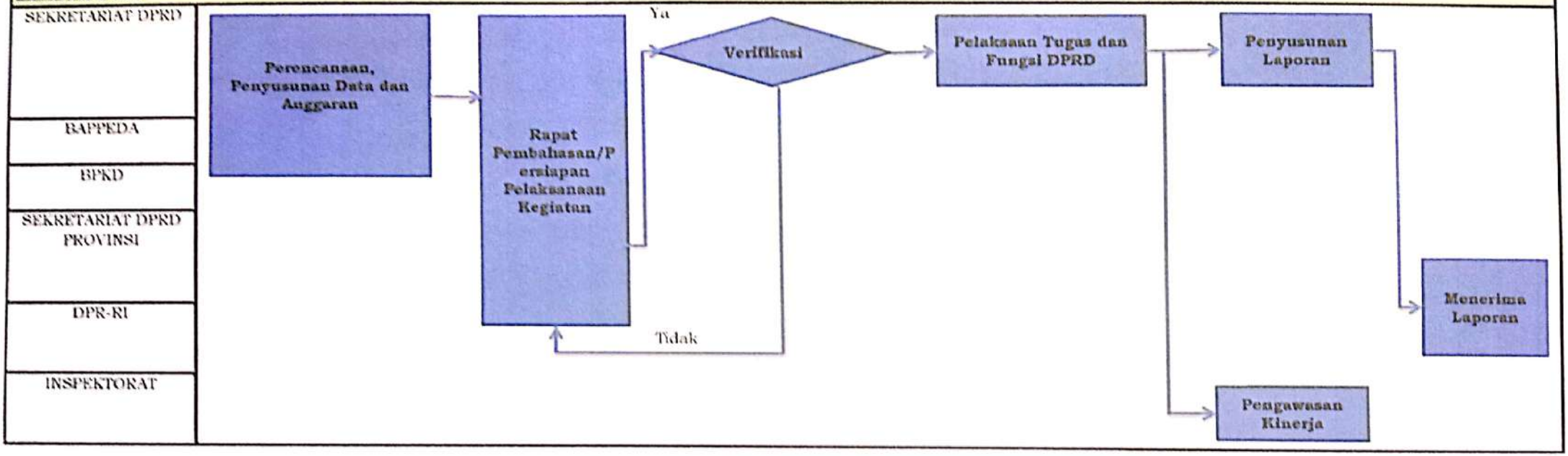
OPD KABAG HUKUM

Pengelolaan Profil Kependudukan
LAMBAR 24.05



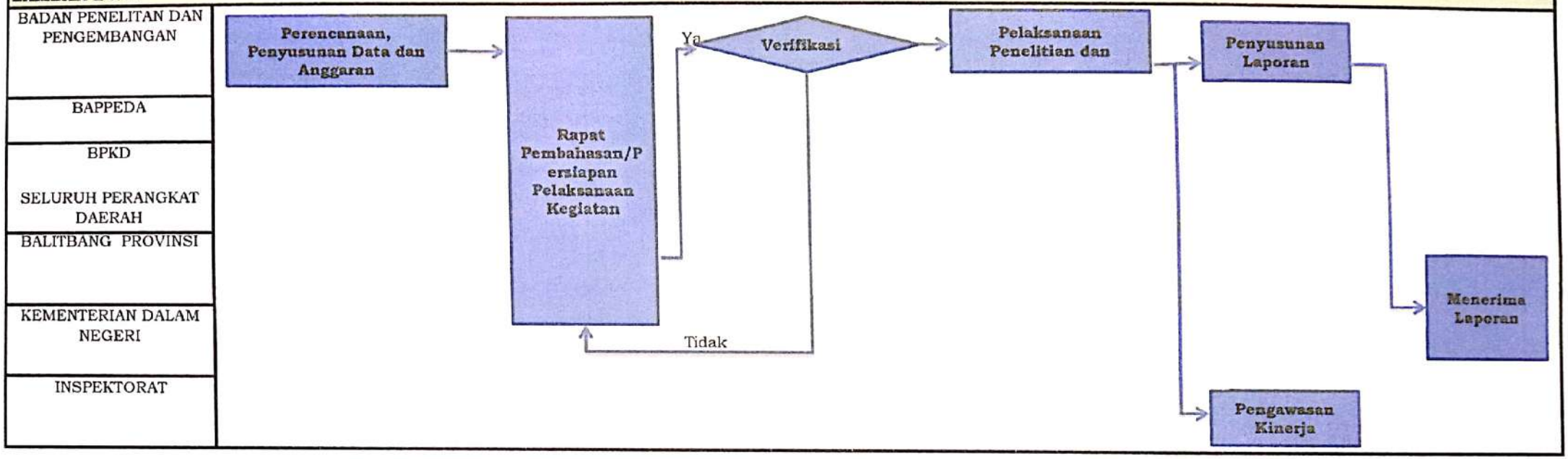
OPD | KABAG HUKUM

Dukungan Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD
LAMBAR 24.06



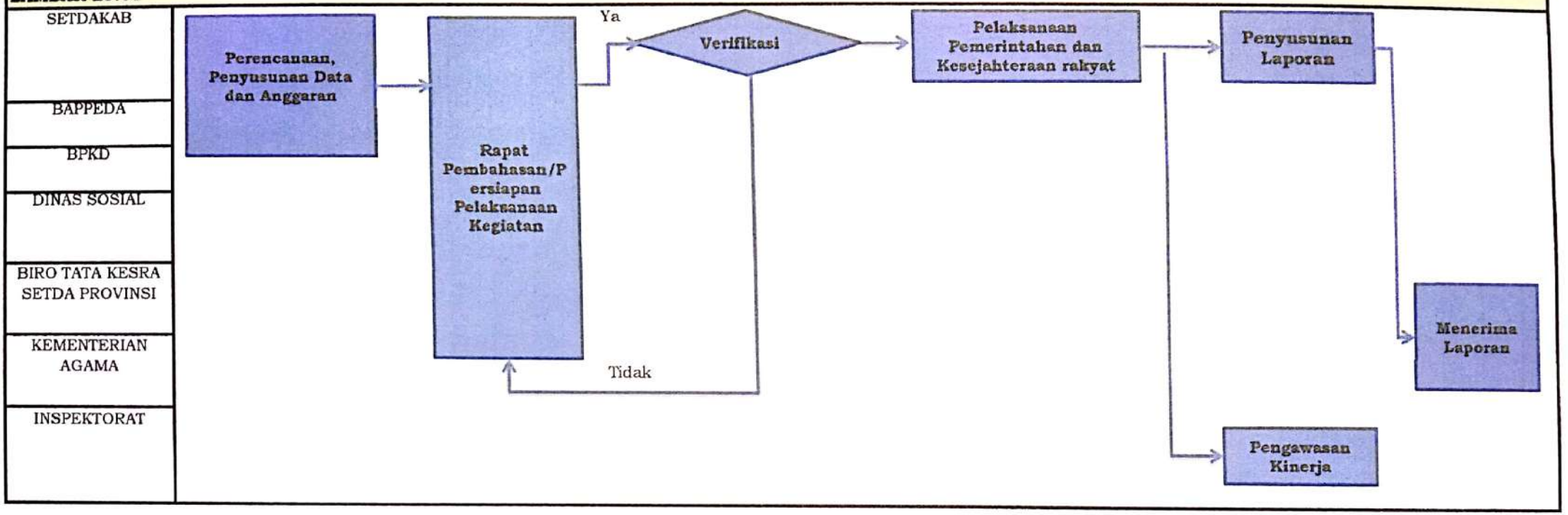
OPD | KABAG HUKUM

Penelitian dan Pengembangan
LAMBAR 24.07



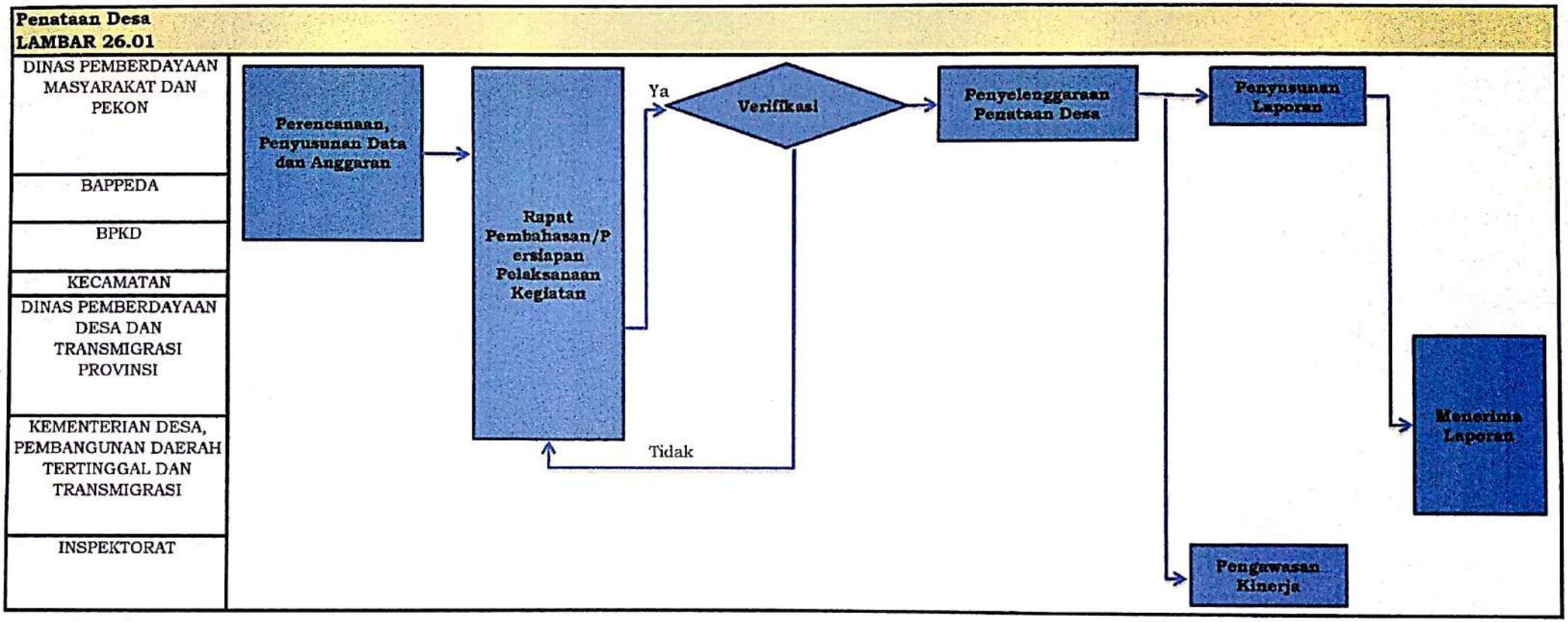
OPD | KABAG HUKUM

Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
LAMBAR 25.01



OPD | KABAG HUKUM

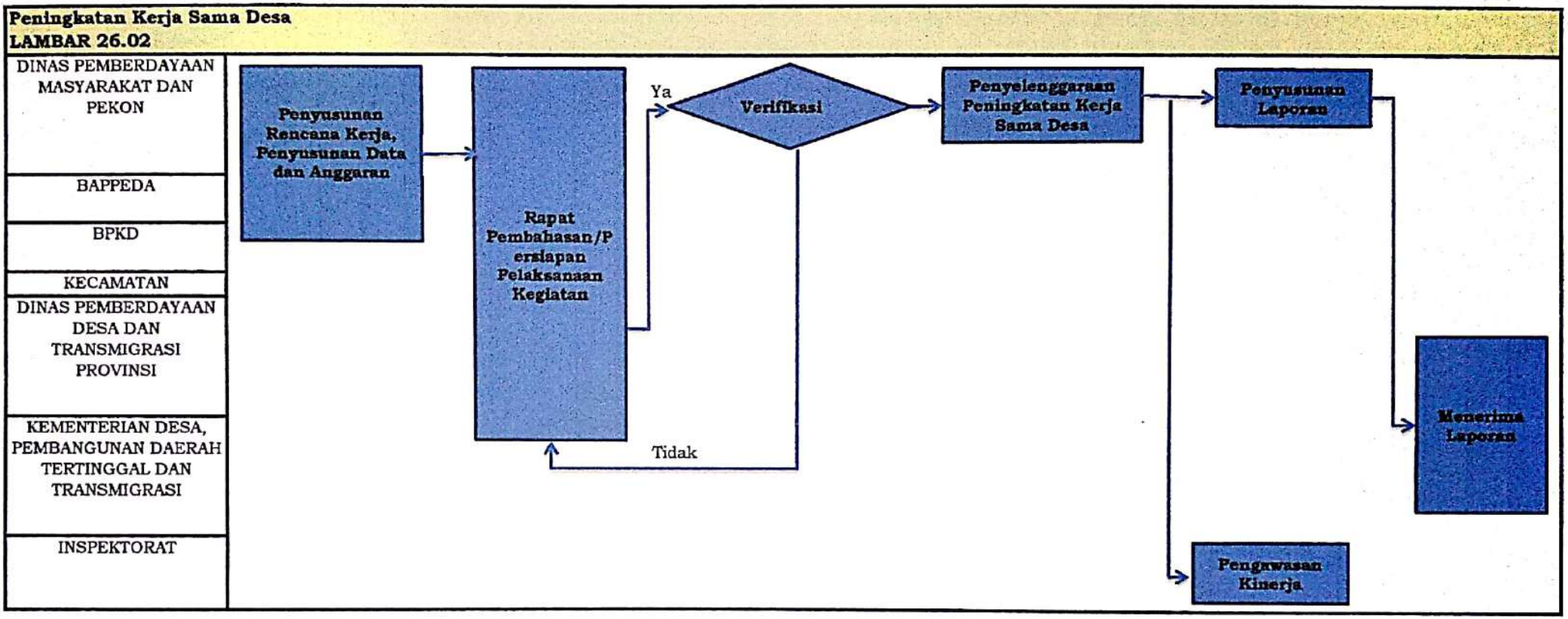
Penataan Desa
LAMBAR 26.01



OPD	KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Peningkatan Kerja Sama Desa
LAMBAR 26.02



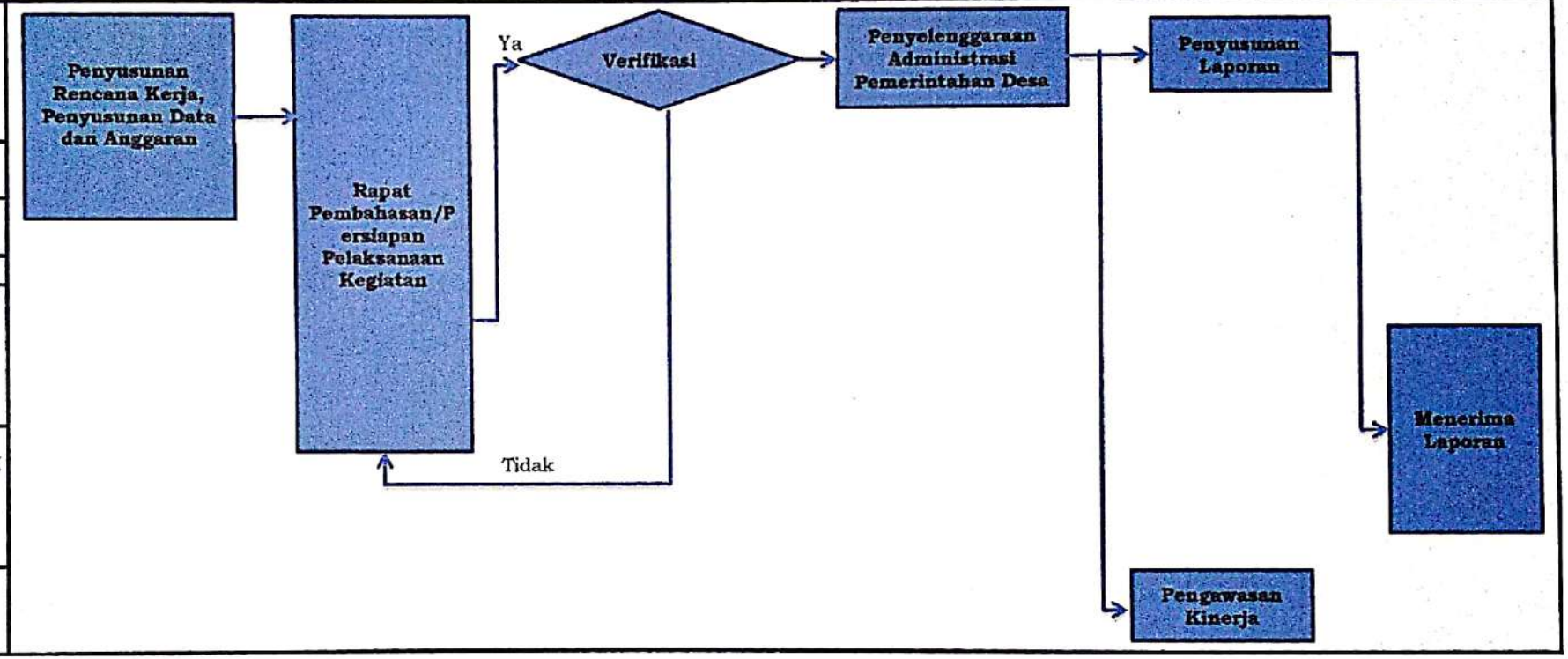
OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Administrasi Pemerintahan Desa

LAMBAR 26.03

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
BAPPEDA
BPKD
KECAMATAN
DINAS PEMBERDAYAAN DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
INSPEKTORAT



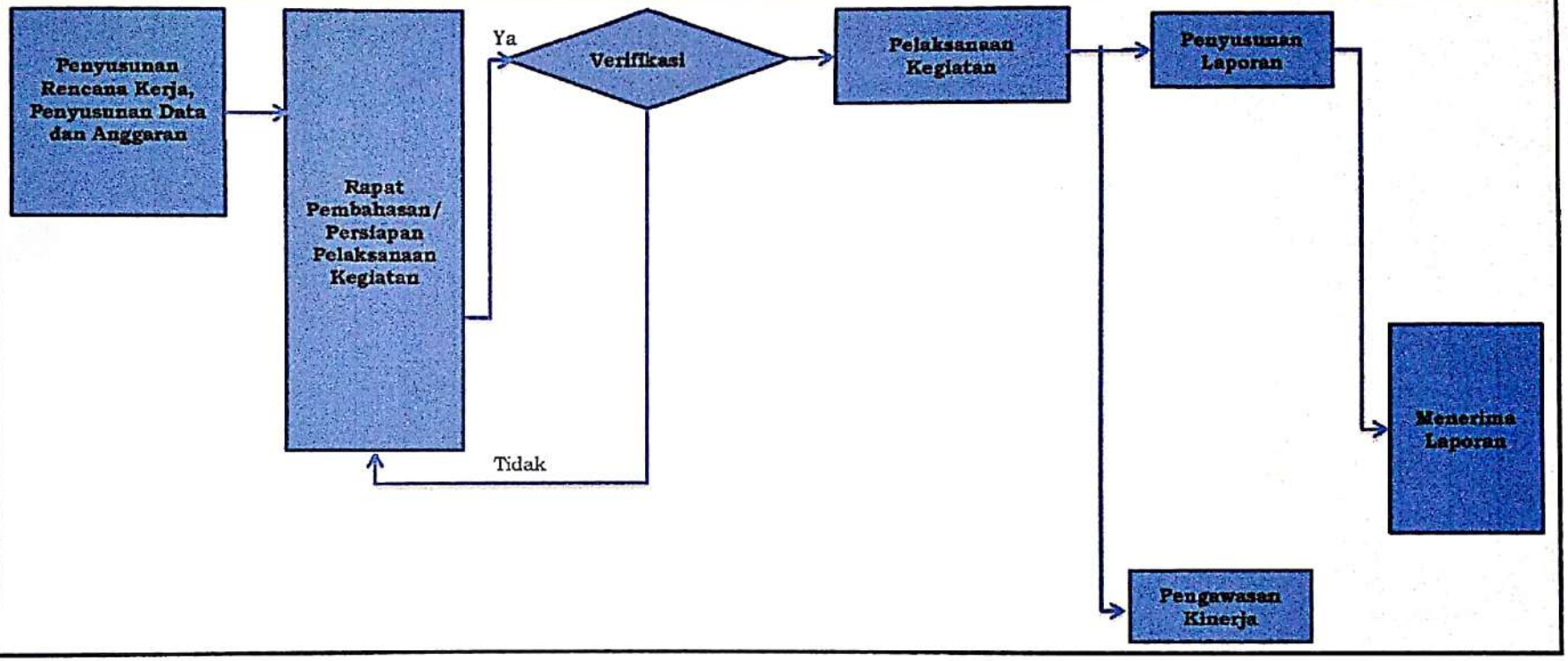
OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

LAMBAR 26.04

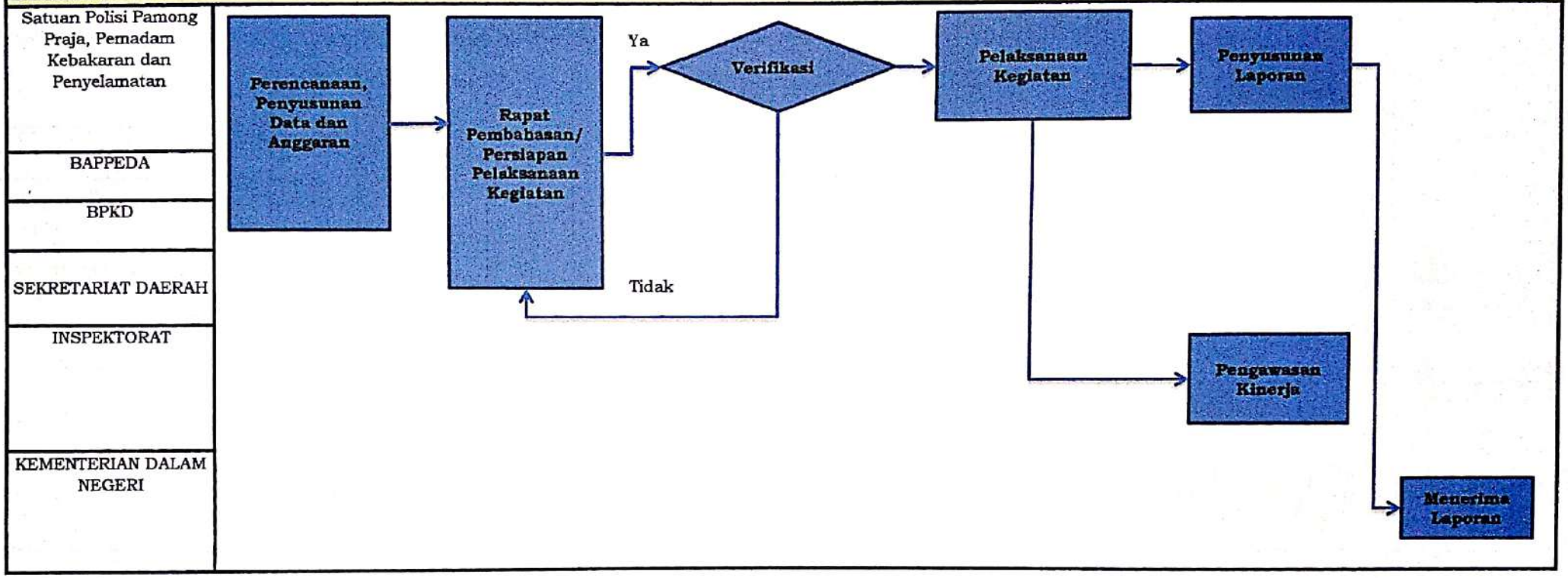
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
BAPPEDA
BPKD
KECAMATAN
DINAS PEMBERDAYAAN DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
INSPEKTORAT



OPD	KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

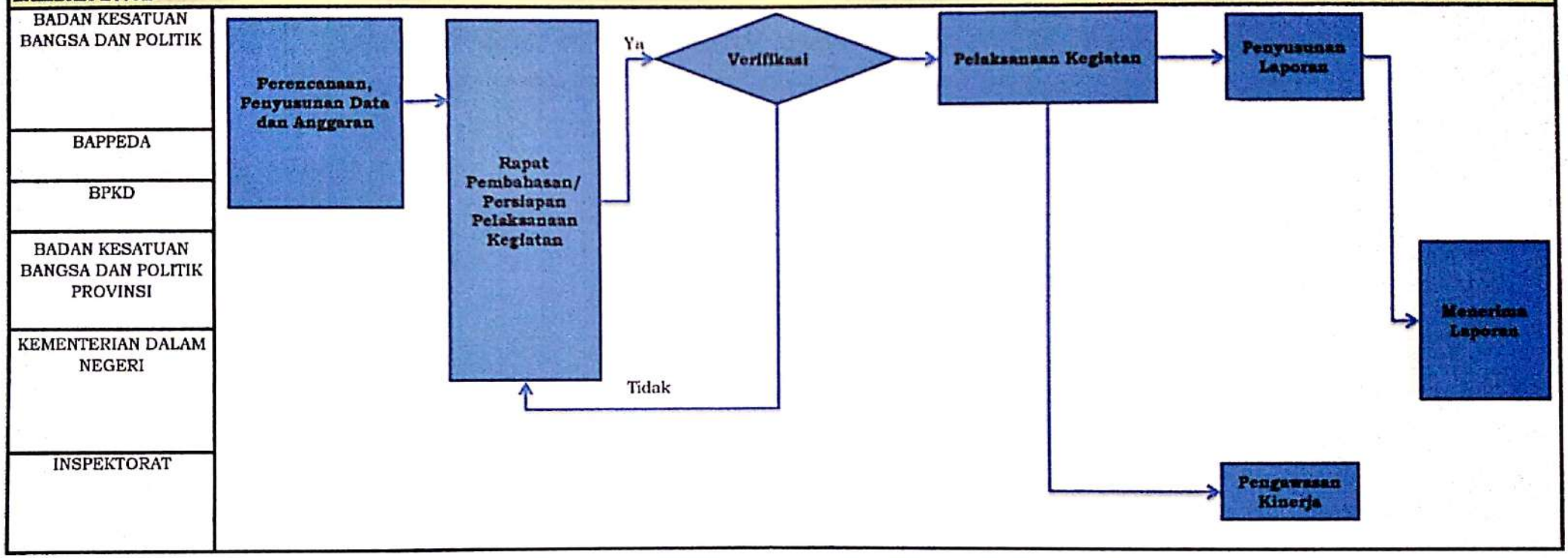
Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
LAMBAR 27.01



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
LAMBAR 27.02

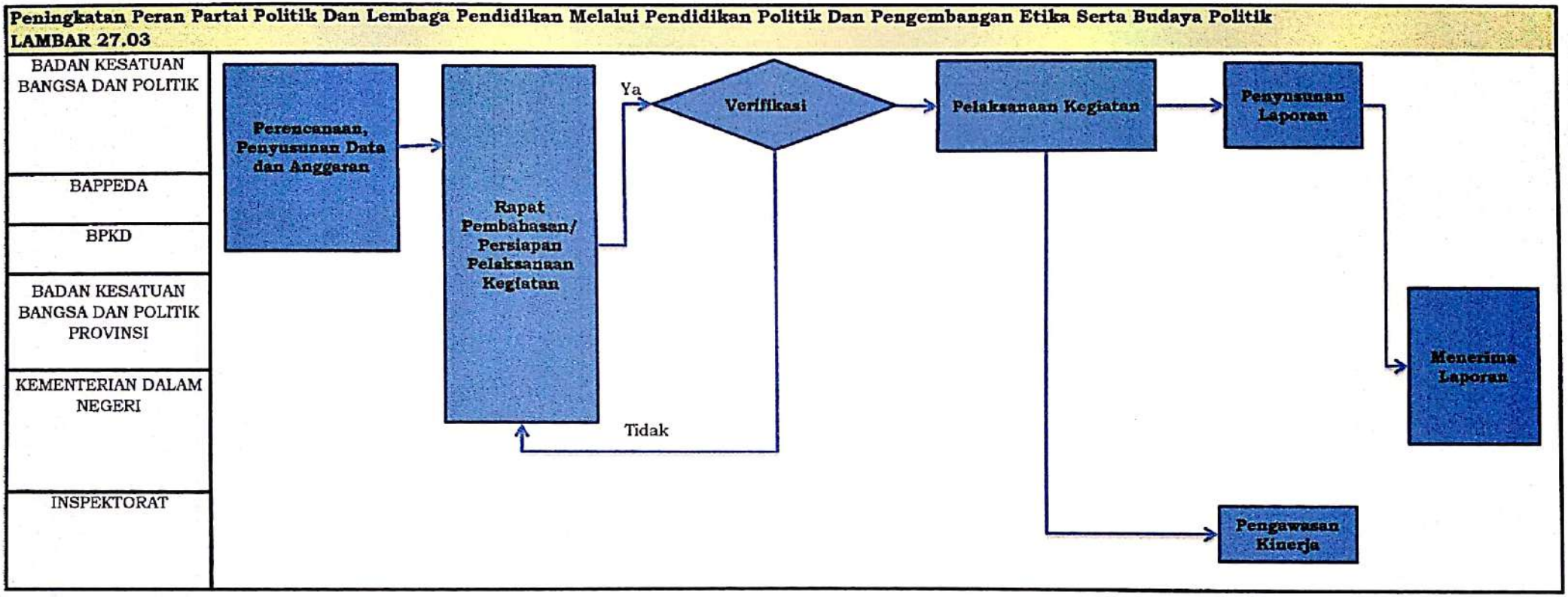


OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

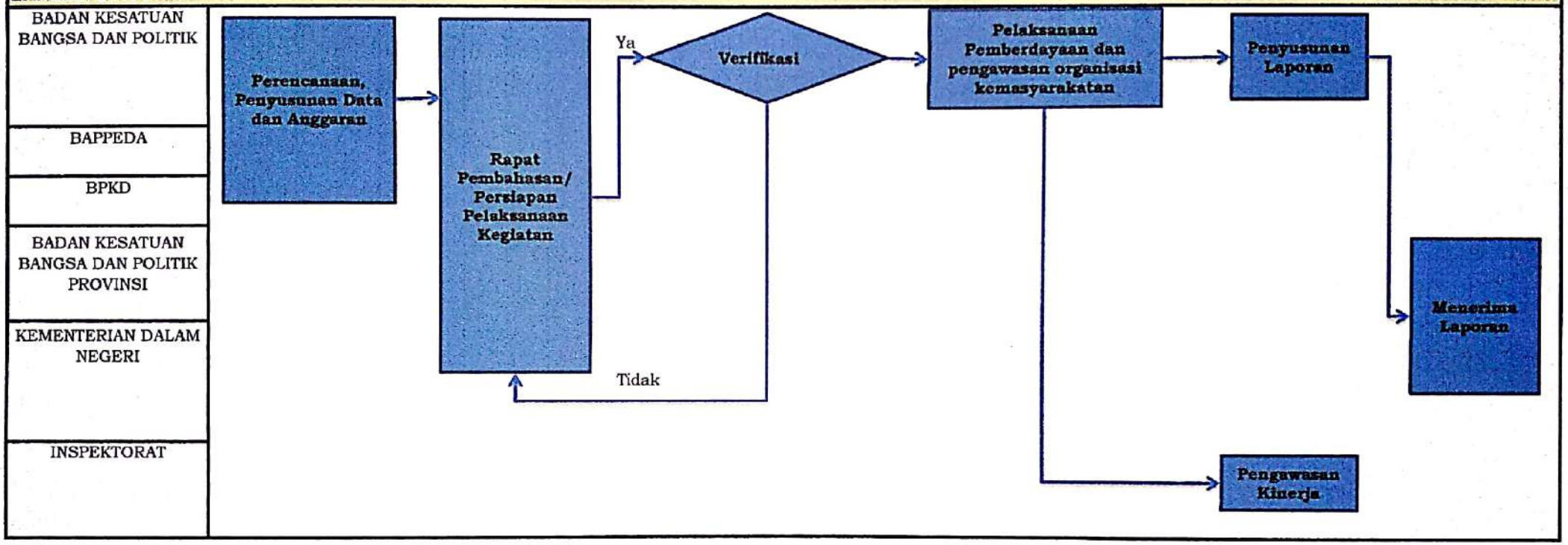
LAMBAR 27.03



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

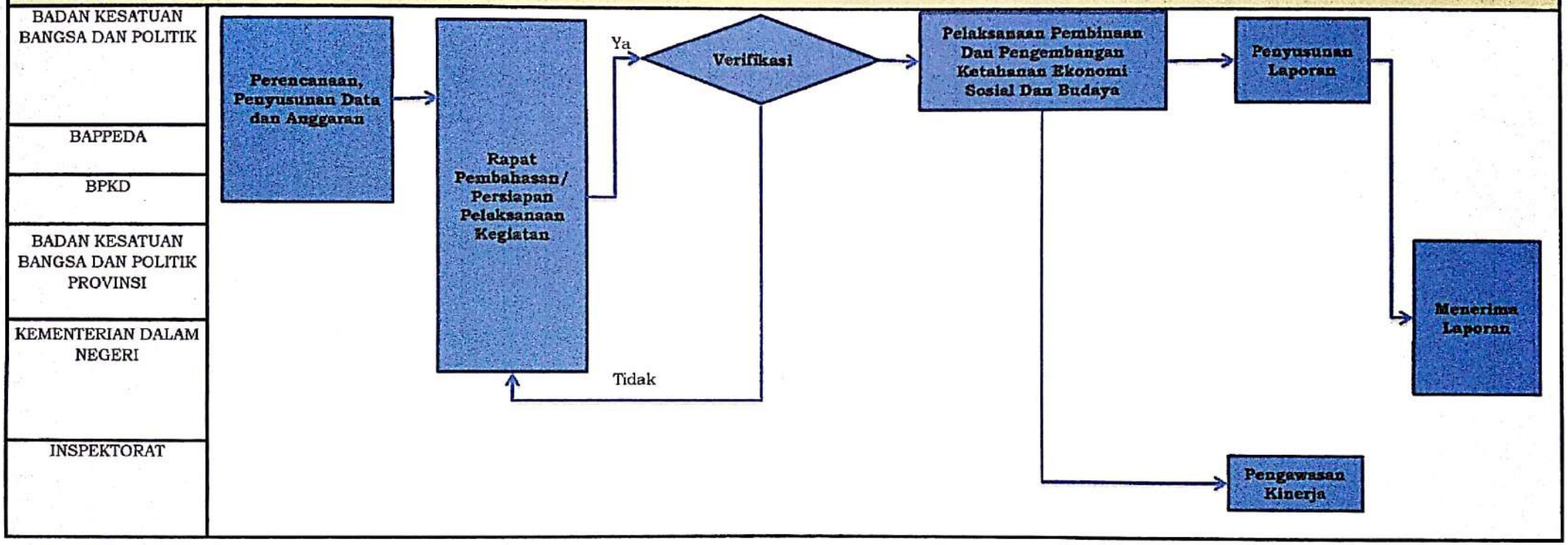
Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
LAMBAR 27.04



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
LAMBAR 27.05

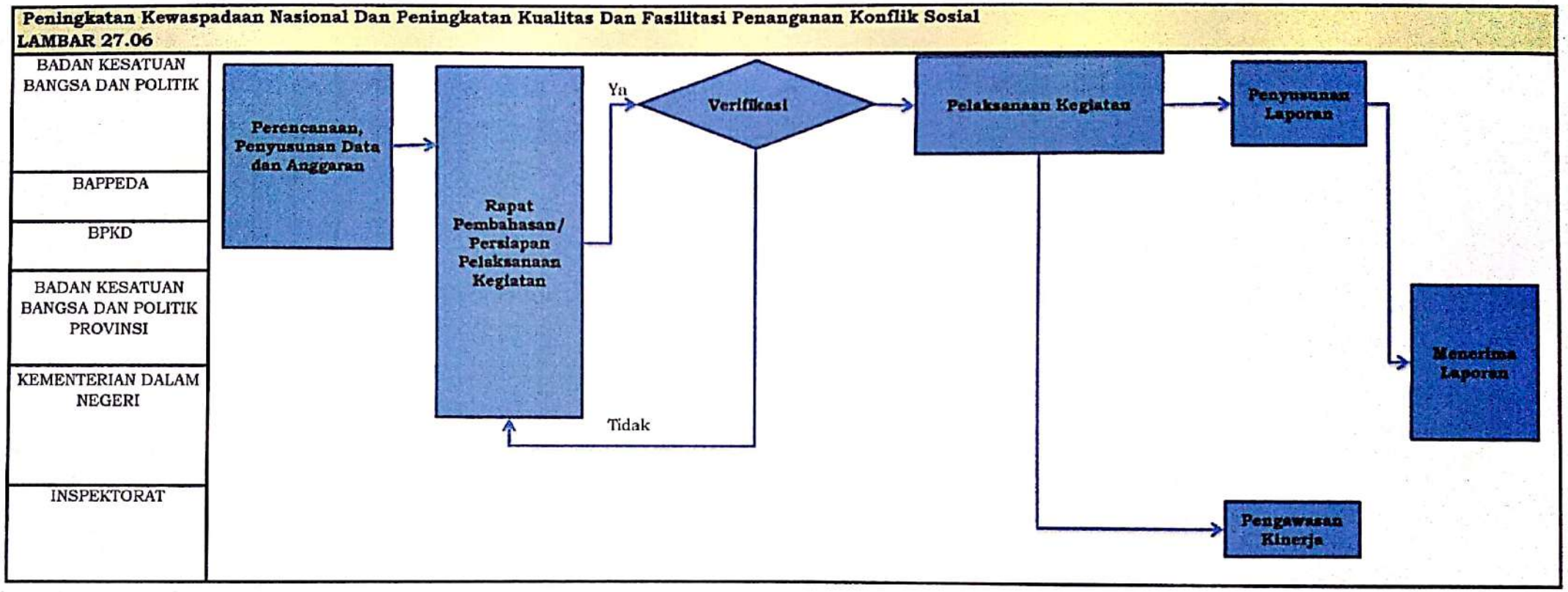


PD
KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

LAMBAR 27.06

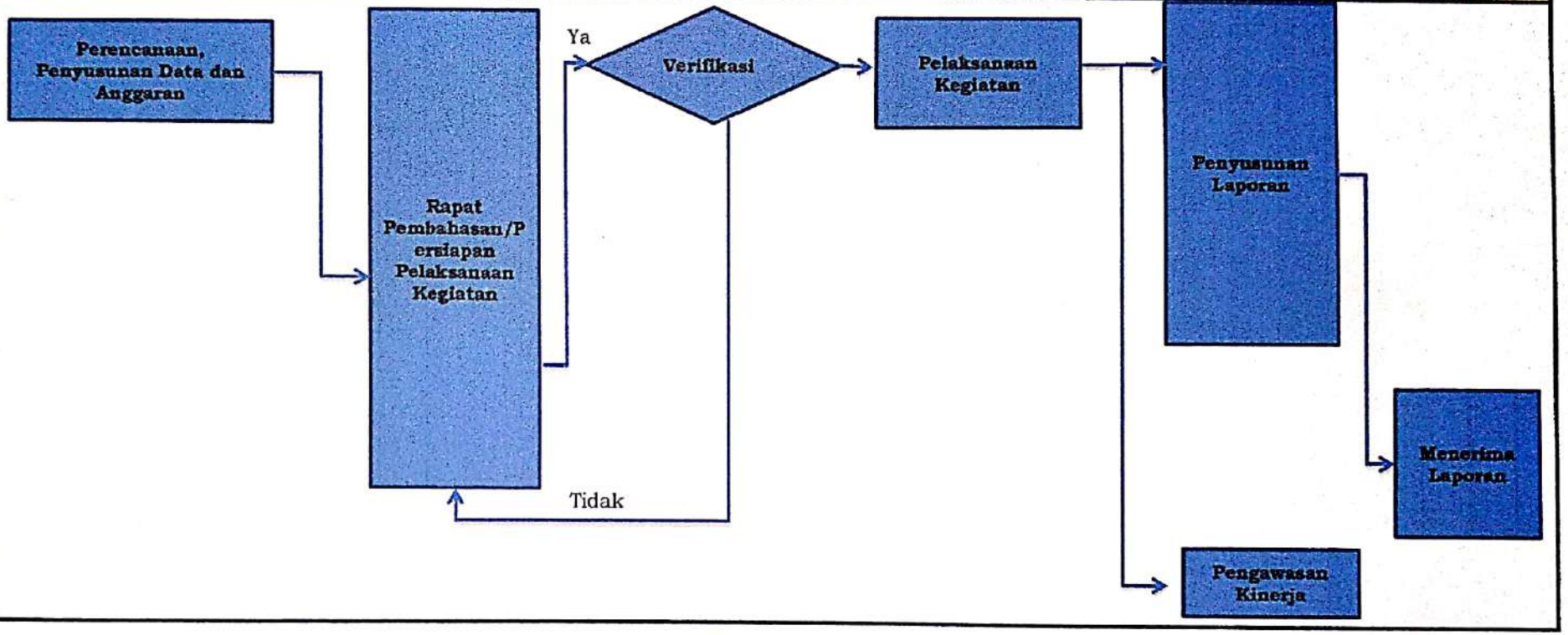


OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
LAMBAR 28.01

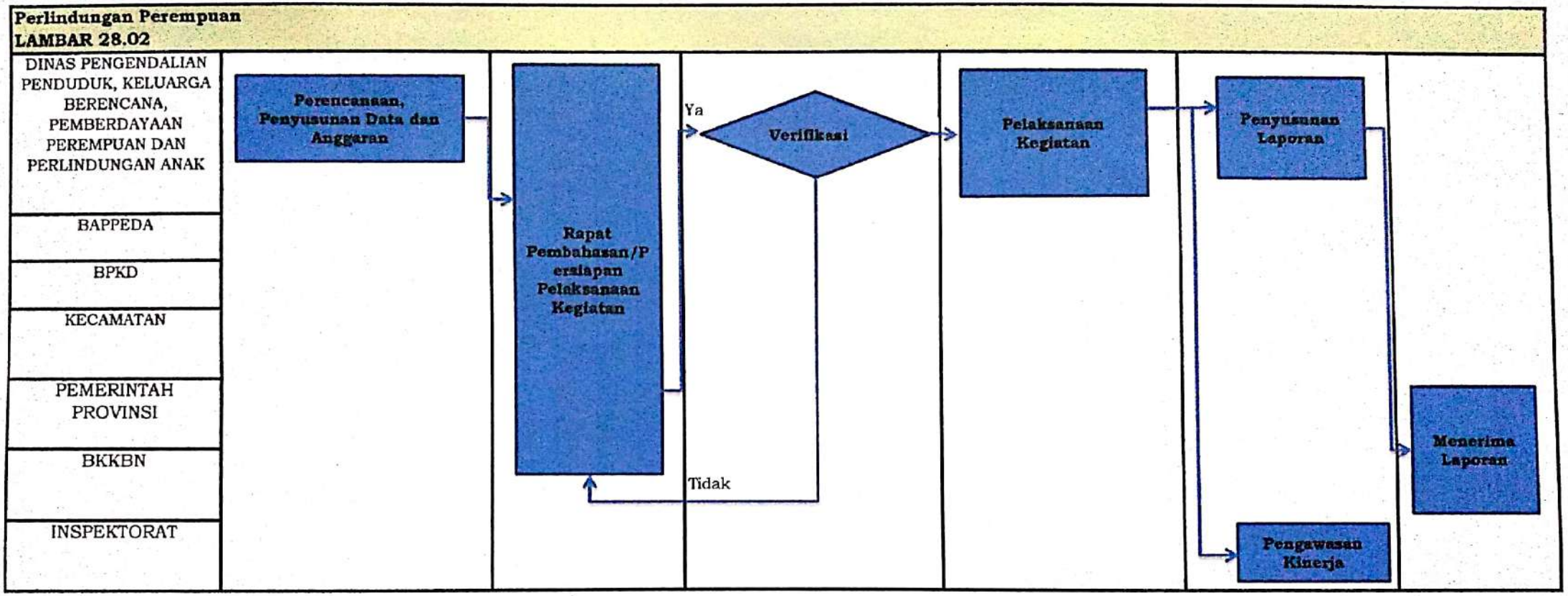
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAPPEDA
BPKD
PERANGKAT DAERAH TERKAIT
PEMERINTAH PROVINSI
BKKBN
INSPEKTORAT



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

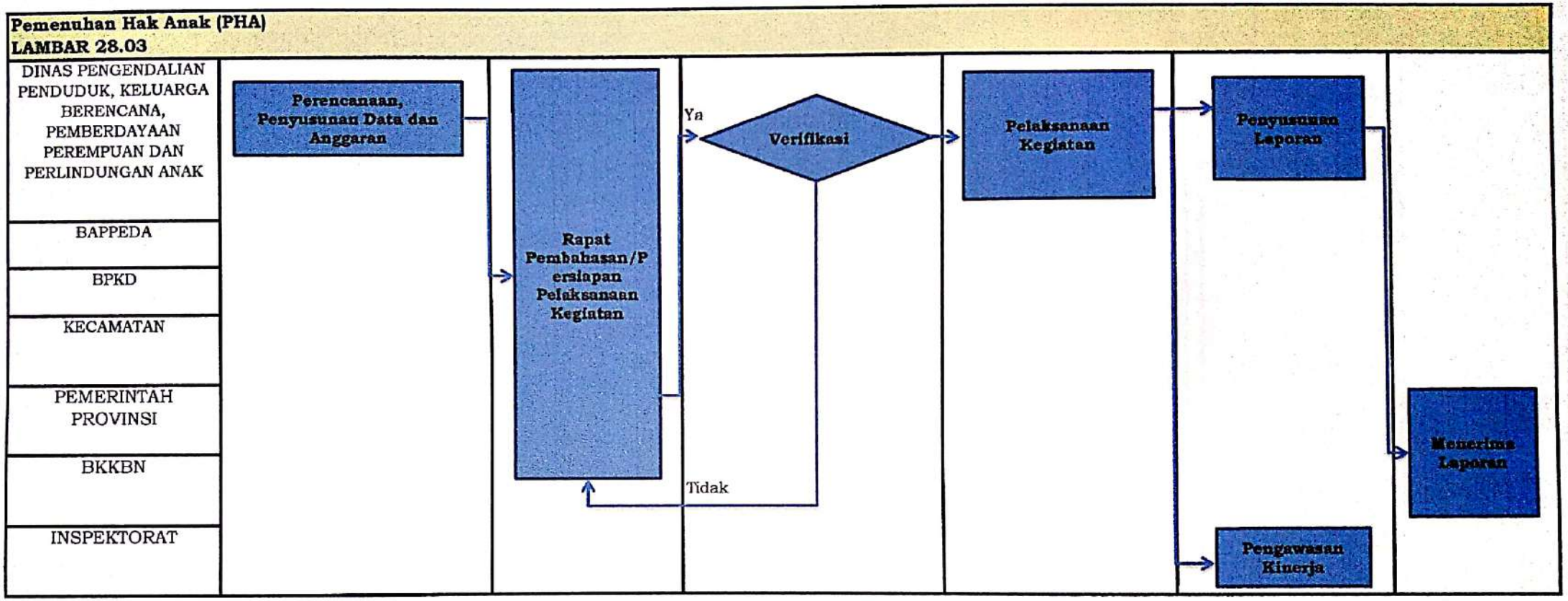
Perlindungan Perempuan
LAMBAR 28.02



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

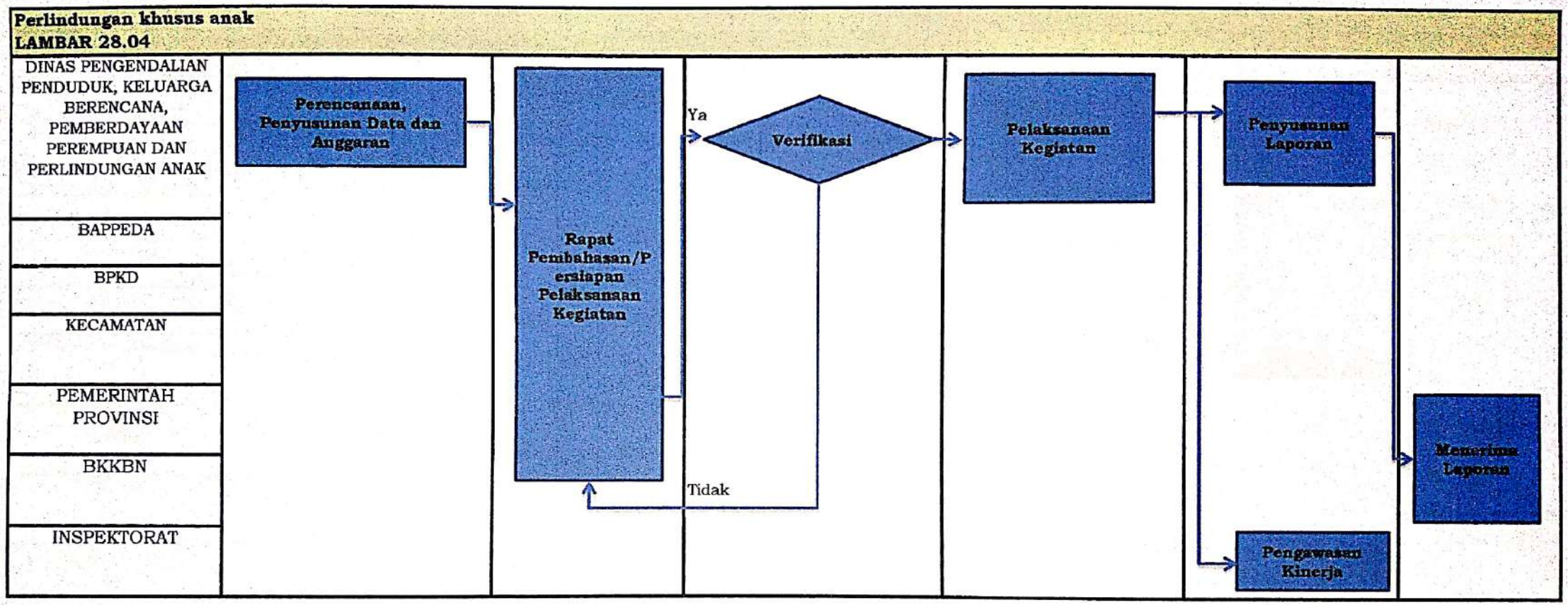
Pemenuhan Hak Anak (PHA)
LAMBAR 28.03



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Perlindungan khusus anak
LAMBAR 28.04

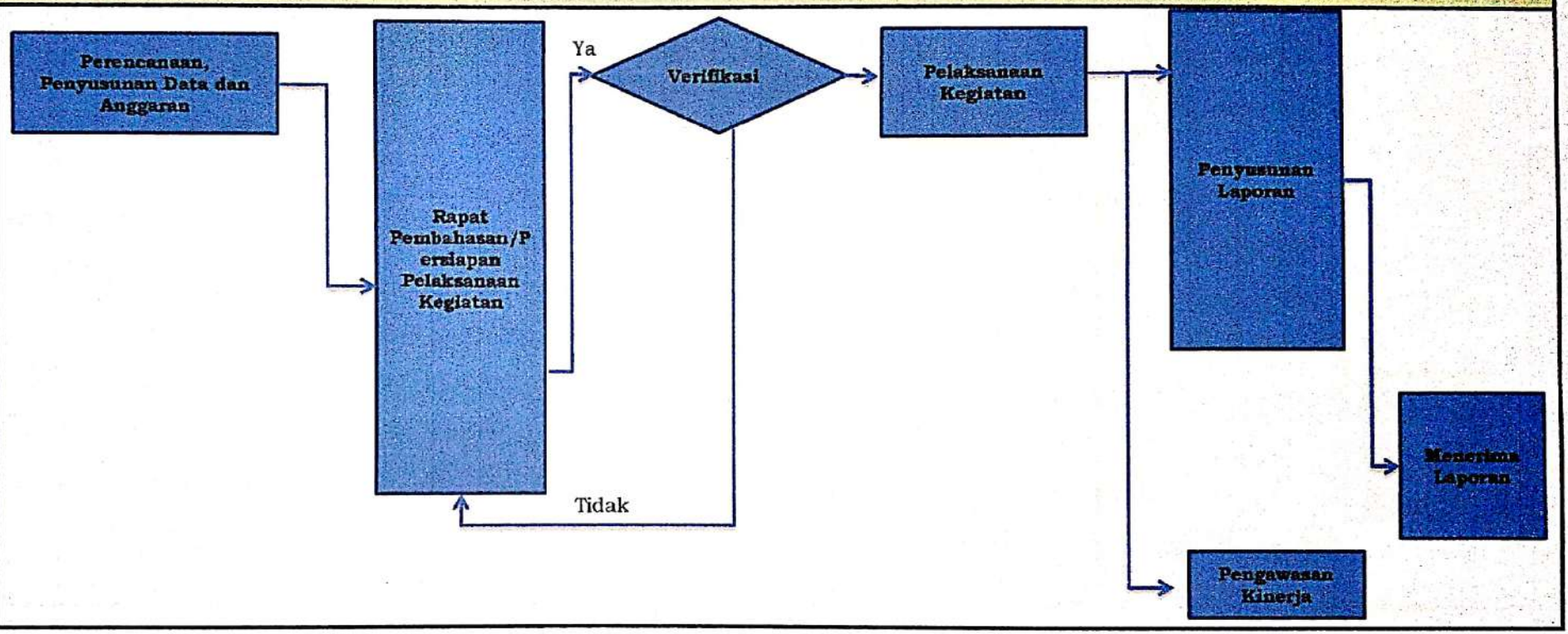


OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
LAMBAR 29.01

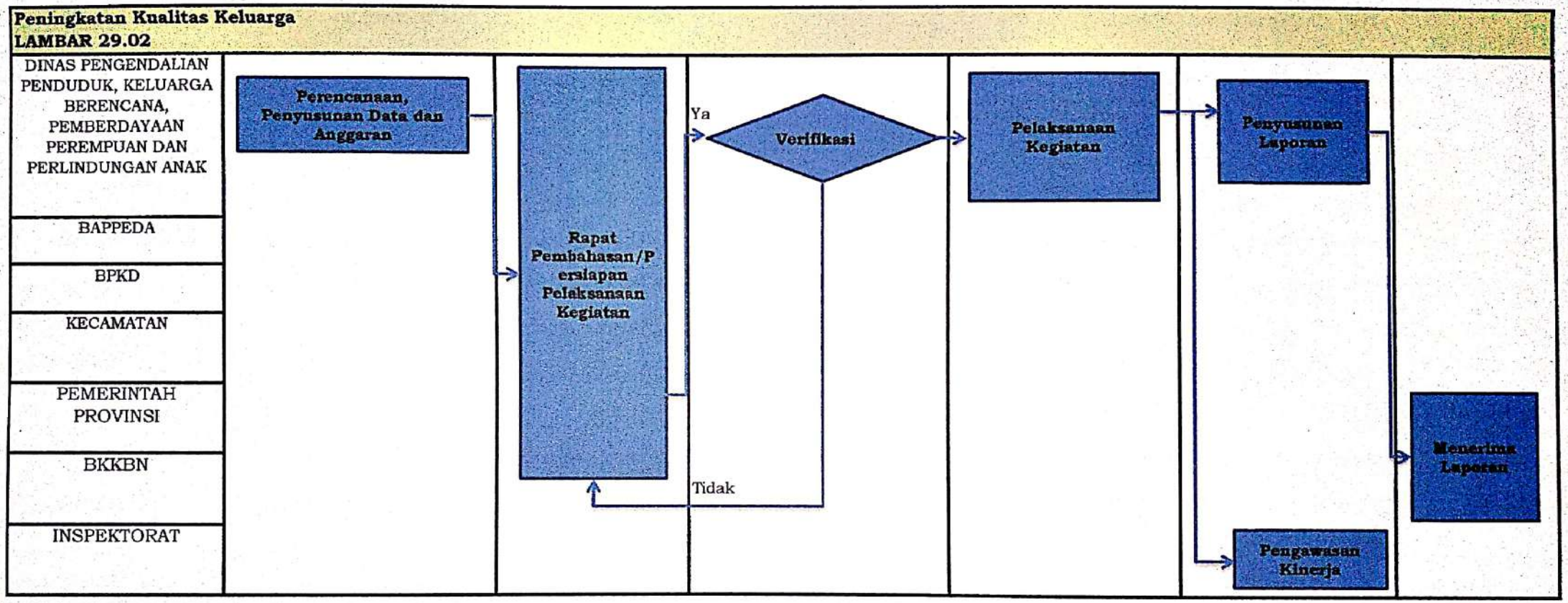
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAPPEDA
BPKD
PERANGKAT DAERAH TERKAIT
PEMERINTAH PROVINSI
BKKBN
INSPEKTORAT



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

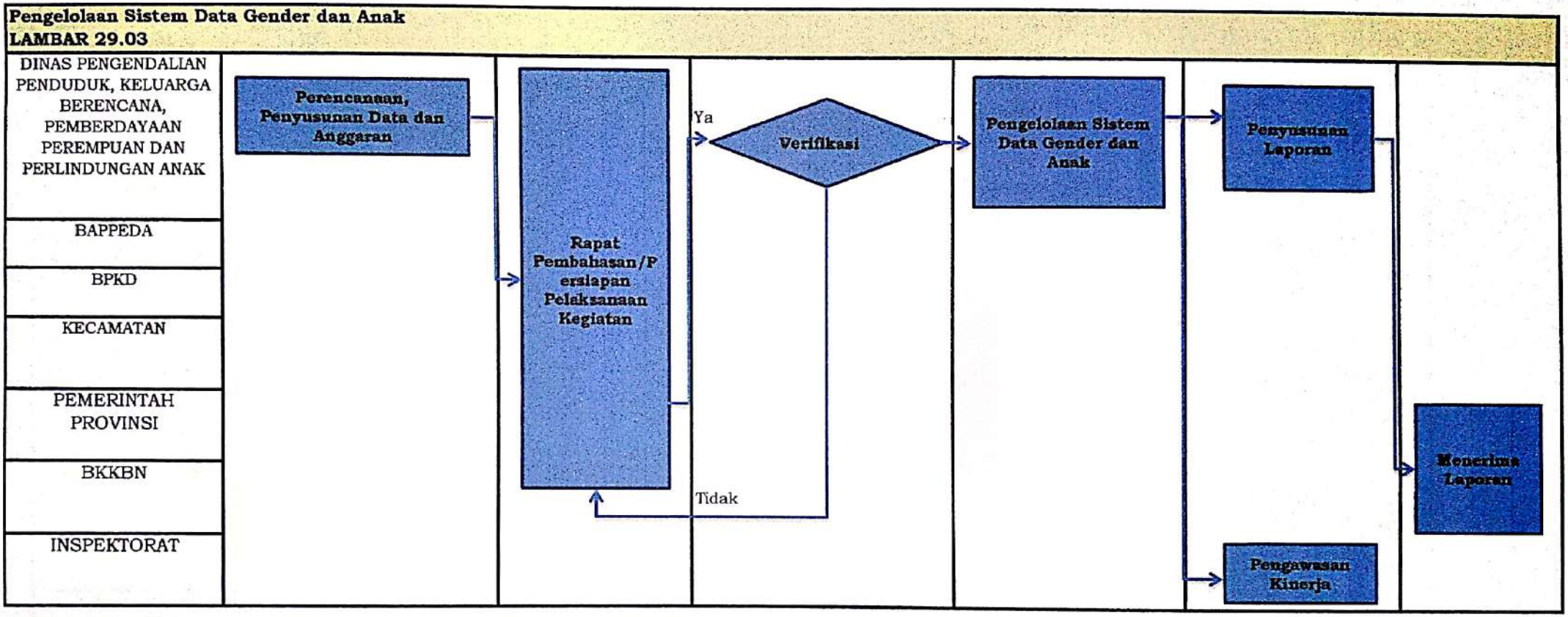
Peningkatan Kualitas Keluarga
LAMBAR 29.02



OPD	KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

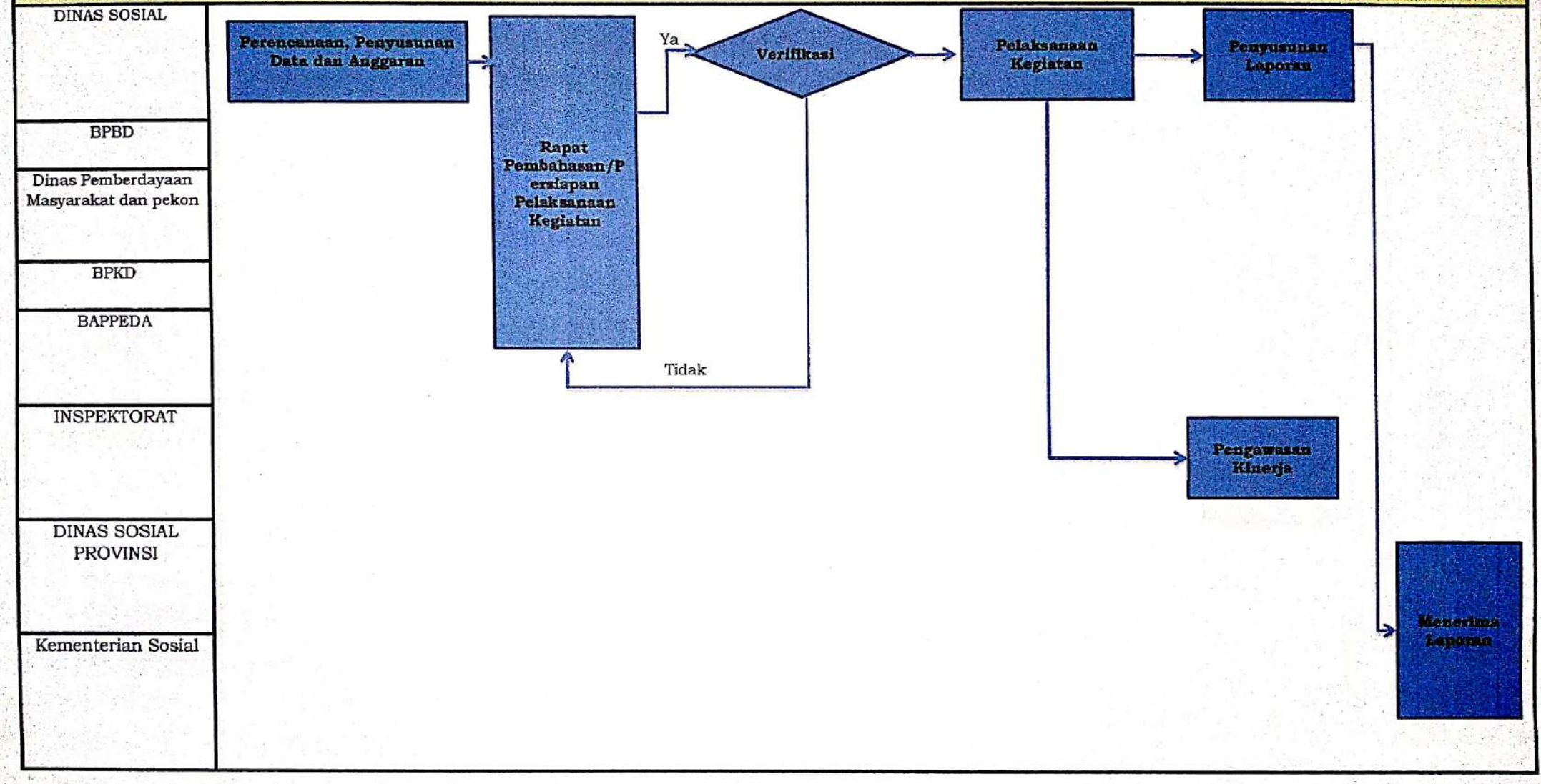
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
LAMBAR 29.03



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

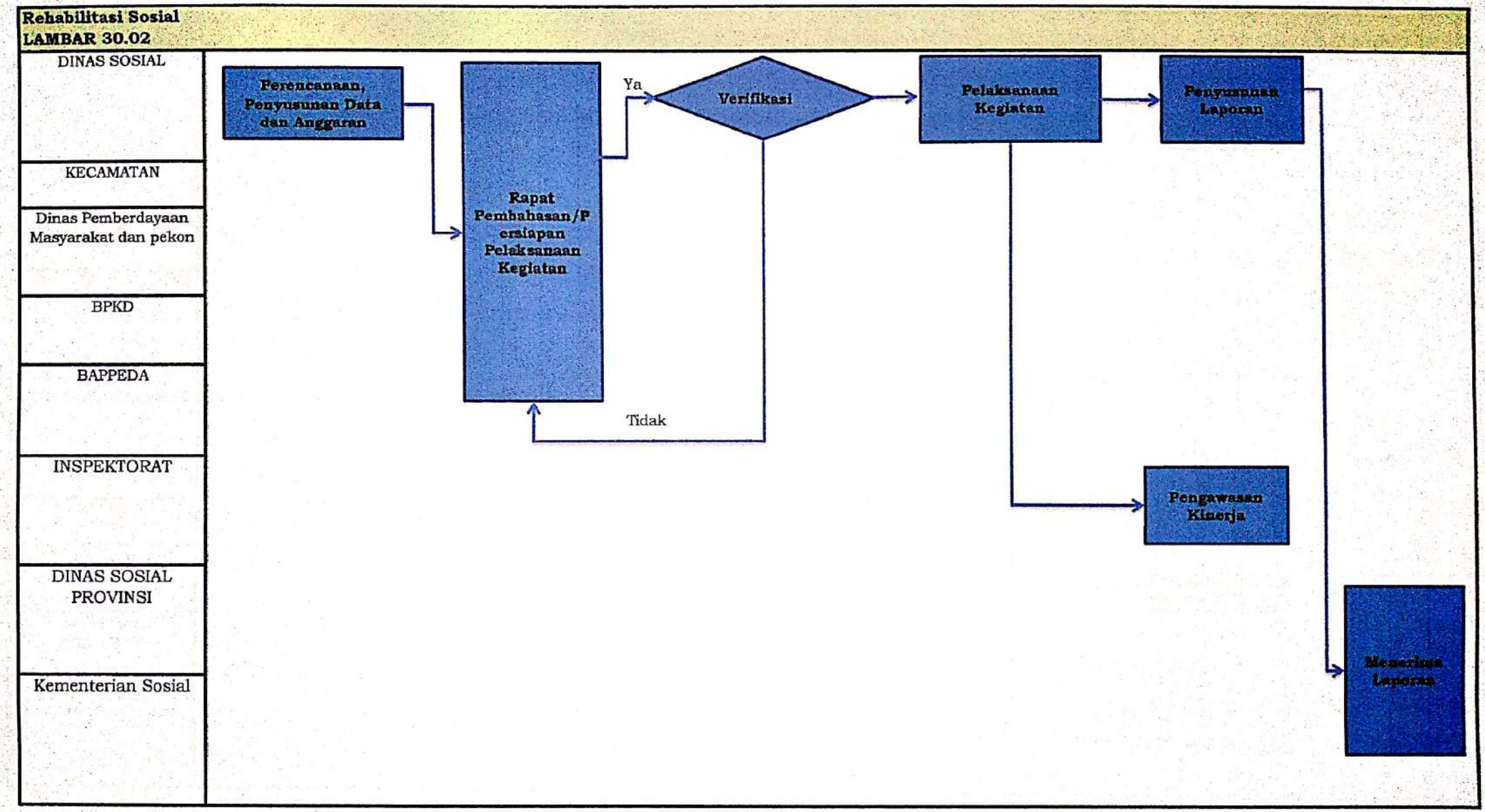
Pemberdayaan Sosial
LAMBAR 30.01



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

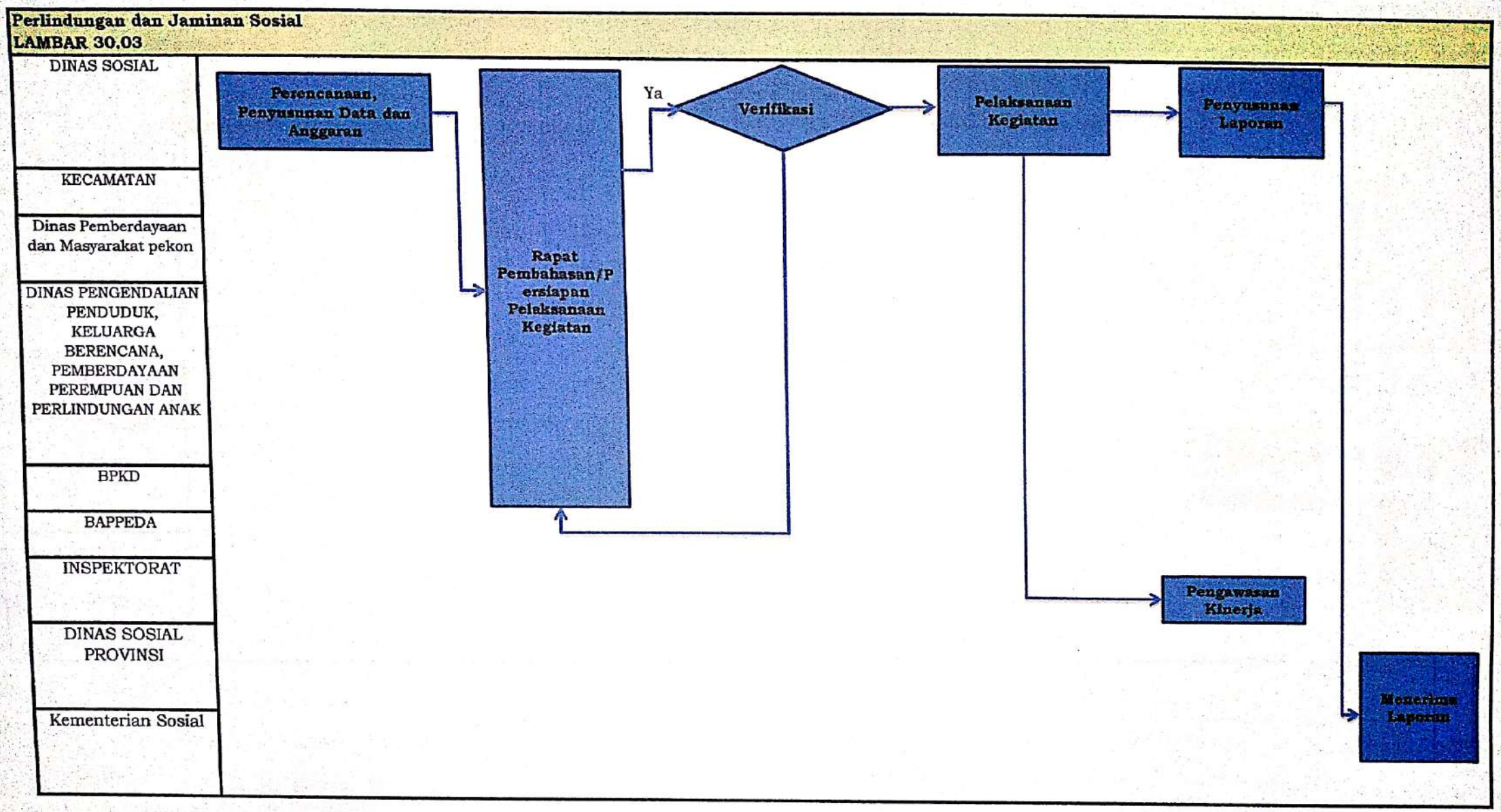
Rehabilitasi Sosial
LAMBAR 30.02



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

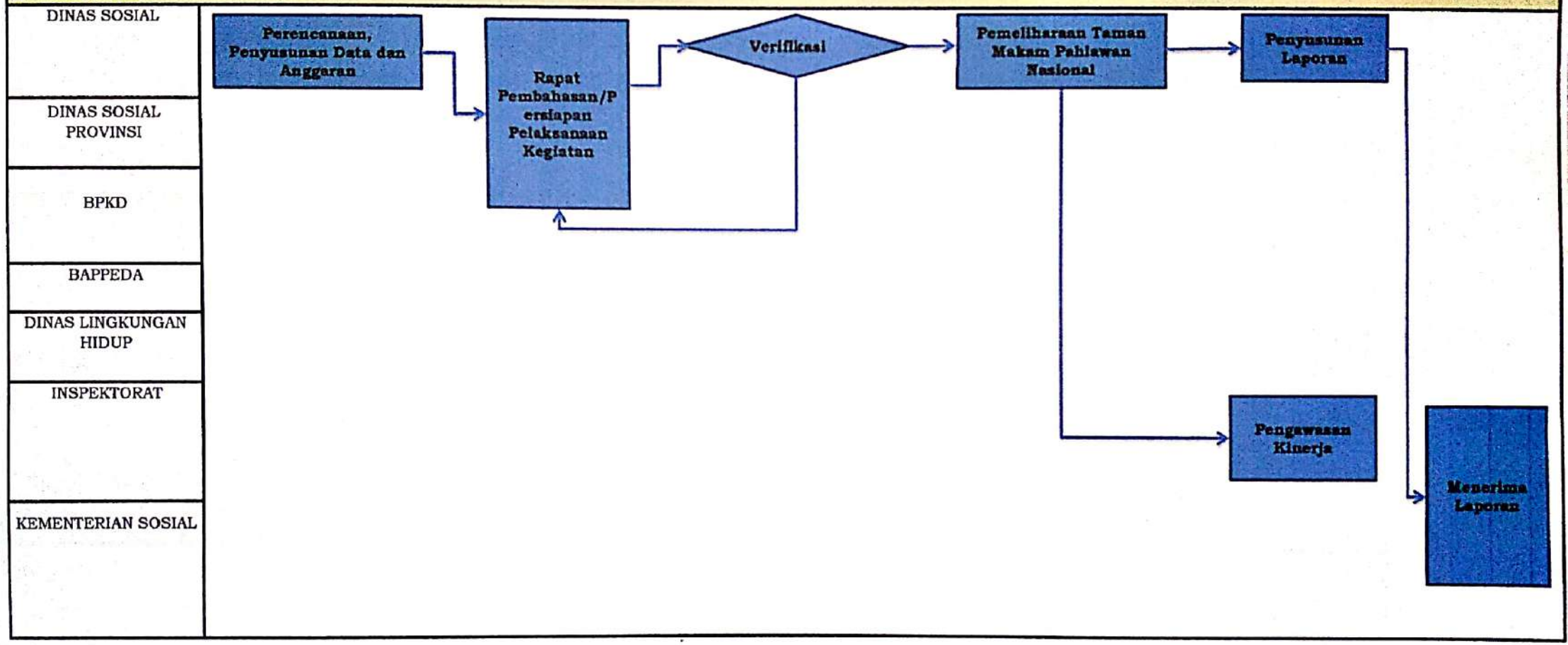
Perlindungan dan Jaminan Sosial
LAMBAR 30.03



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

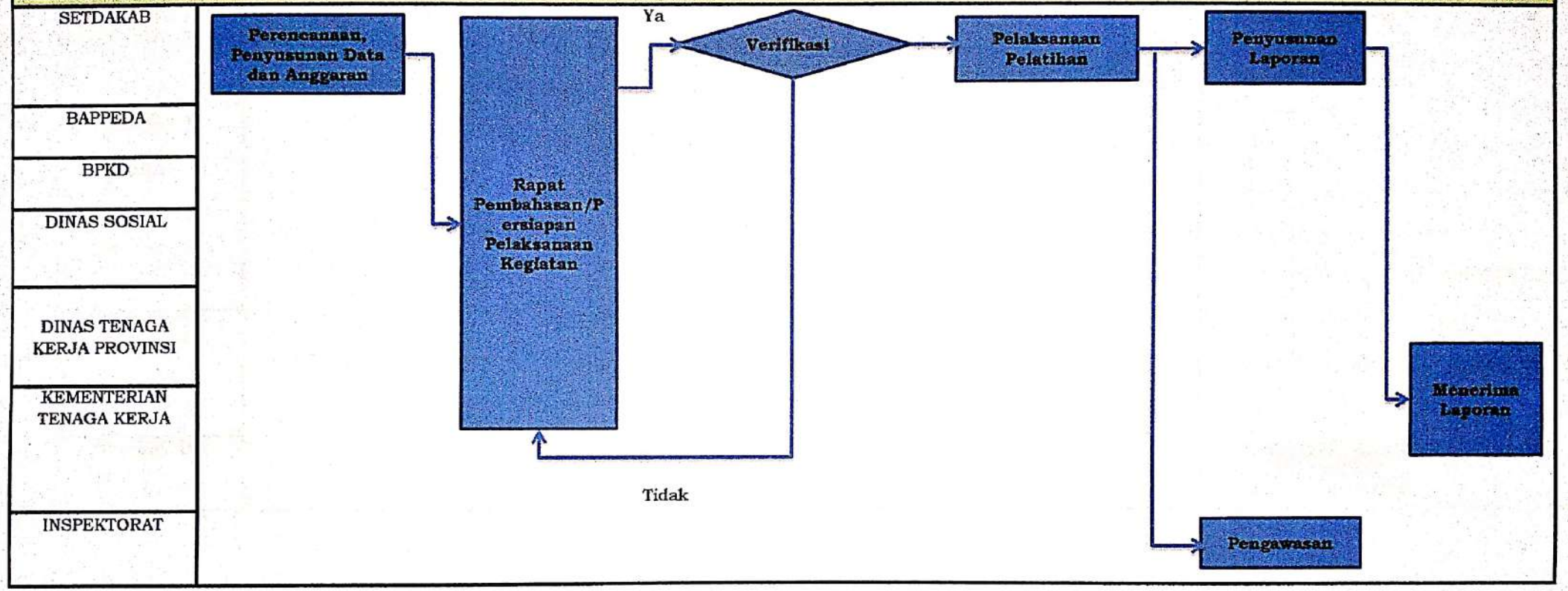
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
LAMBAR 30.04



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

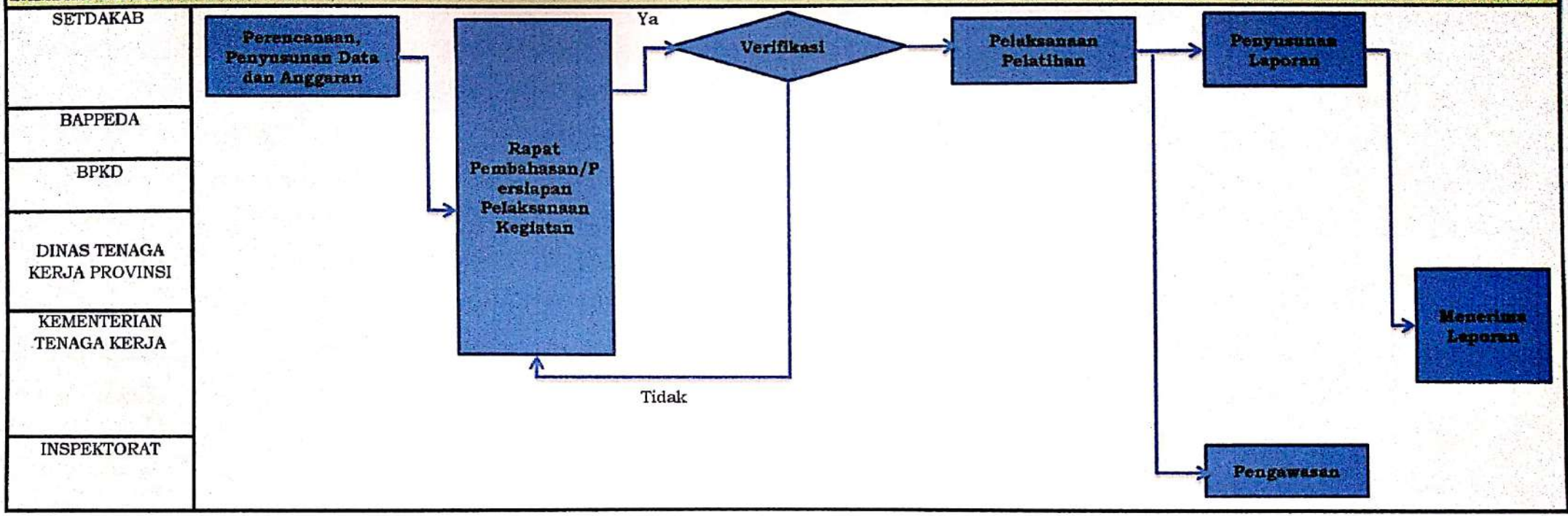
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
LAMBAR 31.01



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

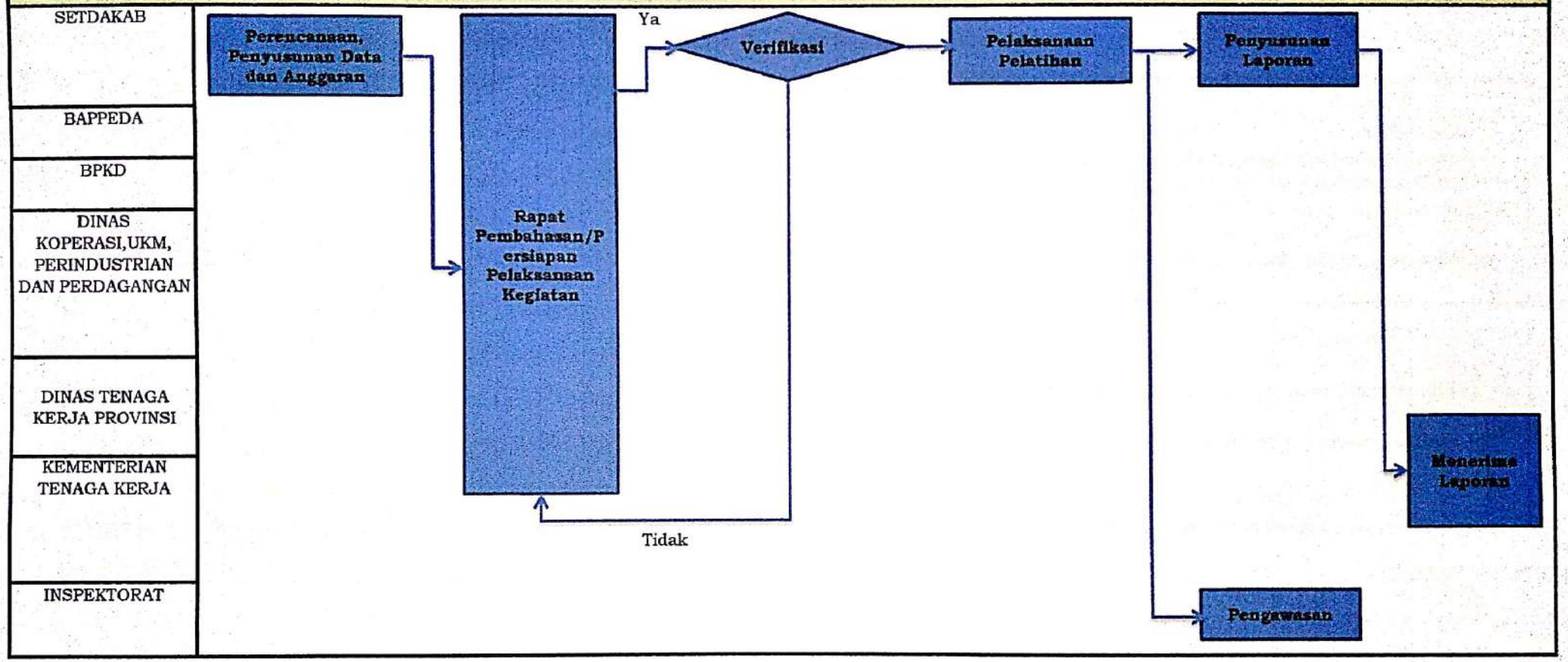
Penempatan Tenaga Kerja
LAMBAR 31.02



OPD | KASAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Hubungan Industrial
LAMBAR 31.03



OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

LAMBAR 01

Mengembangkan Wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Dinas Sosial
4. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Perhubungan
7. Sekretariat Daerah

LAMBAR 02

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing

1. Dinas Ketahanan Pangan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
6. Dinas Pendidikan dan kebudayaan

LAMBAR 03

Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro wisata berbasis sumberdaya lokal

1. Dinas Perkebunan dan Peternakan
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Dinas Perikanan
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

LAMBAR 04

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Sekretariat Daerah
4. Sekretariat DPRD
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Badan Penelitian dan Pengembangan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LAMBAR 05

Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

1. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
4. Dinas Sosial
5. Sekretariat Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner